# PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS)

(Studi Di Desa Purwodadi, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan)

#### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

> SHOFILATUL MILADIAH NIM. 145030100111009



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018

#### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Terpadu

Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat

dan Sejahtera (P2WKSS)

(Studi di Desa Purwodadi Kecamatan Barat

Kabupaten Magetan)

Disusun oleh : Shofilatul Miladiah

NIM : 145030100111009

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat: -

Malang, 16 April 2018

Komisi Pembimbing,

Dr. Lelv Indah Mindarti, M.Si NIP. 19690524 200212 2 002

#### TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu administrasi

Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

: 15 Mei 2018 Tanggal

Jam : 09.00

Skripsi atas nama : Shofilatul Miladiah

Judul : Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Terpadu

Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan

Sejahtera (P2WKSS)

(Studi di Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten

Magetan)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si NIP. 19690524 200212 2 002

Anggota

Anggota

Dr. Siti Rohmah, M.Si

NIP. 195703131 198601 2 001

Niken Lastiti V. A., S.AP., M.AP

NIP. 19810210 200501 2 002

# BRAWIJAYA

#### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 17 April 208

Mahasiswa

Nama: Shofilatul Miladiah

NIM : 145030100111009

# BRAWIJAYA

#### **CURRICULUM VITAE**

Nama : Shofilatul Miladiah

NIM : 145030100111009

Tempat dan Tangga Lahir : Magetan, 15 November 1995

Fakultas/Jurusan : FIA/ Administrasi Publik

Pendidikan : Ilmu Administrasi Publik

1. SD : SDN Botok I (2002-2008)

2. SMP : SMPN 2 Magetan (2008-2011)
3. SMA : SMAN 1 Sukomoro (2011-2014)

4. Universitas : Universitas Brawijaya (2014-2018)

Pekerjaan : -

Pengalaman Magang : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur (2017)

Pengalaman Organisasi :

1. UKM TEGAZS Universitas Brawijaya (Tim Bidang Penyuluhan, 2016)

2. UKM TEGAZS Universitas Brawijaya (Sekretaris Umum, 2017)

Pengalaman Kepanitiaan

1. Gebyar Brawijaya Qur'ani II (Divisi Konsumsi, 2015)

2. Pagelaran Seni Simpfoni Senja (Co. Konsumsi, 2015)

3. Gebyar Brawijaya Qur'ani III (Divisi MHQ, 2016)

4. Seminar Nasional FORMAPI (Divisi Konsumsi, 2016)

5. Seminar Nasional HANI (Divisi Konsumsi, 2016)

6. Peringatan Hari AIDS Sedunia (Divisi Humas, 2016)

7. Peringatan Malam Renungan AIDS Nusantara (Divisi Humas, 2016)

8. Diklat XIV UKM TEGAZS UB (Divisi Humas, 2016)



### LEMBAR ERSEMBAHAN

### Teruntuk ...

Ibu, Bapak dan Adik, yang selalu menyayangiku.

Terimakasih untuk segala doa, dukungan, dan semangat,
yang tiada henti selama ini ...

#### RINGKASAN

Shofilatul Miladiah, 2018, **Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) (Studi Di Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan**). Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si.

Program Terpadu P2WKSS merupakan program untuk memberdayakan dan meningkatkan peran perempuan. Di Kabupaten Magetan P2WKSS dilaksanakan di Desa Purwodadi Kecamatan Barat pada tahun 2016. Dssa Purwodadi merupakan salah satu desa dengan kepala desa perempuan yang sangat mendukung kegiatan-kegiatan perempuan. Selain itu ada banyak kegiatan perempuan di Desa purwodadi. Pelaksanaan P2WKSS di Desa Purwodadi berjalan cukup baik meskipun belum maksimal karena beberapa kendala. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian Program Terpadu P2WKSS Di Desa Purwodadi dan faktor pendukung serta faktor penghambatnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian menguraikan tentang pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumetasi. Sedangkan analisis data menggunakan Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah pertama, aktor yang terlibat dalam P2WKSS adalah pemerintah dan masyarakat. Kedua, Tahap-tahap pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS ada 10 (sepuluh) dan sudah dilakukan semua, tetapi belum maksimal karena belum mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan program kerja, beberapa tahap kegiatan hampir sama, dan masih kurangnya evaluasi. Ketiga, Hasil pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS dapat mencapai tujuannya yaitu peningkatan pada pengetahuan perempuan; pengatahuan, keterampilan dan sikap positif; pembinaan anak dan remaja; kesehatan dan kesejahteraan; kesadaran pelestarian lingkungan hidup; kesadaran berbangsa dan bernegara; memberdayakan kaum lansia; serta meningkatkan perekonomian lokal. Namun pencapian tujuan ini belum maksimal pada kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup. Keempat, terdapat 3(tiga) faktor pendukung yaitu masyarakat; banyak kegiatan perempuan yang sudah ada sebelum program terpadu P2WKSS; dan dasar hukum. Kelima, terdapat faktor penghambat pada pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS, yaitu masyarakat; kurangnya monitoring dan evaulasi; beberapa kegiatan vakum; kendala waktu saat pembinaan dan kegiatan; serta keterlambatan kedatangan saat pembinaan.

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa saran peneliti antara lain bekerjasama dengan pihak swasta, menyertakan masyarakat pada penyusunan program, meningkatkan status kesehatan dan kesadaran pelestarian lingkungan, mengajak dan memotivasi masyarakat, mengadakan monitoring dan evaluasi kegiatan, menghidupkan lagi kegiatan yang vakum, menyelenggarakan kegiatan di waktu luang/libur. Mengingatkan masyarakat agar tidak terlambat saat pembinaan.

#### **SUMMARY**

Shofilatul Miladiah, 2018, **Women Empowerment through Integrated Program Improving the Role of Women Toward a Healthy and Prosperous Family (P2WKSS) (Study In Purwodadi Village, Barat Subdistrict of Magetan District).** Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si

P2WKSS integrated program is a program to empower and enhance the role of women. In Magetan district P2WKSS is implemented in Purwodadi village Barat subdistrict in 2016. Purwodadi is one village with female village head that very support women activities. Other than that, there are many women activities in Purwodadi village. The implementation of P2WKSS ini Purwodadi village is runs quite well although not maximized due to some obstacles. Therefore, the researcher is interested in conducting research of Integrated Program of P2WKSS in Purwodadi village and supporting factors and its inhibiting factors.

This research uses descriptive research with qualitative approach. The focus of research is describes the empowerment through integrated program of P2WKSS in Purwodadi village Barat Subdistrict of Magetan District, and supporting factors and inhibiting factors. The type of data is used primary data and secondary data. The data collection techniques with interview, observation, and documentation. While, data analysis uses from Miles, Huberman, and Saldana (2014) that is data collection, data condensation, data display, and conclusion.

The result of this study are first, the actors involved in P2WKSS are government and community. Second, the stages of women's empowerment through the integrated program P2WKSS have been 10 (ten) and have been done all, but not yet maximal because it has not included the community in the preparation of work programs, several stages of activity are almost the same, and still lacking evaluation. Third, the result of women's empowerment through integrated program of P2WKSS can reach their goal of improvement in women's education; positive knowledge, skills and attitudes; coaching children and adolescents; health and well being; conservation of the environment; national and state awareness; empowering the elderly; and improving the local economy. But the achievement of this goal has not been maximized on health and environmental conservation. Fourth, there are 3 (three) supporting factors is community, many women activities that existed before integrated program of P2WKSS, and legal basis. Fifth, there are inhibiting factors on women's empowerment through integrated programs of P2WKSS that are the community; lack of monitoring end evaluation; some vacuum activities; time constraints when coaching and activities; and late arrival time when coaching.

Based on the description, some the researcher's recommendation among others, in cooperation with private parties; involving the community in programming; improve the health status and awareness of environmental conservation, invite and motivate the community, conduct monitoring and evaluation activities, revive vacuum activities, organize activities in the leisure/holiday., remain community not to be late when coaching.

#### KATA PENGANTAR

Alhamdulilahirrobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS) (Studi di Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan)". Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di Yaumul Akhir.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.AP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti sampaikan terima kasih kepada:

- Orang tua saya, Ibu Sumarsih dan Bapak Sarbi, dan Adik saya Shifa Khotimatus Zakia, yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa-doa tanpa henti.
- Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Bapak Dr. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- 4. Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- 5. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dengan penuh kesabaran membimbing dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

- 6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi khususnya dosen Jurusan Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan.
- 7. Kepala Desa, perangkat desa dan seluruh masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan yang telah memberikan kesempatan, meluangkan waktu dan membantu saya dalam melaksanakan penelitian.
- 8. Kepala Bidang PPPA, Kasubid Pemberdayaan Perempuan, Kasubid Perlindungan Perempuan dan Anak dan seluruh pegawai Dinas PPKBPPPA Kabupaten Magetan yang senantiasa meluangkan waktu dan membantu saya dalam melaksanakan penelitian.
- 9. Teman-temanku tersayang Ismiatul Azizah, Rizky Nurin, Nurhidayah Istiqomah, Isro'iyatin Rahmawati, Halimatus Sa'diyah yang selalu ada, memberikan semangat, dukungan, bantuan dan saran.
- Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Administrasi Publik angkatan
   2014 khusunya kelas A.
- 11. Teman-teman UKM TEGAZS 2017/2018 khususnya pengurus inti Anwi Kusuma, Anisa Kaerani, Fania Alif, Setiyowati yang berbeda fakultas tapi selalu menyemangati dan mendukung satu sama lain.
- 12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti sadar bahwa tidak ada yang sempurna, dan skripsi ini pun masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu demi lebih baiknya skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 28 Mei 2018

Penulis

# DAFTAR ISI

| MOTTO   | ii         |
|---|------------|
| LEMBAR PERSEMBAHAN  | . iii      |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI   |            |
| TANDA PENGESAHAN SKRIPSI  |            |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI                                   | . vi       |
| RINGKASAN   |            |
| SUMMARYv  | /iii       |
| KATA PENGANTAR  | . ix       |
| DAFTAR ISI  |            |
| DAFTAR TABELx   |            |
| DAFTAR GAMBAR   |            |
| DAFTAR LAMPIRANx  | <b>v</b> i |
|   |            |
| BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang                               |            |
|   |            |
| B. Rumusan Masalah  |            |
| C. Tujuan Penelitian  |            |
| D. Kontribusi Penelitian  |            |
| E. Sistematika Penulisan  | 12         |
| BAB II TINJAUAN PUSATAKA  |            |
| A. Administrasi Publik  | 14         |
| Pengertian Administrasi Publik                                    |            |
| 2. Hubungan Administrasi Publik Dengan Administrasi Pembangunan   |            |
| B. Administrasi Pembangunan                                       |            |
| 1. Pengertian Administrasi Pembangunan                            |            |
| 2. Pembangunan Masyarakat   |            |
| 3. Pembangunan Berbasis Pemberdayaan                              |            |
| C. Pemberdayaan Masyarakat  |            |
| 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat                             |            |
| 2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat                                 |            |
| 3. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat                                | 22         |
| 4. Aktor-aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat                      | 23         |
| 5. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat                            | 25         |
| D. Pemberdayaan Perempuan   |            |
| Pengertian Perempuan dan Gender                                   |            |
| 2. Peran Perempuan dalam Pembangunan                              |            |
| 3. Pengertian Pemberdayan Perempuan                               |            |
| 4. Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan                      |            |
| 5. Program Pembangunan Pemberdayaan Perempuan                     |            |
| E. Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Seh |            |
| dan Sejahtera (P2WKSS)  |            |
| 1. Pengertian Program Terpadu P2WKSS                              | 36         |

|       | 2. Tujuan dan Sasaran Program Terpadu P2 w K55  |              |
|-------|---|--------------|
|       | 3. Tahapan Program Terpadu P2WKSS   | 40           |
| RAR 1 | III METODE PENELITIAN   |              |
|       | A. Jenis Penelitian   | 44           |
|       | B. Fokus Penelitian   |              |
|       | C. Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian   |              |
|       | D. Sumber dan Jenis Data  |              |
|       | E. Teknik Pengumpulan Data  |              |
|       | F. Instrumen Penelitian   |              |
|       | G. Analisis Data  |              |
| DADI  | W. WAGW. DAN DENDAWAGAN   |              |
|       | IV HASIL DAN PEMBAHASAN   | <i>- - -</i> |
| 4     | A. Gambaran Umum  |              |
|       | Gambaran Umum Kabupaten Magetan     Gambaran Umum Dinas Pangandalian Panduduk Kabuaran Baranasa |              |
|       | 2. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencar                                 |              |
|       | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPP Kabupaten Magetan                         | ,            |
|       | 3. Gambaran Umum Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupat   |              |
|       | MagetanMagetan  |              |
| ,     | B. Penyajian Data   | 19           |
| 1     | 1. Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Terpadu Peningkat                                     | กท           |
|       | Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)                                     |              |
|       | Desa Purwodadi  |              |
|       | a. Aktor-aktor yang Terlibat dalam Pemberdayaan Perempuan mela                                  |              |
|       | Program Terpadu P2WKSS  |              |
|       | b. Tahap-tahap Pemberdayaan Perempuan melalui Program Terpa                                     |              |
|       | P2WKSS  |              |
|       | c. Hasil Pemberdayaan Perempuan melalui Program Terpa   |              |
|       | P2WKSS  |              |
|       | 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Perempuan Mela                                  |              |
|       | Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sel                                  |              |
|       | dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Purwodadi  |              |
|       | a. Faktor Pendukung   |              |
|       | b. Faktor Penghambat1   |              |
| (     | C. Analisis Data1   |              |
|       | 1. Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Terpadu Peningkat                                     | an           |
|       | Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)                                     |              |
|       | Desa Purwodadi  |              |
|       | a. Aktor-aktor yang Terlibat dalam Pemberdayaan Perempuan mela                                  | lui          |
|       | Program Terpadu P2WKSS1   |              |
|       | b. Tahap-tahap Pemberdayaan Perempuan melalui Program Terpa                                     |              |
|       | P2WKSS1   |              |
|       | c. Hasil Pemberdayaan Perempuan melalui Program Terpa   |              |
|       | D2W/KSS 1   | 57           |

| 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Peren | npuan Melalui  |
|---|----------------|
| Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju K   | Keluarga Sehat |
| dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Purwodadi              | 169            |
| c. Faktor Pendukung                                   | 169            |
| d. Faktor Penghambat                                  | 171            |
|   |                |
| BAB V KESIMPULAN                                      |                |
| A. Kesimpulan   | 175            |
| B. Saran  | 177            |
|   |                |

# DAFTAR PUSTAKA

# LAMPIRAN

# DAFTAR TABEL

| No | Judul   | Halaman |
|----|---|---------|
| 1  | Peran Tiga Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat        | 23      |
| 2  | Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk | 59      |
| 3  | Susunan Tim Pembina Kegiatan P2WKSS Kabupaten         |         |
|    | Magetan Tahun 2016.                                   | 87      |
| 4  | Susunan Tim Pengendali Kegiatan P2WKSS Kecamatan      |         |
|    | Barat Tahun 2016                                      | 89      |
| 5  | Susunan Tim Pengendali Kegiatan P2WKSS Desa Purwodadi |         |
|    | Kecamatan Barat Tahun 2016.                           | 92      |
| 6  | Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan                   | 110     |
| 7  | Capaian Rumah Tangga Sehat Desa Purwodadi             | 118     |
| 8  | Perkembnagan Program KB Desa Purwodadi                | 119     |
| 9  | Partisipasi Pria dalam ber-KB Desa Purwodadi          | 120     |
| 10 | Klasifikasi Kesejahteraan Penduduk Desa Purwodadi     | 122     |
| 11 | Data Perempuan yang Mempunyai Usaha Kelompok          |         |
|    | "Dadi Makmur"   | 128     |
| 12 | Capaian program P2WKSS sesuai tujuan khusus           | 165     |

# DAFTAR GAMBAR

| No | Judul   | Halaman |
|----|---|---------|
| 1  | Komponen Dalam Analisis Data Model Interaktif             | 54      |
| 2  | Peta Kabupaten Magetan                                    | 57      |
| 3  | Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga |         |
|    | Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   |         |
|    | Kabupaten Magetan   | 62      |
| 4  | Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Purwodadi Kecamatan |         |
|    | Barat Kabupaten Magetan                                   | 80      |

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh semua negara baik negara berkembang maupun negara yang sudah maju. Pembangunan dalam skala nasional pada hakikatnya adalah untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Pembangunan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara jelas tertuang pada alenia keempat bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Riyadi dalam Theresia *et.al* (2015:2) pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu-hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Menurut Bab I Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bersama. Pembangunan dalam suatu negara yang meliputi semua segi kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya akan berhasil apabila dalam

pelaksanaannya melibatkan partisipasi seluruh rakyatnya (Listyaningsih, 2014:127).

Pembangunan berbasis masyarakat, merupakan pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada (baik sumber daya alam, manusia, kelembagaan, maupun nilai-nilai sosial budaya) (Theresia et.al, 2015:28). Tidak hanya laki-laki, perempuan merupakan bagian dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan. Menurut Remiswal (2013:35) Istilah perempuan memiliki kesamaan arti dengan wanita yang muncul akibat pendikotomian manusia atas seks biologis yang berdampak pada pembagian perannya dari segi budaya.

Partisipasi perempuan dalam pembangunan secara umum dapat dilihat melalui tiga pendekatan. Pertama, pendekatan *Women In Development* (WID) yang merupakan suatu proses pengintegrasian perempuan dalam pembangunan. Kedua, pendekatan *Women And Development* (WAD) yang merupakan pendekatan yang menekankan pada hubungan antara perempuan dan proses pembangunan (Dharma dalam Remiswal, 2013:37). Ketiga, pendekatan *Gender And Development* (GAD) yang menekankan pada orientasi hubungan sosial dalam pembangunan. Dalam pendekatan GAD, persoalan mendasar dalam pembangunan merupakan akibat dari hubungan gender yang tidak adil. Hal ini ah yang kemudian menurut Darwin dalam Remiswal (2013:37) dianggap sebagai situasi yang menghalangi pemerataan pembangunan dan partisipasi penuh perempuan.

Di Indonesia, kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan salah satu tujuan pembangunan telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2015 dan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Ada tiga isu strategis dalam RPJMN 2015-2019 terkait kesetaraan dan keadilan gender, yaitu:

"(1) meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; (2) meningkatnya perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO); dan (3) meningkatnya kapasitas kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan".

Perempuan merupakan salah satu sasaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Pembangunan kualitas sumberdaya manusia ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin, yang ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (RPJMN 2015-2019:10-11). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA, 2016:130) IPM Indonesia pada tahun 2014 sebesar 68,90% dan pada tahun 2015 naik menjadi 69,55%, sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 91.03%. Hal ini berarti bahwa tujuan untuk menciptakan kesetaraan dan persamaan gender telah mampu diwujudkan.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mendorong kemampuan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan baik pendidikan dan pelatihan tenaga kerja maupun program pemberdayaan perempuan yang memperjuangkan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pemberdayaan perempuan di Indonesia,

pengukuran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan suatu hal yang sangat penting. Dalam RPJMN 2015-2019 pemerintah telah mentargetkan IDG selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun 3 (tiga) tahun terakhir peningkatan IDG relatif rendah, meskipun targetnya terpenuhi. Pada tahun 2015 IDG tercatat sebesar 70,83% atau meningkat 0,15%, padahal pada kurun waktu 2010-1012 peningkatan IDG mencapai 1%.

Meskipun upaya pemberdayaan perempuan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, namun masih belum mendapatkan hasil yang maksimal terumata di bidang politik dan ekonomi. Hal ini dikarenakan perempuan memiliki kekurangan dalam kekuasaan ekonomi maupun sosial sehingga mengalami kesulitasn untuk masuk ke ranah politik yang didominasi oleh kaum laki-laki (UNDP dalam KPPPA, 2016:64). Oleh karena itu meningkatkan kapasitas perempuan merupakan suatu hal yang harus segera dilakukan agar dapat mendobrak berbagai ideologi dan budaya yang selama ini menghambat peran perempuan di semua bidang pembangunan (KPPPA, 2016).

Upaya pemberdayaan di dalam masyarakat tidak terlepas dari partisipasi dan peran perempuan dalam kehidupan di dalam keluarga dan masyarakat. Hal ini menjadikan perempuan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan dan pemberdayaan. Menurut Hanindito dalam Listiyaningsih (2015) pemberdayaan perempuan merupakan upaya peningkatan kemampuan perempuan dalam memperoleh akses dan kontrol terhadap semua sumber daya dalam seluruh aspek kehidupan. Menurut Harkristuti dalam Listiyaningsih (2015) pemberdayaan perempuan sebagai langkah tindak yang

BRAWIJAY

efektif untuk memerangi kemiskinan, kelaparan dan penyakit, dan pencapaian pembangunan yang benar-benar berkelanjutan.

Pendekatan perempuan sebagai salah satu unsur pembangunan dan pemberdayaan bukan berarti menggungguli laki-laki, namun lebih pada meningkatkan peran dan kapasitas perempuan sebagai salah satu unsur pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pertisipasinya. Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk memberdayakan perempuan agar lebih berpengetahuan, mandiri dan produktif. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi diskriminasi perempuan atas laki-laki di dalam keluarga dan masyarakat. Sebagai salah satu upaya memberdayakan perempuan dan mengurangi diskriminasi terhadap perempuan, pemerintah mengadakan suatu program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) secara terpadu.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah,

"Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di daerah adalah peningkatan peranan perempuan yang diselenggarakan melalui serangkaian program, dengan menggunakan pola kedekatan lintas sektor dan lintas pelaku di daerah, yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas".

Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) bertujuan untuk mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera dimana yang menjadi sasaran utamanya adalah keluarga miskin baik di desa/kelurahan dengan perempuan sebagai penggerak utamanya. Program

P2WKSS merupakan salah satu program pemberdayaan perempuan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas bagi perempuan. Selain itu program ini juga merupakan salah satu program yang dilombakan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Keunggulan program P2WKSS dibandingkan dengan program pemberdayaan perempuan yang lain adalah, bahwa program P2WKSS ini dilaksanakan secara terpadu lintas sektor, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah. Selain itu, menurut KPPPA dalam Kebijakan dan Strategi Peningatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) (2012:6), program P2WKSS sangat strategis dalam rangka mengembangkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam serta lingkungan. Program P2WKSS ini merupakan suatu program yang memberikan perhatian khusus kepada kelompok keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah, sebagai Pedoman Pelaksanaan P2WKSS menjadi salah satu acuan untuk menjalankan kegiatan peningkatan peranan wanita di daerah yang perlu dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan peran perempuan/wanita sebagai mitra sejajar bagi pria, serta perempuan sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam membangun, memberdayakan dan memajukan daerah.

Sebagian besar daerah di Indonesia terutama di Pulau Jawa, nilai IDG hampir sama yaitu diantara rentang 60-70%. Di Jawa Timur nilai IDG tahun 2015 tercatat 68,41% nilai ini lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi lain seperti DKI Jakarta 71,41%, Jawa Barat 69,02%, Jawa Tengah 74,80% dan DI Yogyakarta 68,75%. Penilaian IDG ini didasarkan pada persentase keterlibatan perempuan di parlemen, Perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi teknis dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Sehingga untuk meningkatkan nilai IDG perlu juga dengan meningkatkan keberdayaan perempuan. Salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang masih memiliki IDG lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain adalah Kabupaten Magetan.

Di Kabupaten Magetan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2015 tercatat 71,39%. Nilai ini meningkat diandingkan dengan tahun 2014, yaitu 70,29%. Sedangkan Indeks Pembangunan gender di Kabupaten Magetan berada pada angka 93,64%, dimana angka ini menujukkan bahwa Kabupaten Magetan telah mampu mencapai kesetaraan dan persamaan gender. Namun, sama halnya dengan Indeks Pemberdayaan Gender nasional, perlu adanya peningkatan terutama melalui peningkatan peranan perempuan. Untuk nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Magetan masih 60,50% pada tahun 2015, lebih rendah dibandingkan beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Untuk meningkatkan nilai IDG, perlu adanya peningkatan kapasitas dan peran perempuan baik di dalam masyarakat maupun di dalam keluarga. Hal ini perlu dilaksanakan guna menggali potensi perempuan dalam pembangunan melalui

program pemberdayaan, dimana salah satunya adalah melalui program P2WKSS.

Desa Purwodadi Kecamatan Barat, merupakan salah satu daerah di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, yang telah menjalankan program P2WKSS dimana dalam pelaksanannya tersebut secara terpadu lintas sektor dengan berbagai Dinas di Kabupaten Magetan. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan merupakan salah satu aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program P2WKSS. Desa Purwodadi merupakan salah satu desa di Kabupaten Magetan yang memiliki potensi dalam mengembangkan desanya melalui kegiatan perempuan/wanita, salah satunya melalui program terpadu P2WKSS ini. Hal ini ditandai dengan pencapaian Desa Purwodadi yang menjadi perwakilan Kabupaten Magetan menuju lomba P2WKSS tingkat provinsi (Jawa Timur) tahun 2016 di Surabaya sebagaimana dikutip dari website resmi Desa Purwodadi (http://purwodadi.magetan.go.id/). Di tingkat Provinsi ini, Kabupaten Magetan berada di posisi terbaik ke 6 (enam) pelaksanaan program P2WKSS sekabupaten kota di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, Ibu Endang Setyowati, Desa Purwodadi Kecamatan Barat dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Magetan sebagai desa sasaran program P2WKSS pada tahun 2016 untuk diajukan lomba P2WKSS ke tingkat Provinsi (Jawa Timur). Desa

Purwodadi di pilih karena banyaknya kegiatan perempuan yang sudah ada. Selain itu, Desa Purwodadi merupakan salah satu desa yang kepala desanya adalah perempuan dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kegiatan-kegiatan perempuan di desanya. Hal ini menjadikan Desa Purwodadi memiliki potensi yang tinggi untuk berkembang dan maju dari segi pemberdayaan perempuannya.

Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan berjalan cukup baik dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Hal tersebut tidak terlepas dari partisipasi, antusias dan kesadaran dari warga masyarakat yang mendukung berbagai kegiatan di Desa Purwodadi. Namun begitu, masih ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi desa Purwodadi untuk melaksanakan kembali atau melanjutkan berbagai kegiatan dari Program terpadu P2WKSS. Beberapa permasalahan atau kendala di desa Purwodadi, antara lain adalah kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Purwodadi mengakibatkan kegiatan hanya berjalan begitu saja (yang penting berjalan), tanpa mengevaluasi apasaja yang kurang dan yang perlu diperbaiki pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Selain itu beberapa kegiatan vakum, dikarenakan saat ini Desa Purwodadi lebih mengutamakan pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana. Waktu juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan, beberapa masyarakat kurang antusias, dan keterlambatan kedatangan warga saat pembinaan.

Desa Purwodadi sebagai salah satu desa di Kabupaten Magetan dengan kegiatan pemberdayaan perempuannya perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan agar pelaksanaannya dapat memberikan manfaat dan mencapai tujuan P2WKSS sendiri yaitu mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. Selain itu agar pelaksanaan program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain, bahkan daerah lain untuk mengembangkan potensi desanya melalui kegiatan-kegiatan dimana perempuan/wanita sebagai penggeraknya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pemberdayaan Perempuan melalui Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) dengan studi di Desa Pirwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumumsan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimanakah Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan?
- 2. Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan?

# BRAWIJAY.

#### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Pemberdayaan Perempuan melalui Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Purwodadi Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan.
- 2. Untuk mengetahui, mendesripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat Pemberdayaan Perempuan melalui Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Purwodadi Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan.

#### D. Kontribusi Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan daoat memberikan kontribusi sebagai berikut:

- 1. Kontribusi Akademis
  - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik.
  - Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut.

#### 2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Pemerintah khususnya pemerintah daerah baik kabupaten kota maupun pemerintah desa, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

BRAWIJAYA

ataupun masukan untuk kegiatan Pemberdayaan Perempuan melalui Program terpadu P2WKSS.

b. Memberikan masukan bagi masyarakat Desa Purwodadi dalam
 Pemberdayaan Perempuan melalui Program Terpadu P2WKSS.

#### E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang beberapa hal yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu teori administrasi publik, administrasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan konsep Program Terpadu P2WKSS.

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan.

Oleh karena menggunakan metode penelitian kualitatif maka yang akan diuraikan dalam bab ini antara lain: jenis penelitian, fokus

penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi gambaran umum lokasi dan situs penelitian, Penyajian data berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan analisis data yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini sesuai dengan fokus penelitian.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari semua yang sudah diuraiakan dan dibahas serta berisi saran peneliti untuk meningkatkan pelaksanaan program terpadu P2WKSS menjadi lebih baik lagi.

#### BAB II

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Publik

#### 1. Pengertian Administrasi Publik

Di Indonesia, selama ini istilah *public administration* diartikan sebagai administrasi negara yang lebih menekankan pada orientasi kekuasaan dan negara. Pada saat itu administrasi negara dijadikan sebagai alat untuk menegakkan kekuasaan negara bukan kekuasaan rakyat. Namun seiring perkembangan ilmu pengetahuan, *public administration* lebih dipahami sebagai proses pemerintahan yang orientasi nya diarahkan pada kepentingan rakyat. Di Indonesia, perubahan arti *public administration*, dari administrasi negara menjadi administrasi publik awalnya berkembang di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1990-an yang kemudian diikuti oleh banyak perguruan tinggi lain (Thoha, 2015:66-68).

Di beberapa literatur, masih menyebut istilah *public administration* sebagai administrasi negera, sebagaimana yang dikemukakan Indradi (2010:113) administrasi publik adalah terjemahan dari bahasa Inggris *public administration* yang sering juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi negara atau administrasi pemerintahan. Menurut Waldo dalam Syafri (2012:21) *public administration is the organization and management of man and materials to achieve the purposes of government* (administrasi publik adalah organisasi dan manajemen manusia dan material (peralatannya) untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah). Menurut Simon

dalam Indradi (2010:117) administrasi publik yaitu kegiatan dari sekelompok manusia dalam mengadakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan, Siagian dalam Syafri (2012:25) menyatakan bahwa administrasi publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan. Dengan demikian, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah kegiatan atau usaha menggerakkan manusia dan alat dengan kebijakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

#### 2. Hubungan Administrasi Publik Dengan Administrasi Pembangunan

Seiring perkembangan zaman, studi tentang administrasi publik juga semakin berkembang hingga munculah aliran pemikiran asministrasi negara baru yang mendasarkan perhatiannya pada masalah-masalah sosial masyarakat. Namun perkembangan administrasi negara (publik) mengalami kesulitan ketika diterapkan di negara berkembang dan masih belum bisa menjawab kebutuhankebutuhan kompleks yang dialami negara berkembang. Hal inilah yang kemudian membuat Bintoro Tjokroamidjojo mengidentifikasi 4 (empat) kecenderungan administrasi publik yang terjadi setelah diterapkannya teori-teori modern dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pambangunan. Kecenderungan tersebut yaitu pemikiran pembaruan administrasi negara (administrative reform), konsep pembinaan institusi (institution building concept), alur pemikiran studi kebijaksanaan (policy studies dan policy analysis), alur pemikiran studi implementasi (implementation studies atau policy implementation) (Ali, 2015:129).

Permasalahan yang dihadapi administrasi publik ialah masalah "pembangunan bangsa" yang merupakan pembangunan hidup dan kehidupan suatu bangsa, baik secara indivdu maupun seluruh masyarakat (Syafri, 2012:113). Alur pemikiran studi implementasi muncul berkaitan dengan banyaknya faktor yang sangat memengaruhi pelaksanaan pembangunan, terutama di daerah pedesaan yang memiliki banyak nilai yang dapat menghambat maupun mempercepat suatu pembangunan (Ali, 2015:131). Hal inilah yang kemudian membuat administrasi publik sangat erat kaitannya dengan pembangunan, sehingga perlu adanya suatu usaha pengadministrasian yang baik terhadap pembangunan.

#### **B.** Administrasi Pembangunan

#### 1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan salah satu cabang ilmu administrasi yang sangat mendukung pelaksanaan administrasi negara terutama berkaitan dengan masalah-masalah pembangunan. Administrasi pembangunan sendiri merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pembangunan sesuai dengan tujuan dan cita-cita suatu negara. Menurut Siagian (2014: 5) Administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir. Menurut Riggs (2000:75) istilah administrasi pembangunan menunjuk pada berbagai usaha yang

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa adminstrasi pembangunan adalah suatu usaha pengorganisasian dalam mencapai pembangunan yang telah direncakan dan dilaksanakan oleh suatu negara menuju kearah yang lebih baik di berbagai aspek kehidupan. Pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggungjawab bersama masyarakat dalam suatu negara. Sehingga semua warga negara baik perempuan maupun laki-laki sama-sama harus ikut serta dalam mendukung pembangunan bangsa.

Upaya pembangunan seringkali berkaitan dengan pemberdayaan terhadap masyarakat. Konsep pambangunan berpusat pada masyarakat memandang inisiatif dan kreatifitas masyarakat sebagai sumber daya yang utama dimana kesejahteraan material dan spiritual masyarakat tersebut merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan (Korten dalam Theresia *et.al*, 2015:98). Pembangunan berbasis pemberdayaan di dalam masyarakat perlu dilakukan guna mewujudkan pembangunan yang partisipatif, dengan mengikutsertakan seluruh masyarakat tanpa memandang jenis kelamin tertentu.

#### 2. Pembangunan Masyarakat

Konsep pembangunan masyarakat diawali dengan pemikiran bahwa pembangunan haruslah menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan

BRAWIJAYA

pembangunan haruslah menguntungkan semua pihak. Pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang pada dasarnya adalah pemberantasan kemiskinan, realisasi pemerataan keadilan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Pembangunan masyarakat ini memprioritaskan kelompok-kelompok sosial di daerah termasuk perempuan/wanita, anak-anak, remaja, dan kelompok-kelompok marginal lainnya.

Konsep pambangunan berpusat pada masyarakat memandang inisiatif dan kreatifitas masyarakat sebagai sumber daya yang utama dimana kesejahteraan material dan spiritual masyarakat tersebut merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan (Korten dalam Theresia et.al, 2015:98). Dalam proses pembangunan masyarakat, sumber daya manusia tidak hanya dilihat peranannya dari aspek ekonomi semata, namun lebih luas lagi juga dari sisi non ekonominya. Masyarakat tidak hanya sebagai objek, namun juga sebagai subjek dalam pembangunan dimana kontribusinya sangat mempengaruhi proses perubahan menuju kearah kehidupan yang sejahtera baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat secara luas. Soetomo (2012:193) mengemukakan bahwa dalam pendekatan pembangunan masyarakat, proses perubahan yang terjadi sejauh mungkin bersandar pada kemampuan, prakarsa dan partisipasi masyarakat termasuk unsur manusia yang ada di dalamnya.

#### 3. Pembangunan Berbasis Pemberdayaan

Theresia *et.*al (2015:102) mengemukakan bahwa strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai suatu

Dalam bukunya Pembangunan berbasis Masyarakat, Theresia *et.al* (2015:103) mengemukakan bahwa dalam rangka pembangunan degan pendekatan pemberdayaan masyarakat, penyempurnaan mekanisme pembangunan perlu dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Pemberdayaan masyarakat tidak ada begitu saja, namun adanya karena perencanaan sebagai salah satu upaya dalam membangun masyarakat menjadi lebih baik lagi dan menuju kehidupan yang sejahtera.

#### C. Pemberdayaan Masyarakat

#### 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Theresia *et.al* (2015:94) pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu sendiri dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk

mengembangkannya. Dalam konsep pemberdayaan, manusia merupakan subjek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan menekankan pada proses pemberian kemampuan kepada masyarakat terutama masyarakat yang tertinggal agar menjadi berdaya, dan mendorong atau memotivasi individu agar memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan berbagai pilihan dalam hidupnya (Prijono dan Pranarka dalam Theresia *et.al*, 2015:93).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Theresia et.al, 2015:93). Sejalan dengan itu Sumodiningrat dalam Theresia et.al (2015) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Secara singkat, pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk memberi daya masyarakat yang belum berdaya, memampukan masyarakat yang belum mampu ataupun memandirikan masyarakat yang belum mandiri.

#### 2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan adalah mengembangkan partisipasi masyarakat miskin, yakni berkembangnya sikap, pengetahuan, dan keterampilan berusaha agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya. Oleh karena itu ada beberapa prinsip pemberdayaan yang tidak boleh dilupakan, yaitu pemberdayaan merupakan proses penguatan dan penyadaran diri, keyakinan bahwa masyarakat mempunyai kemampuan untuk berkembang, pendekatan

Menurut Cholisin dalam Trisnawati (2016:28) Tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan menjadikan masyarakat lebih mandiri terutama agar terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan atau ketidakberdayaan. Sedangkan menurut Suharto dalam Trisnawati (2016:28) tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindak oleh struktur sosial yang tidak adil). Hal ini selaras dengan pendapat Sulistyani dalam Trisnawati (2016:28) yang menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk mementuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengedalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

### 3. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat

Sebelum melakukan pemberdayaan, perlu ditentukan terlebih dahulu siapa yang akan diberdayakan. Pada awalnya upaya pemberdayaan ditujukan untuk masyarakat yang berada pada posisi atau kondisi yang lemah baik itu masyarakat secara keseluruhan maupun masyarakat pada wilayah tertentu yang sama sekali belum berdaya. Hal ini sejalan dengan pendapat Suharto dalam Trisnawati (2016:28) menyatakan bahwa:

"Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-smuber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka."

Pemberdayaan masyarakat harus tepat sasaran, terutama masyrakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya juga keterbatasan untuk mengelola sumber daya-sumber daya bagi dirinya dan lingkungannya. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat, dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menjangkau dan memenuhi dan mengelola kebutuhan dasarnya.

### 4. Aktor-Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, perlu adanya kerjasama beberapa aktor agar terlaksananya pemberdayaan masyarakat yang sinergis. Ada tiga aktor yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1. Peran Tiga Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat

| Aktor      | Peran dalam<br>pemberdayaan  | Bentuk output peran   | Fasilitasi   |
|------------|--|---|--|
| Pemerintah | Formulasi dan Penetapan Policy, Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi Mediasi | Kebijakan: politik, umum, khusus/Departemental/sect oral penganggaran, juknis dan juklak, penetapan indikator keberhasilan Pengaturan Hukum, penyelesaian sengketa                          | Dana,<br>jaminan,<br>alat,<br>teknologi,<br>network,<br>sistem<br>manajemen<br>informasi,<br>edukasi |
| Swasta     | Kontribusi pada<br>formulasi,<br>implementasi,<br>monitoring, dan<br>evaluasi  | Konsultasi & Rekomendasi<br>kebijakan, tindakan dan<br>langkah/policy action<br>implementasi, donator,<br>private investment<br>pemeliharaan  | Dana, alat,<br>teknologi,<br>tenaga ahli<br>dan sangat<br>terampil                                   |
| Masyarakat | Partisipasi dalam<br>formulasi,<br>implementasi,<br>monitoring dan<br>evaluasi | Saran, input kritik, rekomendasi, keberatan, dukungan dalam formulasi kebijakan. Policy action, dana swadaya Menjadi objek, partisipan, pelaku utama/subjek Menghimpn fungsi social control | Tenaga<br>terdidik,<br>tenaga<br>terlatih,<br>setengah<br>terdidik dan<br>setengah<br>terlatih       |

Sumber: Sulistyani (2017:87)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pemeirntah, swasta danmasyarakat memiliki perannya masing-masing dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat, peran pemerintah lebih banyak pada penentuan kebijakan secara umum. Selain itu pemerintah juga memiliki peran yang besar dalam pengambilan keputusan dan pendanaan. Sehingga bentuk fasilitasi yang diberikan pemerintah seringkali berupa dana, jaminan, alat, teknologi sistem manejemen informasi dan juga edukasi kepada masyarakat. Pemerintah juga memiliki peran ynag penting dalam monitoring dan

evaluasi suatu program/kegiatan. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk menjaga kualitas hasil dari pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya penetapan monitoring dan evaluasi yang jelas dan berkelanjutan dapat membuat program/kegiatan pemberdayaan masyarakat bisa tetap berjalan, sehingga penerapan program/kegiatan tidak hanya pada jangka waktu tertentu, tapi juga berkelanjutan.

Sementara itu, pada pemberdayaan masyarakat, pihak swasta memiliki peran lebih banyak pada implementasi bersama dengan masyarakat. dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, pihak swasta berperan dalam kontribusi dana melalui investasi swasta. Dalam monitoring dan evaluasi pihak swasata turut serta dalam pemeliharaan hasil-hasil yang diperoleh masayarakat melalui program pemberdayaan masyarakat. dan satu bentuk fasilitasi pihak swasta adalah dengan menerjunkan tenaga yang ahli dan terampil untuk membantu pelaksanaan pemberdayaan kepada masyarakat.

Secara umum, masyarakat berperan dalam formulasi bersama pemerintah, implementasi, serta monitoring dan evaluasi. Tinggi rendanya partisipasi masyarakat sesuai dengan seberapa besar tingkat keberdayaan masyarakat tersebut. Semakin berdaya, semakin tinggi pula partisipasinya. Semakin tinggi kemampuan pemahaman masyarakat, semakin masyarakt mampu memberikan kritik, saran, ide, dan masukan pada evel formulasi kebijakan, maupun pada saat monitoring dan evaluasi. Oleh sebab itu, masyarakat perlu diberikan fasilitas edukasi, memberikan ruang penyampaian

kritik dan saran, memberikan informasi yang transparan kepada masyaraat juga melibatkan unsur masyarakat dalam formuasi kebijakan.

### 5. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemberdayaan masyarakat, sebelum melakukan kegiatan atau program pemberdayaan perlu memperhatikan tahap-tahap dalam pemberdayaan masyarakat sebagai bekal dalam pelaksanaannya. Menurut Sulistiyani (2017:83) ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan agar terbuka wawasan danmemberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-kecakapan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Sementara itu, Hogan dalam Paramita (2016) mengemukakan tahaptahap pemberdayaan masyarakat dengan siklus yang dimulai dengan: mengadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan; mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan; mengidentifikasikan suatu masalah ataupun proyek; mengidentifikasikan basis daya (kekuatan) yang bermakna untuk melakukan perubahan; mengembangkan rencana aksi dan mengimplementasikannya. Melalui suatu siklus, kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak berhenti pada satu titik tertentu, karena kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan dengan usaha-usaha yang lebih baik.

### D. Pemberdayaan Perempuan

### 1. Pengertian Perempuan dan Gender

Menurut Remiswal (2013:35), istilah perempuan memiliki kesamaan arti dengan wanita yang muncul akibat pendikotomian manusia atas seks biologis yang berdampak pada pembagian perannya dari segi budaya. Menurut Mufidah (2010:3) gender diartikan sebagai suatu sifat yang melekat ada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi antara perempuan dan laki-laki yang bervariasi dan sangat bergantung pada faktor-faktor budaya, agama, sejarah dan ekonomi. Menurut Nugroho (2008:4) Gender adalah pembedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya setempat. Sedangkan menurut Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dalam Nugroho (2008:4) Gender adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya (laki-laki dan perempuan). Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa gender bukanlah perempuan, melainkan suatu sifat yang melekat pada laki-lai dan perempuan sebagai bentuk pembedaan atas peranperan sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat.

Di Indonesia kata gender masih diasumsikan oleh sebagian masyarakat sebagai sesuatu yang identik dengan perempuan. Menurut pandangan kaum feminis gender diartikan sebagai suatu gerakan yang memperjuangkan persamaan antara dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah

untuk menuntut keadilan dan pembebasan perempuan dari kungkungan agama, budaya, dan struktur kehidupan lainnya. Tuntutan itu berkembang hingga tingkatan kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki dalam segala hal (Mufidah, 2010:4-5).

### 2. Peran Perempuan dalam Pembangunan

Perempuan merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki potensi dan peran penting dalam pembangunan. Selama ini partisipasi perempuan dan gender dalam pembangunan dipahami dengan 3 pendekatan, yaitu:

### (a) Women in Development (WID)

Menurut Remiswal (2013:36) WID merupakan pendekatan yang mengintegrasikan erempuan dalam program pembangunan. WID merupakan pendekatan yang berangkat dari *ideology developmentalism* (Buhanudin dan Faturrahman dalam Remiswal, 2013:36). Pembangunan merupakan wujud pemikiran modern atau terjadinya modernisasi pemikiran tentang pembangunan di negara-negara dunia. Sehingga pembangunan merupakan proses kemajuan yang bergerak secara linier dan pasti. Hanya saja perempuan masih berada dalam posisi terbelakang, baik sebagai pelaku, objek maupun pemanfaat pembangunan. Penyebabnya adalah perempuan tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan, baik karena alasan klasik seperti peran subordinat perempuan maupun alasan-alasan yang berkaitan dengan sosial budaya.

### (b) Women And Development (WAD)

WAD merupakan tindak lanjut dari pendekatan sebelumnya, yaitu WID. Dalam pendekatan WAD ini, laki-laki dan perempuan memiliki

kedudukan, kesempatan dan peran yang sejajar. Sedangkan menurut Dharma dalam Remiswal (2013:37) pendekatan WAD menekankan pada hubungan antara perempuan dan proses pembangunan. WAD dianggap lebih kritis terkait dengan posisi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Namun hal ini kendala nya adalah terbentur pada hubungan patriakhi yang terjadi dalam corak produksi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan WAD harus ditunjang oleh struktur politik yang lebih stabil dan merata pada skala nasional dan internasional. Sehingga dalam implementasinya WAD menitikberatkan pada pengembangan kegiatan peningkatan pendapatan tanpa memperhatikan unsur waktu yang digunakan oleh perempuan.

### (c) Gender And Development (GAD)

Pendekatan GAD lebih menekankan pada hubungan sosial dalam pembangunan. GAD memfokuskan gerakannya pada hubungan gender dalam kehidupan sosial. GAD berasumsi bahwa persoalan mendasar dalam pembangunan adalah adanya hubungan gender yang tidak adil. Menurut Darwin dalam Remiswal (2013:37) situasi inilah yang menghalangi pemerataan pembangunan dan partisipasi penuh perempuan. Menurut pendekatan GAD, kesetaraan gender harus diupayakan pada aspek yang substansial berikut: (1) pemberian akses yang sama dalam pendidikan aebagai upaya mendasar terjadinya peruabahan sosial dan transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan; (2) pengakuan terhadap hak-hak perempuan sebagai bagian integral dari hak-hak asasi manusia; (3) memberikan kemandirian ekonomi yang sama, termasuk akses terhadap dunia kerja, gaji yang sama, serta pendistribusian aset yang sama;

dan (4) pemberian akses yang sama pula di bidang politik dan posisi-posisi strategis dalam pengambilam keputusan.

Pendekatan GAD dipandang sebagai pendekatan yang strategis dalam kegiatan pembangunan, ynag kemudian diperkuat dengan *Gender Mainstream* (GM) atau disebut juga Pengarus Utamaan Gender (PUG). Pengarus Utamaan Gender ini bertujuan untuk menjadikan gender sebagai arus utama pembangunan, dimana sasarannya adalah kebijakan (negara), aksi (masyarakat), serta intuisi (negara dan masyarakat). Oleh karena itu PUG merupakan proses reorganisasi, pengembangan dan evaluasi kebijakan sehingga kesetaraan gender sapat diintegrasikan pada kebijaakan-kebijakan di semua tingkatan oleh para pengambil keputusan.

### (d) Women, Culture and Development (WCD)

Selain 3 (tiga) pendekatan diatas, ada satu lagi pendekatan tentang perempuan yaitu *Women, Culture And Development* (WCD). Pendekatan ini bertujuan untuk memungkinkan untuk dipelajarinya aspek suborDinasi perempuan dan penolakan terhadap suborDinasi di dunia ketiga. Selain itu juga untuk memastikan bahwa aspek budata kehidupan perempuan dianggap serius ketika menganalisis posisi perempuan. Perempuan, budaya dan pembangnuan berada di persimpangan tiga wilayah paling mutakhir di dalam akademi, yaitu studi feminis, studi budaya dan studi dunia ketiga, sebagaimana artikel yang ditulis Kum-Kum Bhavnani Tentang *Women, Culture and Development*, yang menyatakan bahwa "...women, culture and development is located at the

intersection of three cutting edge areas within the academy: feminist studies, cultural studies and third world studies."

Berdasarkan studi feminis yang dikemukakan oleh Kum-Kum Bhavnani,

"Kedua kebijakan dan kerja analitik / kritis itu miskin jika perhatian yang memadai tidak diberikan pada perempuan. Artinya, tak terlihatnya wanita dalam kebanyakan tulisan tentang perkembangan global dan internasional berarti bahwa tenaga kerja, budaya dan sejarah wanita jarang diperhitungkan, atau ketika diperhitungkan, wanita paling sering dianggap kurang memiliki agen."

Bhavnani juga mengemukakan bahwa selama ini perempuan hanya dianggap sebagai korban dalam masyarakat yang kejam dan ketidakadilan.

Studi budaya mengarahkan perhatian pada pentingnya menganailis budaya dalam konteks perempuan, baik secara lokal maupun global. Budaya dapat dikonseptualisasikan tidak hanya hanya sebagai suatu kebiasaan, adat istiadat masyarakat tertentu, namun lebih mengacu pada sturktur perasaan. Artinya budaya dapat dianalisis dengan baik jika dipahami sebagai suatu pengalaman hidup seseorang dalam suatu masyarakat. Namun, pendekatan khusus untuk studi budaya ini jarang digunakan unuk memberikan wawasan tentang aspek-aspek tertentu dari masyarakat di dunia ketiga. Mengintegrasikan pemerinksaan budaya dengan jenis kelamin sebagai sumber informasi atau wahana perubahan merupakan suatu hal yang langka dalam studi dunia ketiga maupun studi pembangunan.

(http://www.global.ucsb.edu/undergrad/programs/wcd)

### 3. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Menurut Hanindito dalam Listiyaningsih (2015:28), pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan perempuan dalam memperoleh akses dan kontrol terhadap semua sumber daya dalam seluruh aspek kehidupan. Sedangkan menurut Harkristuti dalam Listiyaningsih (2008:28-29) pemberdayaan perempuan sebagai langkah tindak yang efektif untuk memerangi kemiskinan, kelaparan dan penyakit, dan pencapaian pembangunan yang benarbenar berkelanjutan.

Konsep pemberdayaan dalam konteks kesetaraan gender, pada prinsipnya untuk membangun kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan diperlukan pemberdayaan bagi perempuan. Katjasungkana dalam Nugroho (2008) mengemukakan ada 4 (empat) indikator pemberdayaan, yaitu:

- (a) Akses, dalam arti kesaman hak dalam mengakses sumber dayasumber daya produktif di dalam lingkungan.
- (b) Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
- (c) Kontrol, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya sumber daya-sumber daya tersebut.
- (d) Manfaat, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara sama dan setara.

Berdasarkan indikator-indikator yang dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa dalam pemberdayaan perempuan memiliki kesetaraan dengan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol dan menikmati manfaat dari suatu pembangunan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan perlu dilaksanakan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan di dalam masyarakat.

Menurut Sumodiningrat dalam Nugroho (2008) menyatakan bahwa dalam pemberdayaan perlu adanya tiga langkah yang berkesinambungan, yaitu:

- (a) Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang hendak di berdayakan harus dipihaki daripada laki-laki.
- (b) Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat.
- (c) Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan haruslah dilaksanakan dengan langkah-langkah yang berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan agar upaya pemberdayaan perempuan dapat berjalan dengan sebagimana yang diharapkan yaitu mengikutsertakan perempuan dalam pembangunan secara partisipatif dan mandiri.

### 4. Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan

Sebagai salah satu bagian dari pembangunan, pemberdayaan perempuan pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan perempuan yang selama ini menjadi kaum marginal. Pemberdayaan perempuan harus dilaksanakan agar terwujudnya kesetaraan gender dan menghapus ketidakadilan gender di dalam masyarakat. Menurut Adisasmita (2011:182), pembangunan pemberdayaan perempuan memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu:

- (a) Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan perempuan melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
- (b) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan, dalam

rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

### 5. Program Pembangunan Pemberdayaan Perempuan

Program pemberdayaan perempuan merupakan salah satu program yang menjadi target dalam pembangunan, tidak hanya di Indonesia melainkan di berbagai negara lain, terutama bagi negara-negara yang menjadi bagian dari *United Nation*. Salah satu bentuk pelaksanaan strategi kebijakan pembangunan perempuan, ada beberapa program yang dapat mendukung pemberdayaan perempuan, yang antar lain adalah:

- (a) Program peningkatan kualitas hidup perempuan.
  - Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kedudukan perempuan sebagai individu yang merupakan sumberdaya dalam pembangunan, yang merupakan bagian dari keluarga yang merupakan dasar dari terbentuknya generasi sekarang dan yang akan datang. Selain itu perempuan juga sebagai agen perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan.
- (b) Program penegakan hukum dan hak asasi manusia bagi perempuan.

  Tujuan program ini adalah untuk mendukung terciptanya sistem hukum nasional yang tidak diskriminatif dan berkeadilan gender, dan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang merugikan bagi perempuan.
- (c) Program penguatan peran masyarakat sipil dan penguatan kelembagaan.

  Program ini bertujuan untuk memperkuat peran aktif masyarakat sipil, meningkatkan kapasitas dan kemampuan instansi dalam melakukan pengarusutamaan gender, termasuk meningkakan peran dan kemandirian lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan sehingga

terjalin hubungan yangbaik antara lembaga masyarakat dengan pemerintah (Adisasmita, 2011:183-184).

Sementara itu, menurut Nugroho (2008:164-166) Dalam Program pemberdayaan perempuan ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, antara lalin:

- (a) Penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari kampung hingga nasional. Kegiatan yang selama ini banyak dikenal di masyarakat misalnya Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kelompok pengajian, koperasi, dan yayasan sosial. Penguatan organisasi kelompok dilakukan guna meningkatkan kemampuan kelompok atau lembaga baik sebagai perencana, pelaksana maupun pengontrol.
- (b) Peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan, dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan karena mengingat selama ini masih kurangnya sosialisasi program pembangunan dan kurangnya pelibatan peran masyarakat.
- (c) Pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Pembangunan yang ada harus memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat termasuk kelompok perempuan. Keterlibatan perempuan bisa melalui program pembangunan fisik, ekonomi maupun penguatan sumber daya manusia. Dengan melibatkan perempuan secara aktif, diharapkan kebutuhan gender secara praktis dan strategis dapat terwujud.

- (d) Peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan agar dapat mempunyai posisi tawar yang setara serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan. Perempuan dengan sifat kepemimpinannya diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan kaum perempuan dalam proses pembangunan di daerahnya.
- (e) Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha dengan berbagai kemampuan yang menunjang seperti kemampuan produksi, manajemen usaha, akses kredit dan pemasaran (Nugroho, 2008:164-166).

Dari berbagai kegiatan dalam program pemberdayaan perempuan yang telah diungkapkan tersebut program pemberdayaan perempuan merupakan bagian pembangunan yang penting untuk dilakukan. Pelibatan perempuan dalam pembangunan dapat meningkatkan kemampuan dan mengembangkan potensi perempuan agar terus berkembang dan mengembangkan dirinya secara aktif baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring. Kesadaran akan perlunya pelibatan perempuan dalam pembangunan harus ditumbuh kembangkan di dalam masyarakat. Perencanaan program pemberdayaan perempuan secara terpadu melibatkan berbagai pihak dan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan menggali aspirasi perempuan sehingga perempuan lebih produktif di dalam masyarakat.

### E. Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)

### 1. Pengertian Program Terpadu P2WKSS

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah,

"Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah yang selanjutnya disingkat P2WKSS, adalah peningkatan peranan perempuan yang diselenggarakan melalui serangkaian program, dengan menggunakan pola pendekatan lintas sektor danlintas pelaku di daerah, yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas."

Peningkatan peranan wanita dilaksanakan, mengingat peranan wanita sebagai mitra sejajar pria perlu ditingkatkan agar mampu memberikan sumbangan yang besar dalam berbagai bidang pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan peranan wanita di daerah perlu dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan. Menurut Jahya dalam Listiyaningsih (2015:39), Program Peningkataan Peranan Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) adalah strategi pemberdayaan yaitu meningkatkan kemandirian dan kualitas kepribadiannya.

Berdasarkan difinisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa program P2WKSS adalah salah satu implementasi dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perenan perempuan/wanita dengan cara memberdayakan melalui kegiatan-kegiatan kemandirian yang diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Selain itu melalui program P2WKSS, diharapkan

perempuan semakin berpartisipasi dan mengembangkan potensinya dalam pembangunan masyarakat di daerah.

### 2. Tujuan dan Sasaran Program Terpadu P2WKSS

Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, ada 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan Umum P2WKSS adalah meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. Sedangkan tujuan khusus P2WKSS yaitu:

- 1. Meningkatkan status pendidikan perempuan;
- Meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap dan perilaku positif keluarga dan perempuan khususnya di berbagai bidang untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan keluarga.
- 3. Meningkatkan kualitas pembinan terhadap anak dan remaja;
- 4. Meningkatkan statuskesehatan dan kesejahteraan keluarga;
- 5. Meningkatkan kesadarab akan akan pelestarian lingkungan hidup;
- 6. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara;
- 7. Memberdayakan kaum lansia;
- 8. Meningkatkan perekonomian lokal.

Sasaran dari program P2WKSS ini adalah keluarga miskin di desa/kelurahan dengan perempuan sebagai penggerak utamanya. Program P2WKSS dilaksanakan guna mewujudkan pengembangan keluarga sehat dan sejahtera termasuk perlindungan kepada perempuan dan anak-anak yang dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian perempuan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah,

"keluarga sehat dan sejahtera adalah keluarga yang sehat jasmani dan rohani yang dibentuk berdsarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan."

Untuk menyatakan suatu keluarga sehat atau tidak, ada beberapa indikator yang digunakan, menurut Departemen Kesehata Republik Indonesia (2017), yaitu:

- 1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
- 2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
- 3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
- 4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif;
- 5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
- 6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
- 7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
- 8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
- 9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
- 10.Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- 11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih;
- 12.Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. (Sumber:

http://www.depkes.go.id/article/view/17070700004/program-indonesia-sehat-dengan-pendekatan-keluarga.html.)

Sementara itu, keluarga sejahtera dibagi menjadi 5, yaitu tahapan keuarga pra sejahtera; tahapan keluarga sejahtera I; tahapan keluarga sejahtera III; tahapan keluarga sejahtera III plus. Berikut

ini indikator tahapan keluarga sejahtera menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (2011), yaitu:

- 1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) adalah keluarga yang tidak memnuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar" (*basic needs*).
- 2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) inidikator tahapan KS I, tapi tidak memnuhi salh satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (psychological needs) keluarga.

### Indikator KS I adalah:

- 1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
- 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, kerja/sekolah, dan bepergian;
- 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik;
- 4) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan;
- 5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi;
- 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga sekolah.
- 3. Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II) adalah keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak dapat memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator KS III, atau indikator "kebutuhan pengembangan" (development needs).

### Indikator KS II adalah:

- 1) Pada umumnya nggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
- 2) Paling kurang sekali seminggu anggota keluarga makan daging/ikan/telur;
- 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun:

- 4) Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk setiap penghuni rumah;
- 5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing;
- 6) Ada seseorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan;
- 7) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin;
- 8) Pasangan usia subur dengan anak dua tau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.
- 4. Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III) adalah keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tapi tidak memenuhi 2 (dua) indikator KS III Plus atau indikator "aktualisasi diri" (*self esteem*).

### Indikator KS III adalah:

- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama;
- 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang;
- 3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi;
- 4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal;
- 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet.
- 5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus adalah keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan 6 (enam) indikator KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, dan 2 (dua) indikator KS III Plus.

### Indikator KS III Plus adalah:

- 1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial;
- 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

(sumber: http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx)

### 3. Tahapan Program Terpadu P2WKSS

Program Peningkatan Peranan menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) merupakan program pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan

kualitas kesejahteraan keluarga dan juga masyarakat. P2WKSS ini memiliki empat kelompok kerja dimulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan yang terkecil adalah desa/kelurahan. Pelaksanaan Program P2WKSS dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi di setiap daerah, mengingat daerah satu dengan daerah lainnya memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda.

Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, dilaksanakan melalui 3 (tiga) kelompok kegiatan, yaitu:

- a. Kelompok Kegiatan Dasar (KKD):
  - 1) Kegiatan percepatan pemberantasan buta aksara;
  - 2) Kegiatan penyuluhan/peningkatan kesehatan ibu dan anak;
  - 3) Kegiatan penyuluhan pertanian serta pemanfaatan pekarangan;
  - 4) Kegiatan penyuluhan dan pelayanan lanjut usia;
  - 5) Kegiatan penyuluhan kesetaraan dan keadilan gender;
  - 6) Kegiatan pemeliharaan kesehatan lingkungan dan fasilitas air bersih;
  - 7) Kegiatan penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana;
  - 8) Kegiatan penyuluhan hukum;
  - 9) Kegiatan pengkoperasian dan kewirausahaan;
  - 10) Kegiaan pemantapan wawasan kebangsaan:
  - 11) Kegiatan penyuluhan mental:
  - 12) Kegiatan penyuluhan hak kaum perempuan dan hak anak.
- b. Kelompok Kegiatan Lanjutan (KKL):

- 1) Sub Kelompok Kegiatan Pembinaan Lanjutan meliputi:
  - a) Kegiatan peningkatan pendapatan keluaga, antara lain usaha peningkatan pendapatan keluarga, koperasi dan usaha kelompok perempuan.
  - b) Pemantapan penyelenggaraan pelayanan terpadu KB, kesehatan dan posyandu;
  - c) Melembagakan dan membudayakan keluarga berkualitas dan mandiri;
  - d) Kegiatan lanjutan penyuluhan gerakan hidup bersih;
  - e) Pemantapan penyuluhan 10 program pokok PKK;
  - f) Kegiatan keterampilan teknologi agribisnis.
- 2) Sub Kelompok Kegiatan Usaha perluasan Kesempatan Kerja dan berusaha bagi perempuan untuk meningkatkan penghasilan bagi diri sendiri dan keluarganya, antara lain dengan industry kerajinan rumah tangga, makanan kecil, budaya usaha-usaha kecil, tanaman obat-obatan pekarangan.
- 3) Sub Kelompok Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Perempuan dalam lingkup pembinaan dan remaja, termasuk Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL).
- c. Kelompok Kegiatan Pendukung (KKP):
  - Pemantapan forum koordinasi dan konsultasi yang telah ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
  - 2) Kursus atau pelatihan P2WKSS Desa/Kelurahan;

- 3) Penyuluhan keluarga bahagia sejahtera, Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4), pendalaman agama, dan status dan peran perempuan dalam mewujudkan keluarga sakinah;
- 4) Kegiatan penyuluhan dan pengembangan kesadaran hukum bagi perempuan;
- 5) Penyuluhan gender pada keluarga atau kelompok-kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat;
- 6) Kegiatan peningkatan kesadaran lingkungan bagi keluarga dan perempuan;
- 7) Penyuluhan tentang perlindungan perempuan & anak.

### BAB III

### METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mempelajari masalah-masalah dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat, dan juga situasi-situasi tertentu termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap dan proses-proses yang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena tertentu (Nazir dalam Trisnawati, 2016:45). Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan memahami fenomena apa yang dialami oleh peneliti baik perilaku, persepsi, motivasi, maupun tindakan secara holistik dengan cara deskripsif (berbentuk kata-kata dan bahasa) pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2014:6).

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menggambar fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan terkait Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), di Desa Purwodadi, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini selain untuk untuk menganalisis Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Terpadu P2WKSS juga untuk menganalisis apa

saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor pengahambat Pemberdayaan Perempuan melaui program terpadu P2WKSS tersebut.

### **B.** Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah penelitian. Fokus penelitian dimaksudkan agar penelitian lebih rinci, terarah dan fokus pada apa yang ingin diteliti, sehingga tidak menyimpang dan keluar dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Fokus penelitian merupakan pokok permasalahan yang telah dipilih oleh peneliti sehingga dalam penelitian mendapatkan gambaran-gambaran umum secara keseluruhan baik mengenai subjek maupun situasi yang diteliti. Fokus penelitian menjadi sangat penting dalam suatu penelitian karena dengan adanya fokus, memberikan kemudahan bagi peneliti dalam menentukan suatu keputusan terkait data mana saja yang diperlukan maupun tidak diperlukan dalam penulisan ini.

Dengan adanya Fokus penelitian ini, memberikan batasan-batasan dalam studi penelitian sehingga objek yang diteliti tidak menyimpang ataupun melebar terlalu luas sehingga peneliti lebih mudah dalam mengumpulkan dan mengolah data yang akan dianalisa kemudian. Menurut Sugiyono (2013:209), Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai peneliti, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Pemberdayaan Perempuan melalui Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Purwodadi menyangkut tentang:
- (a) Aktor-aktor yang terlibat dalam pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS.
- (b) Tahap-tahap pemberdayaan perempuan melalui program terpadu
  P2WKSS
- (c) Hasil pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS
- Faktor pendukung dan faktor Penghambat Pemberdayaan Perempuan melalui Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Purwodadi:
  - (a) Faktor Pendukung
    - 1) Masyarakat;
    - Banyaknya kegiatan perempuan yang sudah ada sebelum program terpadu P2WKSS;
    - 3) Dasar Hukum.
  - (b) Faktor Penghambat
    - 1) Masyarakat;
    - 2) Kurangnya monitoring dan evaluasi;
    - 3) Beberapa kegiatan vakum;
    - 4) Kendala waktu pembinaan dan kegiatan;
    - 5) Keterlambatan kedatangan saat pembinaan.

### C. Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana seorang peneliti melakukan penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Alasan peneliti mengambil lokasi ini adalah karena Desa Purwodadi Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan merupakan salah satu desa yang telah sukses melaksanakan program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) dimana dalam awal pelaksanaan program tersebut berjalan cukup baik di tahun 2016. Namun, ada beberapa permasalahan yang timbul setelah selesainya perlombaan P2WKSS. Permasalahan tersebut antara lain adalah kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Purwodadi mengakibatkan kegiatan hanya berjalan begitu saja (yang penting berjalan), tanpa mengevaluasi apa saja yang kurang dan yang perlu diperbaiki pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Selain itu, ada beberapa kegiatan yang vakum, kendala waktu pembinaan dan kegiatan, beberapa masyarakat kurang antusias terhadap kegiatan dan keterlambatan kedatangan warga saat pembinaan.

Desa Purwodadi sebagai salah satu desa yang telah melaksanakan program terpadu P2WKSS dan menjadi perwakilan kabupaten Magetan di Provinsi Jawa Timur, perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan perempuan sebagai bentuk peningkatakan peranan wanita dan agar dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Magetan, maupun daerah lain di Provinsi Jawa timur. Itulah mengapa peneliti

tertarik untuk meneliti Pemberdayaan Perempuan melalui program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) yang dilaksanakan oleh Desa Purwodadi, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan.

Situs penelitian merupakan tempat atau lokasi yang sebenarnya dimana peneliti dapat menangkap objek yang akan diteliti sehingga keakuratan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang dapat diperoleh sesuai dengan permasalahan yang ada maka situs penelitian yang terkait dengan objek yang diteliti adalah:

- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
   Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten Magetan.
- 2. Desa Purwodadi, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan.

### D. Sumber dan Jenis Data

Menurut Sugiyono (2009:137) bila dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Dalam penelitian ini, sumber dan jenis data yang digunakan yaitu:

 Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui informasi secara langsung melalui observasi dan wawancara secara langsung pada instansi atau organisasi, maupun masyarkat yang diteliti sesuai dengan subtansi penelitian.
 Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPA) Kabupaten Magetan, Kepala Desa Purwodadi, sekretaris Desa purwodadi, pengurus Program P2WKSS Desa Purwodadi dan masyarakat (perempuan) Desa Purwodadi.

- 2. Sumber data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data baik melalui orang lain maupun melalui dokumen tertentu. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari:
  - a. Buku Laporan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Kecamatan
     Barat Kabupaten Magetan tahun 2016.
  - b. Buku Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.
  - c. Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Magetan Tahun 2017.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013:224). Teknik pengumpulan data penting untuk diperhatikan, karena tanpa mengetahui teknik untuk mengumpulkan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan dan dibutuhkan.

Apabila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya (Sugiyono, 2013:225). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

### 1. Observasi (pengamatan)

Nasution dalam Sugiyono (2013) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Melalui observasi peneliti dapat mengamati fenomena-fenomena dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengunjungi objek penelitian yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten Magetan dan Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.

### 2. *Interview* (Wawancara)

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013), Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang mampu memberikan informasi yang lebih jelas terkait data atau informasi tertentu karena secara langsung dapat melakukan tanya jawab tentang informasi apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah:

- (a) Ibu Endang Setyowati, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
   Perlindungan Anak (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
   Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   Kabupaten Magetan);
- (b) Ibu Suci Minarni, Kepala Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan;
- (c) Ibu Mulyatiningsih, Sekretaris Desa Purwodadi;
- (d) Ibu Muryani, Pengurus Program terpadu P2WKSS Desa Purwodadi sekaligus Kasie Pemerintahan Desa Purwodadi;
- (e) Ibu Diana Santi, Pengurus Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi;
- (f) Ibu Novi, Masyarakat Desa Purwodadi;
- (g) Ibu Yamini, Masyarakat Desa Purwodadi;
- (h) Ibu Yayuk, Masyarakat Desa Purwodadi;
- (i) Ibu Retno, Masyarakat Desa Purwodadi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013:240). Dalam penelitian ini peneliti mempelajari dan menyalin dokumen-dokumen, data-data, laporan-laporan yang berkaitan dengan program terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.

### F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif peneliti itu sendirilah yang menjadi instrumen atau alat dalam penelitian. Sebagai instrumen bagi penelitiannya, peneliti Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2013:222). Sebelum terjun langsung ke lapangan untuk mencari data, peneliti harus paham mengenai penelitian kualitatif dan juga harus memiliki wawasan terkait bidang yang akan ditelitinya serta memiliki kesiapan untuk melakukan penelitian.

Adapun yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah:

### 1. Peneliti sendiri.

Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian, memiliki peran penting bagi pengumpulan data. Peneliti menjadi alat bagi dirinya sendiri untuk melakukan penelitian harus memiliki kepekaan dalam beraksi di lingkungan penelitian dan memperkirakan apakah data yang diperoleh tersebut berguna bagi penelitiannya atau tidak. Oleh karenanya peneliti dituntut untuk mampu mengumpulkan data di berbagai situasi yang nantinya akan dianalisa apakah data tersebut sesuai atau tidak.

### 2. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara merupakan suatu daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan peneliti untuk pengumpulan data dan juga berfungsi sebagai pengarah dalam wawancara dengan informan (Paramita, 2016:53).

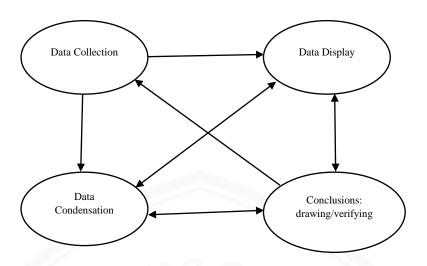
### 3. Perangkat penunjang lainnya

Digunakan untuk merekam atau mentatat data-data maupun informasi yang dibutuhkan oleh peneliti yang meliputi buku catatan, alat tulis, alat bantu perekam dan alat bantu foto.

### G. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013:246) analisis data merupakan proses yang dilakukan oleh peneliti pada saat sebelum penelitian di lapangan, saat penelitian di lapangan dan sesudah dilakukannya penelitian di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu). Analisis data merupakan proses yang sistematis dalam mencari dan mengumpulkan data baik itu melalui wawancara, data-data, catatan di lapangan maupun hasil kegiatan lain selama penelitian di lapangan. Analisis data dilakukan agar peneliti lebih mudah memahami temuan atau hasil penelitiannya sehingga nantinya dapat menjadi informasi bagi orang lain.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus. Aktivitas dalam analisis data ini menurut Miles, Huberman dan Saldana yaitu meliputi kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan.



Gambar 1. Komponen dalam analisis data model interaktif.

(Miles, Huberman, dan Saldana, 2014)

### 1. Condensation Data (Data Kondensasi)

Data kondensasi mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan/atau mengubah data yang muncul pada isi catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan-bahan empiris lainnya. Kondensasi data terjadi secara terus-menerus pada proyek yang berorientasi kualitatif. Bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan penyisipan data antisipatif terjadi ketika peneliti memutuskan (seringkali tanpa kesadaran penuh) yang merupakan kerangka konseptual. Sebagai hasil pengumpulan data, peristiwa lebih lanjut yang terjadi pada data kondensasi adalah menulis ringkasan, koding, mengembangkan tema, menghasilkan kategori, dan menulis memo analitik. Data kondensasi/proses pengubahan berlanjut setelah studi lapang selesai, sampai laporan akhir lengkap (Miles, Huberman dan Saldana, 2014).

### 2. *Display Data* (Penyajian Data)

Proses analisis data yang kedua adalah penyajian data. Secara umum, *display* (tampilan/sajiam) adalah kumpulan informasi terkompresi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan. Maksud dari penyajian data dalah untuk mempermudah peneliti melihat data penelitian baik sebagian maupun secara keseluruhan, agar terlihat lebih jelas. Data tersebut kemudian dipilah-pilah dikelompokkan dan disusun sesuai kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar sesuai dengan permasalahan yang ada, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara yang diperoleh pada waktu data kondensasi (Paramita, 2016:51).

3. Conclusions: Drawing/Verifying (Menggambar dan Memverifikasi Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis data. Dari pengumpulan data, pada analisis kualitatif menafsirkan arti beberapa hal dengan memperhatikan pola, penjelasan, sebab-akibat, arus dan proporsisi. Peneliti yang kompeten memegang kesimpulan dengan ringan, mempertahankan keterbukaan dan skeptisisme, tetapi kesimpulannya masih ada, samar pada awalnya, kemudian semakin eksplisit dan membumi. Kesimpulan akhir mungkin tidak akan muncul sampai pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus catatan lapang, pengkodean, penyimpanan, dan metode pengambilan yang digunakan, kecanggihan para peneliti, dan tenggat waktu yang diperlukan untuk dipenuhi (Miles, Huberman dan Saldana, 2014).

### **BAB IV**

### HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum

- 1. Gambaran Umum Kabupaten Magetan
  - a) Visi dan Misi

Visi Kabupaten Magetan:

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Magetan yang adil mandiri dan bermartabat.

Misi Kabupaten Magetan:

- Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;
- 2) Mewujudkan kepemerintahan yang baik, dan peningkatan SDM yang profesional, dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah;
- Menggairahkan perekonomian daerah, melalui berbagai program pengungkit, dan optimalisasi pengembangan SDM serta pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan;
- 4) Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- 5) Mewujudkan suasana aman dan damai, melalui penegakan, kepastian dan perlindungan hukum.

### b) Kondisi Geografis dan Jumlah Penduduk

Kabupaten Magetan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Magetan terletak di kaki gunung Lamu sebelah timur yang membentang dari selatan ke utara. Kabupaten Magetan merupakan Kabupaten Paling Barat di Jwa Timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jwa Tengah. Secara Geografis Magetan terletak di sekitar 7°38′ 30″ lintang selatan dan 111°20′ 30″ bujur timur. Kabupaten Magetan memiliki batas daerah sebagai berikut:

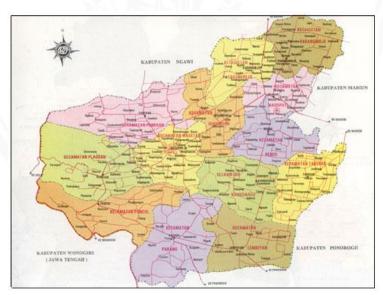
Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah)

Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan

Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)

Sebelah Timur : Kabupaten Madiun

Sebelah Utara : Kabupaten Ngawi



Gambar 2. Peta Kabupaten Magetan

Kabupaten Magetan merupakan Kabupaten terkecil kedua di Jawa Timur setelah Sidoarjo, dimana luas Kabupaten Magetan adalah hingga 1.660 m² diatas permukaan laut. Kecamatan Parang merupakan kecamatan terluas dengan luas 71,64 km² sedangkan kecamatan ynag wilayahnya paling kecil adalah Kecamatan Karangrejo dengan luas 15,15 km². Rara-rata luas wilayah kecamatan di Kabupaten Magetan adalah 38,27 km² dimana kecamatan yang terdekat dengan Ibu Kota Kabupaten adalah Kecamatan Magetan dengan jarak 2 km² sedangkan ynag paling jauh yaitu kecamatan Kartoharjo dengan jarak 26 km².

Berdasarkan data dari Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Magetan Tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Magetan pada semester I tahun 2017 adalah 685.182 jiwa terdiri dari 336.076 lakilaki dan 349.106 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kabupaten Magetan tergolong cukup padat karena dengan luas wiayah 688,85 Km² Kabupaten Magetan ditempati oleh 685,182 jiwa atau dengan kata lain berada pada kepadatan sebesar 995 jiwa/Km². Berikut ini merupakan data jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk Kabupaten Magetan tiap kecataman:

BRAWIJAYA

Tabel 2. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk

| No | Kecamatan    | Jumlah<br>Penduduk | Luaw<br>Wilayah<br>(Km²) | Kepadatan<br>Penduduk (Km²) |
|----|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1  | Poncol       | 31.073             | 51,31                    | 606                         |
| 2  | Parang       | 45.067             | 71,64                    | 629                         |
| 3  | Lembeyan     | 42.167             | 54,85                    | 769                         |
| 4  | Takeran      | 39.004             | 25,46                    | 1.532                       |
| 5  | Kawedanan    | 2.780              | 39,45                    | 1.084                       |
| 6  | Magetan      | 45.197             | 21,41                    | 2.111                       |
| 7  | Plaosan      | 51.784             | 66,09                    | 784                         |
| 8  | Panekan      | 57.358             | 64,23                    | 893                         |
| 9  | Sukomoro     | 32.641             | 33,05                    | 983                         |
| 10 | Bendo        | 41.946             | 42,90                    | 978                         |
| 11 | Maospati     | 46.508             | 25,26                    | 1.841                       |
| 12 | Barat        | 31.411             | 22,72                    | 1.383                       |
| 13 | Karangrejo   | 25.128             | 15,15                    | 1.659                       |
| 14 | Karas        | 36.978             | 35,29                    | 1.048                       |
| 15 | Kartoharjo   | 26.095             | 25,03                    | 1.043                       |
| 16 | Ngariboyo    | 39.858             | 39,13                    | 1.019                       |
| 17 | Nguntoronadi | 21.630             | 16,72                    | 1.294                       |
| 18 | Sidorejo     | 28.557             | 39,16                    | 729                         |
|    | Jumlah       | 685.182            | 688,85                   | 995                         |

Sumber: Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Magetan Tahun 2017

Berdasarkan tabel 2 tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan Magetan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat yaitu 2.111 jiwa/km². hal ini dikarenakan Kecamatan Magetan berada di pusat kota pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Magetan terbagi menjadi 18 Kecamatan, 235 Desa/Kelurahan, 1.047 RW dan 4.715 RT, dimana masing-masing Kecamatan memiliki karakteristik alam, sosial budaya dan ekonomi yang berbeda-beda. Hal ini karena Kabupaten Magetan berada pada dataran rendah dan ada yang berada di

pegunungan. Dari segi ekonomi daerah, Kabupaten Magetan memiliki potensi bidang pertanian, perdagangan, industri, jasa serta wisata.

- Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
   Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten
   Magetan
  - a) Visi dan Misi

Visi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu "terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera". Makna dari visi ini adalah diharapkan keluarga di Indonesia merencanakan keluarganya secara bijaksana sehingga mereka menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia di dunia dan akherat.

Sedangkan misi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dab Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

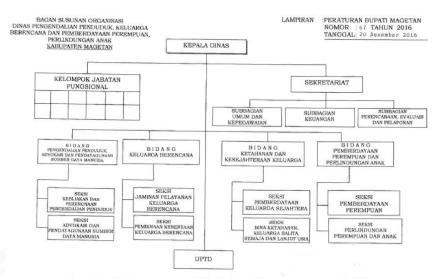
- Meningkatkan dukungan manajemen yang handal dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- 2) Mengatur pertumbuhan penduduk seimbang;
- 3) Meningkatkan advokasi dan peran serta untuk pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- 4) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 5) Meningkatkan pengelolaan potensi keluarga;

- 6) Meningkatkan pengarus utamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak.
- b) Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Secara umum, tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 67 Tahun 216, tentnag Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan. Untuk menyelenggarakan sebagaimana yang dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Pengumpulan data guna perumusan kebijakan, melakukan analisa dan menyusun program pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- Pembinaan dan pengembangan organisasi perempuan dan keluarga berencana;
- 3) Pembinaan peran serta perempuan dalam pembangunan.

Berikut ini merupakan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan:



Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan.

Sumber: Peraturan Bupati Magetan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata laksana kerja Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten magetan.

Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

#### 1) Kepala Dinas

Tugas: Membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi:

BRAWIJAY

- Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pelaksanaan evaluasi pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 2) Sekretaris

Tugas: Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

#### Fungsi:

- Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan Dinas;
- 2. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

- 3. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- 4. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- 5. Pengelolaan urusan keuangan;
- 6. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- 7. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- 8. Pengoordinasian penyusunan program dan fasilitas pelaksanaan kegiatan pada bidang; dan
- 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

# Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Tugas:

- 1. Melaksanakan urusan surat-menyurat;
- 2. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- 3. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- 4. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- 6. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- 8. Mengurus kesejahteraan pegawai;
- 9. Merencanakan pengelolaan arsip; dan
- 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

# Sub Bagian Kauangan

#### Tugas:

- Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyususn Rencana Kegiatan Anggaran;
- 2. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
- 3. Melaksanakan tata usaha keuangan;
- 4. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- 5. Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan Dinas;
- 6. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- 7. Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- 8. Menyusun laporan keuangan;
- 9. Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran: dan
- 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

#### Tugas:

- Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- 2. Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
- Menganalisa data penyusunan program kegiatan dan rencana kerja (renja);
- 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;

BRAWIJAY

- 5. Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- 6. Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, sistem informasi perencanaan daerah (SIPD), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- 7. Mengelola dokumen perjanjian kinerja;
- 8. Mengoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pendayagunaan Sumber
   Daya Manusia

Tugas:

- 1. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk,
- Melaksanakan kebijakan teknis dibidang advokasi, penyuluhan dan penggerakan serta pendayagunaan sumber daya manusia di bidang pengendalian penduduk keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Fungsi:

- 1. Penyusunan kebijakan pengendalian penduduk, advokasi dan pendayagunaan sumber daya manusia;
- Perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- 3. Pelaksanaan norma, strandar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
- Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di bidang pengendalian penduduk;
- Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang advokasi, penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan kelaurga berencana;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang advokasi, penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;

BRAWIJAYA

- Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana (PKB/PLKB);
- Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan tenaga IMP (PPKBD dan Sub PPKBD);
- 12. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas dibidang advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasin (KIE);
- 14. Pelaksanaan korrDinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- Pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk,
   advokasi dan pendayagunaan sumber daya manusia; dan
- 16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Seksi Kebijakan dan Perencanaan Pengendalian Penduduk Tugas:

- Mengumpulkan, menyusun, dan memadukan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;
- 2. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan;
- 3. Menyusun perencanaan, pemetaan, perkiraan pengendalian penduduk;

- 4. Menyusun rencana kegiatan demografi dan statistik;
- Melaksanakan pengelolaan pendataan keluarga dan keluarga miskin;
- 6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- 7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program pengendalian penduduk;
- 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan olrh kepala bidng sesuai dengan tugasnya.

Seksi Advokasi Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Tugas:

- Mengumpulkan dan menyusun metode penyuluhan, komunikasi.
   Informasi dan evaluasi;
- Melaksanakan advokasi, penyuluhan, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) sesuai kearifan budaya lokal;
- 3. Mengembangkan kegiatan lain terkait dengan metode dan prosedur kerja yang berkaitan dengan advokasi dan motivasi keluarga;
- Melaksanakan koordinasi dalam program advokasi, penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi;
- Melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana (PKB/PLKB);
- Melaksanakan pendayagunaan dan pemberdayaan tenaga PPKBD dan Sub PPKBD;

BRAWIJAY

- 7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program advokasi, penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### 4) Bidang Keluarga Berencana

Tugas: Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana.

# Fungsi:

- Penyusunan program jaminan, perumusan kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- Perencanaan dan pengendalian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, penanggulangan efek samping dan kegagalan alat kontrasepsi;
- Pelaksanaan upaya keterpaduan, sinkronisasi jaminan dan pelayanan keluarga berencana serta peningkatan partisipasi dan peran serta;
- 4. Menyiapkan bahan kajian hasil kegiatan pelayanan kelaurga berencana;
- Pemberdayaan dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan kesertaan ber keluarga berencana;
- 6. Penyusunan kebijakan, strategi, dan petunjuk teknis pelaksanaan penanggulangan masalah reproduksi;

BRAWIJAY

- 7. Pelaksanaan koordinasi dan kemitraan dalam pelaksanaan keluarga berencana dan penanggulangan masalah reproduksi;
- 8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang keluarga berencana dan penanggulangan masalah reproduksi;
- 9. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di bidang keluarga berencana dan penanggulangan maslah reproduksi; dan
- 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

### Tugas:

- Melaksanakan program jaminan, kebijaksanaan teknis dan strategi operasional pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- Perencanaan dan pengendalian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (alokon), penanggulangan efek samping dan kegagalan alat dan obat kontrasepsi;
- 3. Melaksanakan upaya keterpaduan, sinkronisasi jaminan pelayanan keluarga berencana;
- 4. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penjaminan program keluarga berencana;
- 5. Mengembangkan metode lain dalam akselerasi program jaminan pelayanan keluarga berencana;
- 6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program keluarga berencana;
- 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

# Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana

#### Tugas:

- Menyusun dan merumuskan kebijaksanaan teknis program, dan strategi operasional pembinaan kesertaa keluarga berencana;
- 2. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan perlindungan hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi;
- 3. Merumuskan kebijakan teknis dan strategi operasional pembinaan kesertaan keluarga berencana termasuk peningkatan peran serta;
- 4. Melaksanakan koordinasi dan integrase kegiatan pembinaan kesertaan keluarga berencana dan perlindungan masalah reproduksi:
- Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kesertaan keluarga berencana dan perlindungan masalah reproduksi; dan
- 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 5) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Tugas: Melaksanakan pengendalian pemberdayaan ekonomi keluarga dan pelayanan modal usaha, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat.

# Fungsi:

- Penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan dan ketahanan keluarga;
- Penyusunan rencana pengendalian dan operasional kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- Peningkatan dan pengintegrasian kegiatan upaya pembinaan ketahanan dan kesekjahteraan keluarga dengan instansi lalin dan lembaga/organisasi kemasyarakatan;
- Pengusulan penetapan keputusan tentang pemberian kredit modal kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);
- 5. Penyampaian laporan kegiatan pengendalian pemberdayaan ekonomi keluarga dan pelayanan modal usaha;
- Penyusunan pedoman pelaksanaan program ketahanan balita, remaja, dan lansia;
- 7. Pelaksanaan program ketahanan balita, remaja, dan lansia; dan
- 8. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh kepala Dinas.

# Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

#### Tugas:

 Menyusun rencana, pedoman teknis dan operasional pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga;

- 2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPKS);
- 3. Melaksanakan pemeriksaan kelayakan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 4. Mengusulkan ketetapan keputusan tentang pemberian kredit modal Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera usaha Usaha (UPPKS);
- 5. Mengintegrasikan kegiatan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan;
- 6. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan;
- Melaksanakan promosi pemberdayaan keluarga sejahtera;
- 8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); dan
- 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Bina, Ketahanan Kaluarga Balita, Remaja dan Lansia Tugas:

- Menyusun pedoman teknis dan petunjuk operasional pelaksanaan kegiatan [embinaan ketahanan keluarga balita, remaja, dan lansia, serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- Melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan ketahanan keluarga balita, remaja, dan lansia, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga, termasuk peningkatan peran serta;
- Mengintegrasikan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan;
- 4. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan integrase program Genre, kepramukaan, dan PIK R/M;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga balita, remaja, dan lansia, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; dan
- 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.
- 6) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tugas: Melaksanakan pengendalian program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengerusutamaan gender.

# Fungsi:

- Penyusunan produk hukum dan pedoman teknis program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- 2. Pengumpulan bahan dana tau data basis untuk penyusunan rencana operasional dalam rangka peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- 3. Pelaksanaan dan fasilitasi program/kegiatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- 4. Pengoordinasian program/kegiatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- 5. Pelaksanaan bimbingan kepada masyarakat /kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- 6. Pengintegrasian upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak;
- 8. Pembinaan dan koordinasi penyelesaian korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak;
- Pelaksanaan analisa dan penilaian program/kegiatan pengelolaan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;

BRAWIJAYA

- 10. Pelembagaan pengarusutamaan hak anak (PUHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- 11. Penyampaian laporan kegiatan program/kegiatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender; dan
- 12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

# Seksi Pemberdayaan Perempuan

#### Tugas:

- Mengumpulkan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan pemberdayaan perempuan;
- 2. Melaksanakan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang kualitas hidup perempuan, peran serta perempuan, dan penguatan ekonomi perempuan;
- 4. Melaksanakan koordinasi, sinkronsasi dan fasilitasi program Pengarus Utamaan Gender (PUG);
- 5. Melembagakan Pengarus Utamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah;
- 6. Melaksanakan pengembangan informasi dan edukasi tentang program pengarus utamaan gender (PUG);
- 7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan Pengarus Utamaan Gender (PUG);

BRAWIJAYA

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

#### Tugas:

- Merumuskan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan anak;
- 2. Menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi, dan kerjasama bidang perlindungan perempuan dan anak;
- Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data;
- Melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama para pihak/instansi lain;
- Menyiapkan bahan upaya perlindungan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, perempuan dan anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, dan perempuan dan anak yang diperdagangkan;
- Melaksanakan pengembangan informasi dan edukasi tentang program pengarus utamaan hak anak (puha);
- Menyiapkan bahan fasilitasi perlindungan perempua dan anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- 8. Melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi program perlindungan perempuan dan anak;
- 9. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian korban kekerasan pada perempuan dan anak;

BRAWIJAY/

- Mengelola dan meningkatka peran Pusat Layanan Terpadu
   Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- 11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlinsungan perempuan dan anak: dan
- 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 3. Gambaran Umum Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan
  - a) Visi dan Misi

Visi Desa Purwodadi:

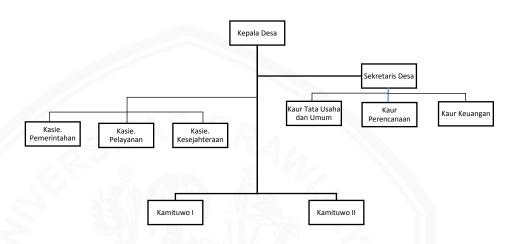
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Purwodadi yang semakin maju dan mandiri, dalam bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pendidikan, kemasyarakatan, dan kesehatan.

Misi Desa Purwodadi:

- Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa yang baik, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat baik administrasi maupun mental spiritual melalui koordinasi dengan perangkat desa, lembaga desam muspika dan lintas sektor.
- 3) Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik diantaranya pembangunan fisik dan nonfisik yang dibutuhkan melalui koordinasi dengan perangkat desa, lembaga desa, maupun tokoh masyarakat.
- 4) Menjalankan sistem pemerintahan desa yang terbuka dan bijaksana.
- 5) Meningakatkan dan mengembangkan perekonomian desa dengan melalui program-program nasional yang sudah ada.

BRAWIJAY/

- Menciptakan suasana desa yang kondusif, aman, guyub rukun, damai, dan saling menghormati.
- b) Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi



Gambar 4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan

Sumber: diolah peneliti 2018 berdasarkan data dari kantor desa Purwodadi

#### 1) Kepala Desa

- a. Bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Menyelenggarakan pemerintah desa seperti tata kerja pemerintahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan pengelolaan wilayah.
- c. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana-prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.

- d. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- e. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan, motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan taruna.
- f. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lemabaga lainnya.

# 2) Sekretaris Desa

- a. Bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi.
- c. Pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventaris, perjalanan Dinas dan pelayanan umum.
- d. Pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, administrasi keuangan, administrasi verifikasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

BRAWIJAY/

- e. Pelaksanaan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala desa.

# 3) Kepala Urusan

- a. Kepala urusan umum
  - Bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
  - 2. Pelaksanaan urusan ketahanan (tata naskah, administrasi suratmenyurat, arsip dan ekspedisi).
  - 3. Penataan administrasi perangkat desa.
  - 4. Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor.
  - 5. Penyiapan rapat.
  - 6. Pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan Dinas dan pelayanan umum.

#### b. Kepala urusan keuangan

- 1. Bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 2. Mengurusi administrasi keuangan.
- 3. Mengurusi administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.

BRAWIJAY

- 4. Memverifikasi administrasi keuangan.
- Mengadministrasikan penghasilan kepala desa, perangkat desa,
   BPD dan lembaga desa lainnya.

# c. Kepala urusan perencanaan

- 1. Bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 2. Menyususn rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 3. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan.
- 4. Monitoring dan evaluasi program.
- 5. Penyusunan laporan.

# 4) Kepala Seksi

- a. Kepala seksi pelayanan
  - Bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
  - Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
  - 3. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat.
  - 4. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat.
  - 5. Pelesatrian niali keagamaan.
  - 6. Meningkatkan kualitas dibidang ketenagakerjaan.
  - 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

# b. Kepala seksi pemerintahan

- Bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- 2. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan.
- 3. Menyusun rancangan regulasi desa.
- 4. Pembinaan masalah pertahanan.
- 5. Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- 6. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat.
- 7. Melaksanakan fungsi pendataan.
- 8. Mengelola profil desa.
- 9. Melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

### c. Kepala seksi kesejahteraan

- Bertugas membantu kepala desa sebaga pelaksana tugas operasional.
- 2. Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan.
- 3. Pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan.
- 4. Pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan.
- Melaksanakan sosialisasi dan motivasi di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup.
- 6. Pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

# BRAWIJAYA

# 5) Kamituwo

- a. Bertugas membantu kepala desa dalam tangan di wilayahnya.
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- c. Pengawasan pembangunan di wilayahnya.
- d. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- e. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepla desa.

#### c) Kondisi Geografis

Secara geografis, batas-batas Desa Purwodadi Kecamatan Barat adalah:

Sebelah Utara : Kelurahan Magge dan Desa Bogorejo Kec. Barat

Sebelah Barat : Desa Kauman dan Desa Patihan Kec. Karangrejo

Sebelah Selatan : Desa Pesu Kec. Maospati dan Desa Banjarejo

Kec.Barat

Sebelah Timur : Kelurahan Mangge Kec. Barat dan Desa Pesu

Kec. Maospati

Luas wilayah Desa Purwodadi adalah 122.255 Ha dengan ketinggian 450 mdpl dan curah hujan rata-rata 155 mm/tahun. Luas

wilayah Desa Purwodadi terbagi menjadi tanah pertanian seluas 55.610 Ha dan tanah permikiman seluas 37.750 Ha.Desa Purwodadi merupakan salah satu desa di Kecamatan Barat yang berjarak 22 km dengan jarak tempuh kurang lebih 20 menit perjalanan dari pusat ibu kota Kabupaten Magetan. Di Desa Purwodadi terdapat 3 Dusun, 2 RW dan 17 RT dengan rincian:

- 1. Dusun Purwodadi, terdiri dari 1 RW dan 8 RT
- 2. Dusun Termulus, teridir daru 2 RW dan 8 RT
- 3. Dusun Sudimoro, terdiri dari 2 RW dan 1 RT

Jumlah penduduk di Desa Purwodadi adalah 2.224 jiwa dimana penduduk laki-laki terdiri dari 1.097 jiwa dan penduduk perempuan terdiri dari 1.127 jiwa. Penduduk Desa Purwodadi sebagian besar bermata pencaharian sebagai burut tani. Seebihnya sebagai petani, pedagang dan pengrajin (wirausaha), pegawai swasta, perangkat desa dan pegawai negeri.

## B. Penyajian Data

- Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Purwodadi.
  - a. Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Pemberdayaan Perempuan melalui Program Terpadu P2WKSS

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat, dari yang tidak berdaya menjadi berdaya.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sudah pasti melibatkan pihak/aktor, begitupun dengan pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS. Demi terlaksananya pemberdayaan perempuan melalui Program Terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi, ada beberapa pihak/aktor yang dilibatkan. Pihak-pihak tersebut antara adalah sebagai berikut:

#### 1. Pemerintah

Program terpadu P2WKSS merupakan program yang dilaksanakan secara terpadu lintas sektor, maksudnya adalah pelaksana program ini tidak hanya desa dengan Dinas pemberdayaan perempuan, namun juga berbagai Dinas lain di Kabupaten Magetan. Berdasarkan Buku Laporan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2016, yang terlibat dalam program ini dari sisi pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Susunan Tim Pembina Kegiatan P2WKSS Kabupaten

Magetan Tahun 2016

| No | Jabatan dalam Tim | Jabatan dalam Dinas  |  |
|----|-------------------|--|--|
| 1. | Pelindung         | Bupati Magetan   |  |
| 2. | Pembina           | Wakil Bupati Magetan   |  |
| 3. | Ketua             | Sekretaris Daerah Kab. Magetan   |  |
|    | Wakil Ketua I     | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,<br>Keluarga Berencana, Pemberdayaan<br>Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.<br>Magetan |  |
|    | Wakil Ketua II    | Kepala BAPPEDA Kab. Magetan  |  |
|    | Wakil ketua III   | Ketua Tim Penggerak PKK Kab. magetan   |  |
|    | Wakil Ketua IV    | Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kab.<br>Magetan   |  |
| 4. | Sekretaris        | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan<br>Perlindungan Anak, Dinas PPKBPPPA Kab.<br>Magetan                              |  |

| No       | Jabatan dalam Tim                       | Jabatan dalam Dinas                          |  |
|----------|---|--|--|
| 5.       | Anggota                                 | 1. Kepala Dinas Pertanian Kab. Magetan       |  |
|          |   | 2. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan     |  |
|          |   | Kab. Magetan                                 |  |
|          |   | 3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Magetan      |  |
|          |   | 4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Magetan       |  |
|          |   | 5. Kepala Dinas Perindustrian dan            |  |
|          |   | Perdagangan Kab. Magetan                     |  |
|          |   | 6. Kepala Dinas Koperasu, Usaha Mikro,       |  |
|          |   | Kecil dan Menengah Kab. Magetan              |  |
|          |   | 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina         |  |
|          |   | Marga dan Cipta Karya Kab. Magetan           |  |
|          |   | 8. Kepala Dinas Kependudukan dan             |  |
|          |   | Pencatatan Sipil Kab. Magetan                |  |
|          |   | 9. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan     |  |
|          | G \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | Transmigrasi Kab. Magetan                    |  |
|          |   | 10. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi     |  |
|          |   | dan Informatika Kab. Magetan                 |  |
|          |   | 11. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat     |  |
|          | 3831717                                 | dan Pemerintahan Desa Kab. Magetan           |  |
|          |   | 12. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kab.       |  |
|          |   | Magetan                                      |  |
|          |   | 13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |  |
|          |   | Kab. Magetan                                 |  |
|          |   | 14. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab.       |  |
|          |   | Magetan                                      |  |
|          | 1341                                    | 15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.     |  |
|          |   | Magetan                                      |  |
|          |   | 16. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan     |  |
|          |   | Kab. Magetan                                 |  |
|          | V/2                                     | 17. Kepala Bagian Hukum, Sekretaris Daerah   |  |
|          | 7. 18                                   | Kab. Magetan                                 |  |
|          |   | 18. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan |  |
| <u> </u> |   | Rakyat. Sekretaris Daerah Kab. Magetan       |  |
|          |   | 19. Kepala Bagian Administrasi               |  |
|          |   | Perekonomian, Sekretaris Daerah Kab.         |  |
|          |   | Magetan                                      |  |
|          |   | 20. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, |  |
|          |   | Sekretaris Daerah Kab. Magetan               |  |
|          |   | 21. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan    |  |
|          |   | Protokol, Sekretaris Daerah Kab. Magetan     |  |
|          |   | 22. Kepala Subbag. Keuangan, Dinas           |  |
|          |   | PPKBPPPA Kab. Magetan                        |  |

Sumber: diolah penulis dari buku Laporan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan Tahun 2016

BRAWIJAYA

Tabel 4. Susunan Tim Pengendali Kegiatan P2WKSS Kecamatan Barat Tahun 2016

| No | Jabatan dalam Tim | Jabatan dalam Kedinasan                                  |  |
|----|-------------------|--|--|
| 1. | Ketua             | Camat Barat  |  |
| 2. | Wakil I           | Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan<br>Barat               |  |
|    | Wakil II          | Kasi Pemberdayaan Masyarakat san Desa                    |  |
|    | Wakil III         | Kepala UPTB KB-KS Kecamatan Barat                        |  |
| 3. | Sekretaris        | Staf UPTB KB-KS Kecamatan Barat                          |  |
| 4. | Anggota           | Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan<br>Desa                 |  |
|    | 110               | 2. Mantri Tani   |  |
|    | CITAD             | 3. Mantri Perkebunan                                     |  |
|    |                   | 4. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Barat                     |  |
|    |                   | 5. Kepala Puskesmas                                      |  |
|    |                   | 6. TP PKK Pokja II                                       |  |
|    |                   | 7. TP PKK Pokja I  |  |
|    |                   | 8. Kepala UPTD PU Wilayah IV Barat                       |  |
|    |                   | 9. Mantri Statistik                                      |  |
|    |                   | 10. Kasi Binsos  |  |
|    |                   | 11. Staf UPTB KB-KS 12. Koordinator PPL 13. Kasi Trantib |  |
|    |                   |  |  |
|    | AND STEE          |  |  |
|    |                   | 14. PPL Perkebunan                                       |  |
|    |                   | 15. Kepala KUA Kecamatan Barat                           |  |
|    |                   | 16. TP PKK Pokja III                                     |  |
|    | W Pat             | 17. Kasi Pemerintahan                                    |  |

Sumber: diolah penulis dari buku Laporan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan Tahun 2016

Berdasarkan tabel 3 dan tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa pemerintah merupakan salah satu aktor atau pihak yang terlibat dalam program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2016. Dari sisi pemerintah ada pemerintah Kabupaten Magetan sebagai Tim Pembina Kegiatan yang meliputi semua SKPD di Pemerintah Kabupaten Magetan dan Kecamatan Barat

sebagai Tim Pengelola Kecamatan. Karena P2WKSS merupakan program terpadu lintas sektor, sehingga pelaksanaannya melibatkan berbagai sektor/SKPD di Kabupaten Magetan.

Sejalan dengan data yang ada di Buku Laporan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2016, dari hasil penelitian di lapangan juga menunjukkan bahwa pemerintah merupakan aktor yang terlibat pada program ini, seperti yang dikatakan oleh Ibu Suci Minarni selaku Kepala Desa Purwodadi bahwa:

"Kalau swasta disini kok belum ya, belum. Dari Dinas Dinas magetan. Kita mengajukan proposal bantuan ini, nanti diproses dilaksanakan."

Selain itu, Ibu Muryani selaku Pengurus P2WKSS Desa Purwodadi juga memberikan penjelasan terkait aktor yang terlibat di P2WKSS, yaitu:

"Kalau pemerintah dari Dinas sosial ada. Iya semua (Dinas/SKPD Kabupaten Magetan), 12 (sektor) dari disperindag, dinkes terus kemenkumham, apa ya, pengadilan, jaksa."

Ibu Diana Santi yang juga sebagai pengurus mengatakan hal yang sama, terkait aktor dari sisi pemerintah, yaitu:

"Kalo sekarang yang dipakai kan data yang ada di lapangan. Kan gini tak kasih gambaran dulu. Apasih singkatan P2WKSS? Itu kan ada 12 sektor otomatis yang mbina dari 12 sektor itu kan instansi yang terkait."

Berdasarkan beberapa pernyataan dari hasil penelitian di lapangan terkait aktor yang terlibat dalam pemberdayaan perempuan

melalui P2WKSS di Desa Purwodadi Kecamatan Barat dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Magetan memiliki keterlibatan yang besar dalam menjaankan pelaksanaan program terpadu P2WKSS ini. Dinas-Dinas/instansi atau SKPD di Kabupaten Magetan dikelompokkan berdasarkan sektor yang sesuai dan berkaitan yang kemudian membina masyarakat khususnya perempuan di Desa Purwodadi dalam program terpadu P2WKSS tersebut.

#### 2. Swasta

Berdasarkan Buku Laporan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2016, keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak dapat terlepas dari adanya kebersamaan, dukungan dan motivasi dari pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Namun, berdasarkan penelitian di lapangan, diketahui bahwa belum ada pihak swasta yang terlibat dalam pelaksanaan program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi. Hal ini di kemukakan oleh Ibu Diana Santi selaku pengurus P2WKSS Desa Purwodadi yang menyatakan sebagai berikut:

"Pihak swasta sepertinya kok ndak ada. Nek setau saya lo, setau saya kok endak yo, ndak tau kalau dari desa. Nek yg saya ketahui ndak ada."

Pernyataan Ibu Diana Santi tersebut diperkuat dengan pernyataan Ibu Suci Minarni selaku Kepala Desa Purwodadi, yang menyatakan sebagai berikut:

BRAWIJAYA

"Kalau swasta disini kok belum ya, belum. Dari Dinas-Dinas Magetan. Kita mengajukan proposal bantuan ini, nanti diproses dilaksanakan."

Dari kedua pernyataan tersebut dapat di ketahui bahwa belum adanya kerjasama atau keterlibatan antara Desa Purwodadi Dengan pihak Swasta. Sehingga dalam pelaksanan program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi ini belum ada campur tangan antara pihak swasta dengan Desa baik dari segi perencanaa maupun implementasinya.

#### 3. Masyarakat

Dalam program terpadu P2WKSS ini masyarakat Desa Purwodadi tidak hanya menjadi objek pemberdayaan, melainkan juga sebagai subjek yang turut serta dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Berdasarkan Buku Laporan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2016, keterlibatan masyarakat dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 5. Susunan Tim Pengendali Kegiatan P2WKSS

Desa Purwodadi Kecamatan Barat Tahun 2016

| No | Jabatan<br>Dalam Tim | Nama              | Keterangan            |
|----|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. | Pembina              | Suci Minarni      | Kepala desa Purwodadi |
| 2. | Ketua                | Warsi, M.Pd       | Anggota               |
| 3. | Wakil Ketua          | Trusilo K.Y.N     | Anggota               |
| 4. | Sekretaris           | Diana Santi       | Anggota               |
| 5. | Bendahara            | Sri Hernani FH    | Anggota               |
| 6. | Kominfo              | Sheva Nurmanfaati | Anggota               |
| 7. | Kemenag              | Lilik Sunarsih    | Anggota               |
| 8. | Hukum                | Yodi Sunaryo      | Anggota               |
| 9. | PP                   | Murtatik          | Anggota               |

| No  | Jabatan     | Nama           | Keterangan |
|-----|-------------|----------------|------------|
|     | Dalam Tim   |                |            |
| 10. | Pendidikan  | Era Trianawati | Anggota    |
| 11. | Disperindag | Mei Wulan WM   | Anggota    |
| 12. | Pertanian   | Sukarti        | Anggota    |
| 13. | Kesehatan   | Kristiorini    | Anggota    |
| 14. | Sosial      | Yayuk Sulastri | Anggota    |
| 15. | Koperasi    | Niyem          | Anggota    |
| 16. | KBKS        | Muryani        | Anggota    |
| 17. | PKK         | Warsi, M.Pd    | Anggota    |

Sumber: diolah penulis dari buku Laporan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2016

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa masyarakat tidak hanya sebagai sasaran atau objek adanya program P2WKSS, namun juga sebagai subjek dari kegiatan itu sendiri. Pada tabel 4 tersebut tercanum nama-nama beberapa masyarakat desa Purwodadi terutama perempuan yang menjadi tim pengendali desa dan pengurus sebagai penggerak program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi. tidak hanya perempuan sebagai penggerak utamanya saja yang menjadi pengurus dan ikut serta, melainkan juga ada pihak laki-laki yang juga ikut serta didalamnya.

# a. Tahap-tahap Pemberdayaan Perempuan melalui Program Terpadu P2WKSS

Dalam suatu program pasti ada tahap-tahap kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama pelaksanaan program tersebut. Seperti halnya dengan Pemberdayaan Perempuan melalui Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi, ada beberapa tahap atau susunan kegiatan yang akan dilakukan, yaitu meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

BRAWIJAY

- 1. Kegiatan rapat koordinasi
- 2. Kegiatan orientasi P2WKSS
- 3. Penyusunan program/rencana kerja
  - a. Kelompok kegiatan dasar
  - b. Kelompok kegiatan lanjutan
  - c. Keompok kegiatan pendukung
- 4. Pendataan kader
- 5. Pendataan warga binaan
- 6. Mengadakan penataran/pelatihan kader
- 7. Mengadakan kursus keterampilan, penyuluhan maupun penataran bagi warga binaan
- 8. Pembinaan kepada kader dan kepada warga binaan
- 9. Pemberian bantuan kepada warga binaan
- 10. evaluasi

Sumber: Buku Laporan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2016

Selain berdasarkan Buku Laporan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2016 tersebut, juga ada hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa narasumber yang menjelaskan mengenai tahap-tahap pemberdayaan perempuan melalui Program Terpadu P2WKSS ini, sebagai berikut:

#### 1. Kegiatan rapat koordinasi

Rapat koordinasi merupakan kegiatan pertama pada tahap program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi. kegiatan ini dilakukan untuk mendiskusikan berbagi rencana yang akan dilakukan untuk melaksanakan Program terpadu P2WKSS ini. menurut Ibu Muryani selaku pengurus P2WKSS Desa Purwodadi, menyatakan bahwa:

"rapat koordinasi ki anu, dari dinas turun langsung ke bawah itu langsung. Jadi sebelum kegiatan ini dilalui semua. Rapatnya ya bolak-balik gitu mbak." Sedangkan Ibu Endang Setyowati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PPKBPPA Kabupaten Magetan memberikan penjelasan mengenai rapat koordinasi bahwa:

"kalau rapat koordinasi kan kita ada tim pengendali P2WKSS Kabupaten yang terdiri dari 12 (duabelas) sektor itu kita kumpulkan, disitu kita (PPKBPPPA) yang memimpin rapat untuk menentukan lokasi dari beberapa desa sesuai potensinya yang akhirnya ditempuh dan aoa yang nanti dikerjakan, itu rapat koordinasi.

Berdasarkan pernyataan Ibu Muryani dan Ibu Endang tersebut, dapat diketahui bahwa rapat koordinasi ini merupakan tahap awal dari kegiatan panjang P2WKSS dimana pada rapat ini ditentukan lokasi yang akan diberikan pembinaan dalam rangka pelaksanaan P2WKSS. Pada rapat koordinasi ini melibatkan tim pengendali yang terdiri dari 12 (duabelas) sektor dari Kabupaten yang kemudian ditindaklanjuti koordinasi dengan desa yang dijadikan lokasi pelaksanaan P2WKSS yaitu Desa Purwodadi pada tahun 2016. Karena pada tahap rapat koordinasi ini juga membahas terkait potensi desa yang nantinya akan dikembangkan.

Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan P2WKSS Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, 12 (duabelas) sektor dalam P2WKSS adalah sektor keagamaan, sektor hukum, sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor perindustrian dan perdagangan, sektor kominfo, sektor koperasi & UMKM, sektor sosial, sektor Pemberdayaan Perempuan dan

BRAWIJAY

Perlindungan Anak (PPPA), Sektor ketahanan pangan, sektor PKK, serta sektor Keluarga Berencana (KB).

# 2. Kegiatan orientasi P2WKSS

Kegiatan orientasi ini merupakan kegiatan kedua pada program terpadu P2WKSS setelah rapat koordinasi. Jika pada rapat koordinasi ditentukan desa untuk pelaksanaan P2WKSS dan juga melihat apa saja potensi yang dimiliki desa, maka pada tahap orientasi inilah tindak lanjut nya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Endang selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PPKBPPPA Kabupaten Magetan bahwa:

"kalau kegiatan orientasi P2WKSS, kita orientasi ke lapangan. Dari data tersebut kita cocokkan betul apa tidak disana. Jadi kita mencocokkan, oiya berarti disini itu banyak ketela, produknya ketela, berarti nanti saya disana mau bikin pelatihan ketela. Karena kita kalau mau produksi kan ndak boleh ngambil bahan dari luar, yang bahan bakunya terdapat di desa itu yang paling banyak apa jadi biar dimanfaatkan.

Berdasarkan penjelasan Ibu Endang tersebut dapat diketahui bahwa dalam orientasi P2WKSS yang dilakukan adalah mencocokkan data potensi desa Purwodadi dengan di lingkungan aslinya sama atau tidak. Sehingga dengan orientasi inilah nantinya diperoleh gambaran asli di desa dan dpat memberikan gambaran untuk menyusun program kerja.

# 3. Penyusunan program/rencana kerja

Penyusunan program/rencana kerja ini merupakan tahap dimana dilakukannya penyusunan kegiatan apa saja yang nantinya akan dilakukan di desa Purwodadi. Ibu Endang Setyowati selaku

"Terus dari dinas apa yang mau dilakukan, pertama bikin program kerja dulu. Kemarin kita kan Purwodadi, desa Purwodadi itu pertimbangannya kenapa disana, ternyata disana banyak keterampilan perempuannya, yang mau didongkrak apa, kalau banyak keterampilan perempuan berarti yang banyak diminati disitu adalah dari PP (Pemberdayaan Perempuan), koperasi terus sama indag (Industri dan perdagangan). Dan itu kita tanyakan lagi, selain itu apa, dari dinas pertanian yang mau di*suply* (apa) seperti itu. Penyusunan program rencana kerja ini ada kelompok kegiatan dasar, kelompok kegiatan lanjutan, kelompok kegiatan pendukung"

Berdasarkan penjelasan Ibu Endang tersebut dapat diketahui bahwa dalam kegiatan penyusunan program/rencana kerja ini disesuaikan dengan potensi di desa Purwodadi. Setelah diketahui potensi desa Purwodadi, maka disusunlah kegiatan atau pembinaan apa yang akan diberikan oleh masing-masing dinas atau sektor yang terkait. Dan dalam penyusunan ini disesuaikan berdasarkan kelompok kegiatan yang ada, yaitu Kelompok Kegiatan Dasar (KKD), Kelompok Kegiatan Lanjutan (KKL) dan Kelompok Kegiatan Pendukung (KKP).

Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan P2WKSS Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, ada 3 (tiga) kelompok kegiatan dalam program terpadu P2WKSS. Berikut in merupakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Purwodadi pada tahun 2016 berdasarkan yang ada di Buku Laporan Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS

BRAWIJAY

BRAWIJAY

Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2016, antara lain sebagai berikut:

- a) Kelompok Kegiatan Dasar (KKD):
  - 1) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
  - 2) Penyuluhan Pertanian serta pemanfaatan pekarangan, antara lain: sosialisai dan pembinaan teknik pemanfaatan pekarangan; pemberian sarana produksi; pembuatan demplot pemanfaatan pekarangan; pelatihan dan praktek lapangan pengelolaan hasil pertanian; pembinaa/penyuluhan dibidang peternakan, perikanan dan kesehatan hewan; pelatihan pengolahan hasil peternakan dan perikanan yaitu pembuatan telur asin, bakso ayam, bakso sapi, abon sapi, nugget ayam.
  - Kegiatan penyuluhan dan pelayanan lanjut usia antara lain;
     posyandu lansia dan POSBINDU; Senam lansia; dan Bina
     Keluarga Lansia (BKL).
  - 4) Penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana
  - 5) Kegiatan penyuluhan hukum
  - 6) Kegiatan perkoperasian dan kewirausahaan
  - 7) Pemeliharaan kesehatan lingkungan, melalui kegiatan PHBS
  - 8) Pemantauan wawasan kebangsaan, yaitu: penyuluhan
    Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), melalui
    kesenian, hadrah, karawitan.

- 9) Kegiatan penyuluhan mental, yaitu ceramah keagamaan, pengajian, yasinan
- 10) Pembinaan/penyuluhan tentang perlindungan perempuan dan anak

Selain 10 (sepuluh) kegiatan diatas, ada juga pelaksanaan kegiatan keaksaraan fungsional pada Kelompok Kegiatan Dasar (KKD) yang termasuk dalam kegiatan percepatan pemberantasan buta aksara. Kegiatan Kealsaraan fungsional ini merupakan salah satu kegiatan dalam sektor pendidikan. Keaksaraan Fungsional ini dilaksanakan di Desa Purwodadi tepatnya di Dusun Sudimoro RT 17, RW 03 dimana yang menjadi pengajarnya adalah Ibu RT yaitu Ibu Yamini. Terkiat pelaksanaan kegiatan keaksaraan fungsional ini Ibu Yamini mengatakan bahwa:

"KF 22 orang tapi khusus ini (dusun Sudimoro) 10 orang yang sana (dusun lain) tidak diaktifkan. Yang mengajar tidak mau ngikut warga binaannya. Soalnya kalau saya maunya belajar dimana, ya saya ngikut aja (sesuai keinginan warga binaan), nggak harus disini (dirumah Ibu Yamini). Untuk KF ini usia lebih dari 40 tahun sampai 65 tahun. Manfaatnya membantu masyarakat yang belum bisa jadi bisa, membantu masyarakat mengenal huruf."

Berdasarkan penjelasan ibu Yamini tersebut dapat diketahui bahwa telah dilakukan kegiatan keaksaraan fungsional, satu dari dua kelompok KF yang ada, dimana kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat untuk melek huruf.

b) Kelompok Kegiatan Lanjutan (KKL):

BRAWIJAYA

- Kegitan peningkatan pendapatan keluarga, melalui: UPPKS, Koperasi, KUB.
- Pemantapan penyelenggaraan pelayanan KB, Kesehatan dan Posyandu.
- 3) Kegiatan lanjutan PHBS.
- 4) Pemantapan penyuluhan 10 program pokok PKK.
- 5) Kelompok Kegiatan Usaha, meliputi industri kerajinan rumah tangga, makanan kecil, dan usaha kecil.
- 6) Kegiatan peningkatan kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan, meliputi pembinaan remaja, BKB, BKR, dan BKL.
- c) Kelompok Kegiatan Pendukung (KKP):
  - 1) Penyuluhan kesadaran hukum.
  - 2) Peningkatan kesadaran lingkungan.
  - 3) Penyuluhan perlindungan perempuan dan anak.

# 4. Pendataan kader

Dalam suatu program pemberdayaan masyarakat maupun pemberdayaan perempuan seperti P2WKSS ini, pendataan kader merupakan salah satu hal yang pasti dilakuan. Pada program terpadu P2WKSS, yang menjadi kader adalah kader PKK dan anggotanya meliputi semua anggota PKK atau dalam artian masyarakat perempuan di desa Purwodadi. Terkait pendataan kader, Ibu Endang Setyowati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Dinas PPKBPPPA Kabupaten Magetan menyatakan sebagai berikut:

"terus, pendataan kader. Gini, memang yang dilibatkan di dalam (P2WKSS) itu kan PKK semua, tapi yang menjadi kader P2WKSS adalah kader PKK juga, tapi pengurusnya. Ketua pokja III sebagai ketua sektor, dipas-pas kan. Jadi tidak terlepas dengan PKK. Kan kegiatannya sama. Perbedaannya kalau PKK itu ada 4 (empat) pokja, kalau P2WKSS ada 12 (duabelas) sektor, merupakan bagian dari yang 4 (empat) pokja itu.jadi semua ketua pokja I, II, III dijadikan ketua atau pengurus di sektor-sektor itu yang cocok."

Berdasarkan penjelasan Ibu Endang tersebut dapat diketahui bahwa yang dijadikan pengurus dan kader P2WKSS adalah kader PKK dimana yang menjadi ketua setiap sektor di P2WKSS adalah ketua pokja PKK atau pengurus PKK yang dirasa cocok.

#### 5. Pendataan warga binaan

Menurut Ibu Endang Setyowati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelrindungan Anak, Dinas PPKBPPPA Kabupaten Magetan, pendataan warga binaan merupakan tugas desa. Ia menyatakan bahwa:

"pendataan warga binaan ini tugasnya desa. Jadi nanti kalau sudah kita berikan sosialisasi dengan pengurus, seperti di kita sektor PPPA yang menjadi anggota disitu ketuanya pokja I pKK Desa karena keterkaitannya disitu kan kekerasan, kadarhum seperti itu, ia itu nanti dia dikasih tau poin-poinnya habis itu dia suruh buat kelompok. Nahibu-ibu ini dia otomatis mencari anggota yang bukan pengurus tetapi masyarakat biasa yang berarti itu ketua atau anggotanya pokja I itu dia mengumpulkan, menyampaikan informasi tadi programnya dari PPPA itu apa, satu kelompok dia sepuluh orang (anggotanya). Pendatannya tergantung dari desa."

Berdasarkan pernjelasan Ibu Endang tersebut dapat dipahami bahwa, dalam pendataan warga binaan ini diserahkan kepada pihak desa dan pengurus/kader P2WKSS yang sudah dibentuk sebelumnya. Pengurus/kader ini kemudian mengumpulkan 10 (sepuluh) orang dari masyarakat Desa Purwodadi untuk dijadikananggota di sektornya. Setelah terbentuk kelompok yang terdisi dari pengurus/kader dan anggota binaan, pengurus/kader ini kemudian memberikan informasi terkait kegiatan yang akan dilakukan pada sektor tersebut, misalnya sektor PPPA itu apa, dan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Sehingga sebelum ada pembinaan dari Dinas PPKBPPPA, anggota binaan ini sedikit tahu terlebih dahulu.

# 6. Mengadakan penataran/pelatihan kader

Penataran atau pelatihan kader yang dilakukan di tahap ini, bukanlah pelatihan yang sifatnya formal teori atau semacam sosialisai, tapi lebih pada pelatihan praktek secara langsung. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Endang Setyowati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PPKBPPPA Kabupaten Magetan, yaitu:

"nek pelatihan kader, bukan pelatihan secara formal ya, nek formal kana da teori, kita ngadakan, dinas juga gitu nagsih pelatihan jadi waktu ngasih pelatihan langsung terjun langsung gitu lo mbak, ndak teori."

Seperti halnya dengan Ibu Endang, Ibu Muryani selaku pengurus P2WKSS Desa Purwodadi juga mengatakan bahwa pelatihan kader ini dilakukan secara langsung (praktek). Beliau mengatakan bahwa: "misal e bidang e kesehatan itu dari dinkes itu yang dibina yo kader posyandu, ya hanya kader posyandu kemarin itu nek dinas kesehatan. Kalau dinas sosial itu posyandu lansianya dibina langsung. Termasuk mengadakan pelatihan-pelatihan kader ini ada masing-masing. Dari disperindag itu sebelum kita dikasih alatnya, kita dilatih membuat produknya itu, terus dari, ya hampir semua. Ada yang langsung praktek lapangan misalkan dari Depag (departemen agama) itu langusng kemarin itu di masjid sana prakteknya membungkus jenazah, dilatih itu."

Berdasarkan pernyataan Ibu Endang dan Ibu Muryani dapat diketahui bahwa penataran/pelatihan kader ini dilakukan kepada kader setiap sektor di P2WKSS. Hampir semua pelatihan dilakukan dengan praktek secara langsung.

# 7. Mengadakan kursus keterampilan, penyuluhan maupun penataran bagi warga binaan

Pengadaan keterampulan ini sama seperi halnya dengan pelatihan, dimana warga binaan diberikan pelatihan membuat keterampilan seperti yang diungkapkan Ibu Yamini selaku Masyarakat perempuan di Desa Purwodadi, bahwa:

"kayak anu keterampilan itu ya, keterampilan ikut, bikin bros pernah, bikin tutup pisaupernah tapi itu pelatihannya di Magetan. di desa pernah bikin tas dari bungkus kopi. Keterampilan untuk membantu ekonomi keluarga mbak, bikin kue bisa dijual untuk nambah *income* keluarga."

Berdasarkan pernyataan Ibu Yamini tersebut dapat diketahui bahwa sudah pernah dilakukan pelatihan keterampilan baik di Magetan (kota) maupun di Desa Purwodadi sendiri. Selain memberikan bekal keterampilan untuk ibu-ibu, juga bisa mendatangkan penghasilan untuk keluarga.

# 8. Pembinaan kepada kader dan kepada warga binaan

Seperti pada tahap pelatihan atau penataran, pembinaan ini dilakukan dengan pembinaan yang sifatnya lebih kepada praktek secara langsung. Perbedaannya jika pelatihan kader hanya untuk kader, pelatihan warga binaan hanya untuk warga binaan, sedangkan untuk pembinaan kader dan warga binaan ini dilakukan bersamaan dan bersama-sama, dimana pelaksanaannya dibina secara langsung oleh dinas terkait sesuai dengan sektor masing-masing. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Endang Setyowati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PPKBPPPA Kabupaten Magetan, bahwa:

"pembinaan kepada kader dan kepada warga binaan dari sektor langsung. Karena kenapa? Orang desa itu kan kadang-kadang bisanya habis magrib jadi kita nggak boleh egois kan. Pembinaan itu sesuai dengan kesepakatan, kalau pagi dia bekerja, ndak bisa karena dia jualan, ya kita ngalah kan untuk memajukan desa itu."

Berdasarkan pernyataan Ibu Endang tersebut dapat diketahui bahwa pembinaan kepada kader dan kepada warga binaan ini dilakukan dengan kesepakatan warga binaan dengan dinas, mengingat warga di Desa Purwodadi pada siang hari bekerja dan kebanyakan berjualan/berdagang, sehingga perlu menyesuaikan waktu pembinaan dengan warga. Karena hal ini dilakukan tidak lain untuk memajukan desa agar menjadi lebih baik dan berdaya.

# 9. Pemberian bantuan kepada warga binaan

Setelah berbagai kegiatan sosilaisasi/penyuluhan, penataran maupun pelatihan keterampilan dilakukan, ada tahap dimana pemerintah Kabupaten Magetan melalui dinas-sinas lintas sektor memberikan bantuan kepada warga binaan. Pemberian bantuan ini dilakukan untuk menunjang warga yang telah dibina agar menerapkan keterampilan yang diberikan terutama dalam bidang ekonomi untuk menghasilkan dan menambah pendapatan keluarga. Hal ini disampaikan oleh Ibu Yamini yang merupakan salah satu masyarakat Desa Purwodadi yang mendapatkan bantuan, beliau menyatakan bahwa:

"pernah panci sama bahan kue. Panci untuk mengukus kue itu lo. Itu kan alat (bantuan) untuk menunjang... apa itu, bikin kue. Kan meringankan beban kita seandainya ada yang rusak bisa untuk serep."

Seperti halnya Ibu Yamini, Ibu Novi yang juga merupakan masyarakat Desa Purwodadi juga menyatakan bahwa pernah ada pemberian bantuan pada Program P2WKSS, meskipun bukan beliau yang mendapatkan bantuan tersebut. Beliau mengatakan bahwa:

"sering (ada bantuan), yang masak dapat dandang (panci besar), dapat wajan (penggorengan) dari dinas. Dulu pas lomba dapat apa ya, ya kalau saya tetep buku (karena ikut kegiatannya BKB), ya kalau yang dagang dapet mixer, bibit lele itu."

Berdasarkan pernyataan Ibu Novi tersebut dapat dipahami bahwa pemberian bantuan ini diberikan kepada anggota sektor yang ikut di P2WKSS, sehingga bantuan pada warga binaan berbeda-beda, ada yang memperoleh panci (sektor perdagangan) ada juga yang memperoleh buku (sektor KB-KS).

Ibu Muryani selaku pengurus P2WKSS Desa Purwodadi menyatakan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan sektor masing-masing. Beliau menyatakan sebagai berikut:

"Aku mbak yang cari tapi aku gak bagian. La aku gak mikir sampe bantuan alatnya. Yg saya pikir saya membagi kader. Kader ini masuknya di disperindag kader ini masuknya di kesehatan. Yang untung ya disperindag karo PPKB. PPKB dapat bantuan bahan karo panci untuk membuat kue, kan minta e itu. Itu 20 orang. Sing disperindag itu 10. Nek dinas kesehatan kemarin itu kan batuan untuk Bumil sama balita PMT nya itu."

Ibu Muryani menambahkan, sebagai berikut:

"Heem laiya. Kayak bu yayuk itu dulunya ndak jualan terus ada praktek buat lapis, akhir e saiki jualan lapis ae setiap hari habis banyak, 1 tok itu sama bu retno itu, yg lain e kalau ada pesenan pesenan tok. Nek bu retno sama bu yayuk itu setiap hari bikin. Itu bantuan e 2 itu cuman panci tok malahan."

Berdasarkan pernyataan Ibu Muryani tersebut, dapat diketahui bahwa yang mendapatkan bantuan alat adalah yang termasuk di sektor disperindag dan PPKBPPPA. Bantuan yang diberikan berbeda-beda, sesuai dengan sektornya. Ibu Muryani mengatakan bahwa yang termasuk mendapatkan bantuan alat (panci) adalah Ibu Retno dan Ibu Yayuk.

Namun, pernyataan Ibu Muryani tersebut berbeda dengan yang diungkapkan Ibu Retno yang merupakan masyarakat Desa Purwodadi. Beliau menyatakan bahwa belum pernah menerima

BRAWIJAYA

bantuan alat apapun dari kegiatan yang pernah ada di Desa Purwodadi, beliau menyatakan sebagai berikut:

"kalau di desa saya sendiri tu nggak pernah, ya mungkin dikasih ke yang pengen terjun usaha kayak saya. Mungkin, tapi saya pribadi belum. Ibu saya malah pernah. Jadi diundang dikasih pelatihan kayak bikin apa gitu terus pulangnya dikasih kenang-kenangan panci, ibu saya. Kalau saya belum pernah kalau desa sini."

Berdasarkan pernyataan ibu Retno tersebut dapat dipahami bahwa pada Program P2WKSS di Desa Purwodadi sudah pernah mengadakan pelatihan dan juga pemberian bantuan kepada warga binaan yang salah satunya adalah panci. Namun bukan beliau yang mendapatkan bantuan tersebut, melainkan ibu dari Bu Retno yang mendapatkan.

Sama halnya dengan Ibu Retno, Ibu Yayuk pun yang merupakan masyarakat Desa Purwodadi juga menyatakan bahwa beliau juga belum pernah menerima bantuan alat (panci) dari program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi. Ibu Yayuk menyatakan sebagai sebagai berikut:

"Belum pernah dapet bantuan i. Saya pernah dapet undangan, tapi waktu itu saya ndak bisa, pas kemana gitu. Saya pergi kemana ya, ada memang, kayaknya dapet panci gini lo, saya pas ndak ada. Saya digantikan, Ibu Yamini yang dapat."

Berdasarkan pernyataan Ibu Yayuk tersebut dapat diketahui bahwa menurut beliau memang pernah mendapat undangan untuk pemberian bantuan alat (panci) namun, beliau mengaku belum pernah mendapatkan bantuan tersebut, karena saat itu beliau sedang tidak di

rumah dan tidak sedang ikut kegiatan P2WKSS, sehingga bantuan tersebut diberikan kepada Ibu Yamini.

Berdasarkan beberapa pernyataan yang disampaikan narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam program terpadu P2WKSS ini ada pemberian bantuan salah satunya bantuan alat dapur yang diberikan kepada masyarakat/warga binaan. Meskipun ada penerima bantuan yang kemudian digantikan orang lain, namun tahap ini telah dilalui selama pelaksanaan P2WKSS di desa Purwodadi.

#### 10. Evaluasi

Pada program terpadu P2WKSS, evaluasi yang dimaksud berbeda dengan evaluasi pada umumnya. Jika pada umumnya evaluasi adalah mengevaluasi apa yang kurang dari kegiatan sehingga dapat diperbaiki dan apa yang baik dari kegiatan sehingga bisa dipertahankan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya, berbeda dengan evaluasi P2WKSS. Yang dimaksud evaluasi pada P2WKSS adalah dimana program ini dibuat laporan menjadi sebuah buku yang kemudian dikirim ke Provinsi Jawa Timur untuk lomba P2WKSS tingkat Provinsi, yang akan berlanjut ke tingkat Nasional.

Ibu Endang Setyowati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PPKBPPPA Kabupaten Magetan, menyatakan bahwa:

> "evaluasi nya itu sesuai dengan indikator yang ada, jadi hasilnya kita pembinaan kita evaluasi dibuat buku itu trus

Berdasarkan pernyataan Ibu Endang tersebut dapat diketahui bahwa evaluasi yang dimaksud adalah evaluasi sesuai dengan indikator (penilaian) untuk lomba P2WKSS, dimana pelaksanaan evaluasi itu berbentu paparan yang dilakukan oleh kader P2WKSS Desa Purwodadi yang menyampaikan pelaksanaan program terpadu P2WKSS yang dinilai oleh 12 (duabelas) penilai dari masing-masing sektor di P2WKSS.

#### b. Hasil Pemberdayaan Perempuan melalui Program Terpadu P2WKSS

Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan P2WKSS Provinsi jawa Timur Tahun 2015, Program terpadu P2WKSS dilaksanakan dengan 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum tujuan program terpadu P2WKSS adalah mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. Dan secara khusus tujuan yang telah dicapai program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

# 1. Meningkatkan status pendidikan perempuan

Tabel 6. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan              | Jumlah |  |
|----|---------------------------------|--------|--|
| 1  | Pendidikan usia diatas 10 Tahun | 9      |  |
| 2  | Tidak tmat SD sederajat         | 86     |  |
| 3  | Tamat SD sederajat 397          |        |  |
| 4  | Tamat SLTP sederajat 40         |        |  |
| 5  | Tamat SLTA sederajat            | 598    |  |
| 6  | D1                              | 4      |  |
| 7  | D2                              | 0      |  |
| 8  | D3                              | 6      |  |
| 9  | S1, S2, S3 62                   |        |  |
|    | Jumlah 1570                     |        |  |

Sumber: Buku Laporan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2016.

Desa Purwodadi Kecamatan Barat terdapat 2.224 jiwa penduduk, dimana 1.097 jiwa penduduk laki-laki dan 1.127 jiwa penduduk perempuan. Dari jumlah penduduk tersebut, Berdasarkan buku Laporan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Kecmatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2016, hingga tahun 2016 penduduk yang memiliki pendidikan atau yang pernah mengikuti pendidikan baik hingga tamat maupun tidak, ada 1.570 jiwa. Hal ini berarti bahwa lebih dari setengah dari jumlah penduduk di Desa Purwodadi yang pernah sekolah atau setidaknya sudah melek huruf, meskipun masih banyak yang tidak bersekolah, salah satunya juga karena komposisi penduduk di Kabupaten Magetan termasuk Desa Purwodadi merupakan usia tua.

Untuk itu, pada program terpadu P2WKSS ini ada salah satu kegiatan pada Kelompok Kegiatan Dasar (KKD) yang berusaha untuk meningkatkan melek huruf masyarakat, yaitu Keaksaraan Fungsional

(KF), yang merupakan salah satu kegiatan di sektor Pendidikan. Di Desa Purwodadi KF ini telah dilaksanakan di Dusun Sudimoro, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Yamini bahwa:

"KF 22 orang tapi khusus ini (dusun Sudimoro) 10 orang yang sana (dusun lain) tidak diaktifkan. Karena yang mengajar (di Dusun lain) tidak mau ngikut warga binaannya. Soalnya kalau saya, maunya belajar dimana, ya saya ngikut aja (sesuai keinginan warga binaan), nggak harus disini (dirumah Ibu Yamini). Untuk KF ini usia lebih dari 40 tahun sampai 65 tahun. Manfaatnya membantu masyarakat yang belum bisa jadi bisa, membantu masyarakat mengenal huruf."

Berdasarkan pernyataan Ibu Yamini tersebut, dapat diketahui bahwa dengan adanya program terpadu P2WKSS ini dapat membantu masyarakat mengenal huruf dan dengan adanya kegiatan KF ini bisa meningkatkan melek huruf di Desa Purwodadi meskipun bukan melalui sekolah/pendidikan formal.

2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap dan perilaku positif keluarga dan perempuan khususnya di berbagai bidang untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan keluarga.

Program terpadu P2WKSS merupakan slah satu program pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap positif keluarga khususnya perempuan yang arah utamanya adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan keluarga. Capaian pada tujuan ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan perempuan di Desa Purwodadi, yaitu sebagai berikut:

# 1) Ibu Suci Minarni

"Manfaatnya ya kita ini untuk mendidik ibu-ibu rumah tangga itu lebih mandiri paling tidak. Kalau mereka sudah bisa mandiri kan paling tidak perekonomian mereka bisa bertambah, setidaknya tidak selalu ketergantungan suaminya gitu. Sehingga kesejahteraan rumah tanga nya bisa teratasi dari yg dia dapat dari usaha wiraswasta, pembuatan makanan nantinya kan dijual kan paling tidak dapat menambah disamping dari suaminya gitu kan. Kalau perubahannya ya kekompakan kalau saya yang merasakan itu, P2WKSS, kekompakan antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan adanya P2WKSS terus adanya kegiatan akhirnya seringkali kita mengadakan pertemuan akhirnya kesulitan apa yg dijalani saling mengisi jadi bisa lancar. Mungkin mengadakan praktek-praktek..."

Berdasarkan pernyataan ibu Suci tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya program terpadu P2WKSS ini dapat meningkatkan sikap dan perilaku positif bagi perempuan yaitu dengan lebih mandiri dan tidak tergantung pada laki-laki (suami). Selain itu, dengan adanya program P2WKSS ini, menjadikan hubungan yang semakin sinergis antara pemerintah dan masyarakat karena adanya kegiatan bersama yang sering diadakan. Dengan begitu antara pemerintah dengan masyarakat bisa saling bertukar pikiran/pengetahuan sehingga apabila ada kesulitan dapat dicari jalan keluar bersama-sama.

#### 2) Ibu Diana Santi

Menurut Ibu Diana santi ada banyak manfaat yang diperoleh dengan adanya program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi, baik itu meningkatkan pengetahuan, maupun keterampilan perempuan. Misalnya terkait industry, beliau menyatakan bahwa:

"Ya manfaatnya itu tadi to mbak, kan karena kita ada kayak pelatihan, kita mendapatkan penyuluhan, kita mendapatkan sosialisasi, caranya ngemas gini, cara nya gini, sehingga kan kalo yg punya industri rumah tangga itu ngerti yg bagus begini, berarti nek koyok penjualan ngemas pake jepret itu tidak boleh, itu kan mereka jadi paham, itu yg pertama yg industri."

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pada program terpadu P2WKSS ini ada sosialisasi dan pelatihan yang salah satunya terkait pengemasan produk, sehingga dengan pengetahuan tersebut, pedagang di Desa Purwodadi lebih paham mengenai produksi yang baik. Selain itu Ibu Diana juga menyatakan manfaat lain yang diperoleh dari pemberdayaan perempuan melalui P2WKSS adalah terkait Kelompok Informasi Masyarakat. Dengan adanya pelatihan Informasi & Teknologi dapat memberikan pengetahuan IT bagi masyarakat desa Purwodadi. beliau mengatakan sebagai berikut:

"Kemudian yg dari KIM, kan otomatis berhubungan dengan IT kan, berhubungan dengan web, nah akhirnya kan dari situ alhamdulillah kemarin juga webnya Purwodadi dapet juara 1 dari kabupaten termasuk salah satu pemuda kita di jatim juara berapa itu, pemuda pelopor itu. Ya alhamdulillah gitu loh. KIM nya kita juara 1 kabupaten yang tahun 2017 kemarin. Dengan KIM itu kan akhirnya anak-anak muda yang kasarannya lebih paham lagi gimana caranya bikin web, gimana caranya nulis, gimana caranya dia membuat berita, gimana caranya dia untuk mengembangkan desa, kan akhirnya ilmu itu yg didapet."

Selain meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat terutama perempuan dibidang industry dan IT, P2WKSS ini juga meningkatkan keterampilan masyarakat di bidang seni karawitan. Ibu Diana mengungkapkan sebagai berikut:

"Terus ibu-ibu karawitan sekarang malah jadi tanggapan kadang-kadang. Nah itukan juga dari P2WKSS awalnya gitu loh, jadi awalnya ngga ngerti caranya memainkan alat gamelan itu setelah P2WKSS itu ada pembinaan ada pelatihan malah sekarang kadang-kadang ada tanggapan neng nggone manten. Jadi itu salah satu keuntungan dari P2WKSS, keterampilan dinaikkan."

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Diana tersebut dapat diketahui bahwa ada banyak manfaat dari pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS ini. Dengan adanya P2WKSS dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat terutama perempuan terkait industri (pengemasan produk), teknologi dan informasi masyarakat (KIM), dan juga keterampilan seni karawitan yang kemudian tidak hanya untuk memberikan keterampilan tapi juga dapat mendatangkan penghasilan bagi kelompok karawitan karena diundang pada kegiatan-kegiatan hajatan.

#### 3) Ibu Novi

Tidak berbeda dengan Ibu Diana, menurut Ibu Novi, dengan adaya program terpadu P2WKSS ini juga dapat memberikan wawasan/pengetahuan bagi masyarakat terutama perempuan (ibu-ibu) salah satunya adalah pengetahuan mengenai tumbuh kembang anak. Beliau menyatakan sebagai berikut:

"Nambah wawasan mbak, nambah wawasan pengetahuan, seneng aja aku ikut ikut seperti itu. Kalau yang bagianku ya tetep untuk mengetahui tumbuh kembang anak mbak, yang bagian ku itu, kalau yang bagian lain kan macam macam seperti yang dagang ada, perikanan ada, campur lo mbak P2WKSS itu, remaja juga ada."

#### 4) Ibu Yamini

Sedangkan Ibu Yamini menyatakan bahwa dengan adanya program P2WKSS dapat meberikanbanyak manfaat misalnya pada kegiatan KF (Keaksaraan Fungsional) dapat membantu masyarakat yang belum bisa baca tulis, menjadi bisa, mengenalkan huruf. Ibu Yamini mengatakan sebagai berikut:

"Membantu masyarakat yg belum bisa jadi bisa. Membantu masyarakat untuk mengenal huruf, kan kalo di desa orang tua sering dititipi cucu, untuk ngajari-ngajari cucu. Keterampilan untuk membantu ekonomi keluarga mbak, bikin kue bisa dijual. Bisa (memberdayakan perempuan) soalnya kan disitu ada kegiatan keterampilan yg untuk menambah *income* keluarga. Otomatis kalau kita sakit kita bisa memakai uang kita sendiri untuk berobat, untuk mencegah. Itu kan alat (bantuan) untuk menunjang... apa itu, bikin kue. Kan meringankan beban kita seandainya ada yg rusak bisa untuk serep."

Berdasarkan pernyataan Ibu Yamini tersebut juga dapat diketahui bahwa dengan adanya program P2WKSS dan ada pelatihan meningkatkan keterampilan membuat kue. Ini bisa memberdayakan perempuan karena keterampilan ini juga bisa menambah pendapatan keluarga jika diterapkan untuk berjualan.

# 3. Meningkatkan kualitas pembinan terhadap anak dan remaja;

Program Terpadu P2WKSS merupakan salah satu upaya pemberdayaan perempuan, namun bukan berarti semua kegiatannya hanya ada perempuan. Salah satu Tujuan P2WKSS adalah meningkatkan kualitas pembinaan terhadap anak dan remaja. Ada banyak kegiatan yang dilakukan Remaja di Desa Purwodadi yang salah

satunya adalah Karang Taruna, Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). hal ini sebagaimana yang disampaiakn oleh Ibu Diana selaku Pengurus P2WKSS Desa Purwodadi, bahwa:

"Kadang-kadang kalo dari remaja biasanya dari kecamatan itu kan ada PIK-R (Pusat Infromasi dan Konseling Remaja) itu loh. Kalau BKR, la yg di karang taruna itu, PIK-R itu, kan BKR (Bina Keluarga Remaja) jadi secara tidak langsung itu masuk di PIK-R, itu kan kayak sekupnya karang taruna, meskipun nggak bilang BKR ada, tapi kan remaja nya kan masih jalan, kadang kadang voli itu tak lihat di kantor desa masih ada kok, malah karang taruna ada jamur ada di kantor desa belakang itu, punya karang taruna itu, itu berarti BKR to, kan remaja yang dibina."

Berdasarkan pernyataan Ibu Diana tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan remaja masih berlangsung, baik pembinaan maupun keolahragaan. Bahkan sekarang semakin produktif dan ada peningkatan karena menanam dan membudidayakan jamur. Hal ini menujukkan bahwa kegiatan remaja di desa tidak hanya sebatas pembinaan atau olahraga namun juga pembinaan produktivitas yang menghasilkan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Diana, Ibu Mulyatingsih selaku Sekretaris Desa pun juga mengatakan bahwa:

"Sampai saat ini karang taruna pun juga ada. Budidaya jamur itu segitu di belakang (kantor desa). Nek olahraga maju, sepak bola malah juara 2 (dua), Persemag magetan, purwodadi pialanya juga ada. Voli juara 3 (tiga) se-kecamatan. Niki maju mbak."

Berdasarkan pernyataan Ibu Mulyatiningsih tersebut dapat diketahui bahwa remaja yang tergabung di karang taruna masi haktif dan semakin Selain pernyataan dari narasumber tersebut, berdasarkan Buku Laporan Program Terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2016, diketahui bahwa RSUD Kabupaten Magetan bersama Badan Narkotika mengadakan diskusi mengenai bahaya narkoba termasuk remaja Desa Purwodadi ikut serta dalam kegiatan tersebut. Bahkan dengan adanya program terpadu P2WKSS yang berhubungan dengan sektor kesehatan dan hukum, pada Tahun 2016 terbentuk Tim Penggiat anti narkoba di Desa Purwodadi yang anggota nya terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda Desa Purwodadi. Kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan bahaya narkoba bagi remaja/pemuda danjuga masyarakat di Desa Purwodadi serta ada juga tes urine yang dilakukan.

Dengan adanya berbagai kegiatan ini, memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama remaja tentang bahaya narkoba. Peningkatan kualitas pembinaan ini dapat dikatakan meningkat karena pada tahun 2016 tidak ada kasus narkoba yang terjadi di Desa Purwodadi (Sumber: Buku Laporan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2016).

# BRAWIJAY

# 4. Meningkatkan status kesehatan dan kesejahteraan keluarga;

Mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga merupakan tujuan umum program terpadu P2WKSS. Ada banyak kegiatan yang dilakukan melaluai program terpadu P2WKSS untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga dalam masyarakat di Desa Purwodadi.

#### a) Kesehatan

Berdasarkan buku Laporan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2016, capaian Rumah Tangga Sehat (RTS) di Desa Purwodadi pada tahun 2015 sudah mencapai 54,4%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Rumah Tangga Sehat Desa Purwodadi

| No                   | Indikator  | Capaian (%) |
|----------------------|--|-------------|
| 1                    | Persalinan ditolong oleh NaKes                   | 100         |
| 2                    | ASI Eksklusif                                    | 75          |
| 3                    | Timbang balita setiap bulan                      | 100         |
| 4                    | Cuci tangan pakai sabun                          | 80,4        |
| 5                    | Air bersih                                       | 100         |
| 6                    | Jamban sehat                                     | 100         |
| 7                    | Pemberantasan sarang nyamuk (PSN)                | 96,4        |
| 8                    | Mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang        | 100         |
| 9                    | Melakukan aktivitas fisik/olahraga               | 99,6        |
| 10                   | Tidak ada anggota keluarga yang merokok di dalam | 54,4        |
|                      | rumah  |             |
| Rumah Tangga Sehat 5 |  |             |

Sumber: Buku Laporan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2016.

Data capaian RTS tersebut diketahui merupakan data capaian di tahun 2015 sebelum dilaksanakannya program terpadu P2WKSS.

pada pelaksanaan program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi tahun 2016, banyak kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Desa Purwodadi antara lain penyuluhan peningkatan kesehata ibu dan anak, penyuluhan pelayanan keluarga berencana, pemeliharaan kesehatan lingkungan melalui kegiatan PHBS, serta pemantaban penyelenggaraan pelayanan KB, Kesehatan dan Posyandu. Namun belum ada data terbaru mengenai capaian RTS tahun 2016 atau setelah dilaksanakannya program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi. Sehingga belum dapat diketahui apakah capaian TRS ini naik atau justru turun setelah adanya program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi.

Selain data capaian RTS tersebut, juga ada capaian program KB di Desa Purwodadi, sebagai berikut:

Tabel 8. Perkembnagan Program KB Desa Purwodadi

| No | Uraian  | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
|----|---------|------------|------------|
| 1  | IUD     | 63         | 41         |
| 2  | MOW     | 6          | 32         |
| 3  | MOP     | 2          | -          |
| 4  | Implant | 5          | 4          |
| 5  | Suntik  | 195        | 386        |
| 6  | Pil     | 11         | 8          |
| 7  | Kondom  | 15         | 6          |
|    | Jumlah  | 297        | 477        |

Sumber: Buku Laporan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2016.

Di desa Purwodadi, keikutsertaan laki-laki dalam KB dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 9. Partisipasi Pria dalam ber-KB Desa Purwodadi

| No     | Uraian    | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
|--------|-----------|------------|------------|
| 1      | Kondom    | 15         | 6          |
| 2      | vasektomi | -          | -          |
| jumlah |           | 15         | 6          |

Sumber: Buku Laporan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2016

Berdasarkan data KB di Desa Purwodadi, dapat diketahui bahwa keikutsertaan perempuan dalam ber KB meningkat dari tahun 2015 hingg atahun 2016, dengan adanya program terpadu P2WKSS. Namun, tidak demikian dengan keikutsertaan laki-laki, karena dari tahun 2015 hingga tahun 2016 justru menurun.

# b) Kesejahteraan

Dengan adanya program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena adanya pelatihan keterampilan yang menjadikan masyarakat terutama ibu-ibu memiliki keterampilan yang kemudian bisa diterapkan untuk menambah penghasilan dalam keluarga, misalnya dengan berjualan kue. Dengan memiliki usaha rumahan ini, masyarakat dapat meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, terutama kebutuhan dasar. Hal ini disampaikan oleh Ibu-ibu di Desa purwodadi, sebagai berikut:

Ibu Yayuk, Masyarakat Desa Purwodadi

"Iya meningkatkan, membantu suami lah, membantu rumah tangga untuk sehari-harinya, saya gitu. Penghasilanya juga memuaskan semakin tambah banyak pelanggan sebanyak produksi semakin banyak juga keuntungan"

# Ibu Retno, Masyarakat Desa Purwodadi

"Yo manfaat sekali no mbak... Udah enaklah disitu lah pokoknya istilahnya ingin apa untuk nyukupi kebutuhan apa gausah nunggu suami gajian, gausah nunggu suami ngasih udah punya sendiri enaknya disitu, yang jelas ekonominya ningkat mbak."

# Ibu Yamini, masyarakat Desa Purwodadi

"Bisa soalnya kan disitu ada kegiatan keterampilan yg untuk menambah *income* keluarga. Otomatis kalau kita sakit kita bisa memakai uang kita sendiri untuk berobat, untuk mencegah."

# Ibu Mulyatiningsih, Sekretaris Desa Purwodadi

"Buanyak o mbak, warga ne bu bayan niku juga meningkat. Data nya ndak ada, tapi kan ndak ada datanya, kenyataannya ada mbak, banyaak."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dengan adanya program P2WKSS ini dapat memberikan banyak manfaat salah satunya memberikan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dan meningkatkan kesejahteraan dalam keluarganya. Namun belum dapat diketahui sejauh mana peningkatan kesejahteraan yang terjadi sebelum dan sesudah adanya program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi, karena belum ada data yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan tersebut. Namun, Berdasarkan Buku Laporan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2016, ada data yang menunjukkan klasifikasi kesejahteraan penduduk Desa Purwodadi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 10. Klasifikasi Kesejahteraan Penduduk Desa Purwodadi

| No     | Uraian                 | Keterangan |
|--------|------------------------|------------|
| 1      | Keluarga Pra Sejahtera | 11 KK      |
| 2      | Sejahtera I            | 243 KK     |
| 3      | Sejahtera II           | 223 KK     |
| 4      | Sejahtera III          | 222 KK     |
| 5      | Sejahtera III Plus     | 33 KK      |
| Jumlah |                        | 732 KK     |

Sumber: Buku Pedoman Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2016

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa rata-rata masyarakat / keluarga di Desa Purwodadi sudah sejahtera, dilihat dari jumlah Keluarga yang berada di tingkat Keluarga Sejahtera I berjumlah 243 KK, yang berarti sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga, Keluarga Sejahtera II berjumlah 223 KK, yang berarti sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar serta kebutuhan psikologis dalam keluarga, Keluarga Sejahtera III sebanyak 222 KK, berarti sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan pengembangan keluarga. Serta Keluarga Sejahtera III Plus berjumlah 33 KK, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis, kebutuhan pengembangan keluarga dan aktualisasi diri. Dari jumlah Kepala Keluarga (KK) di desa Purwodadi, hanya 11 KK yang masih ada di tahap Kaluarga Pra Sejahtera (KPS) yang berarti belum sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga tetapi belum sepenuhnya.

# 5. Meningkatkan kesadaran akan pelestarian lingkungan hidup;

Dalam program terpadu P2WKSS, tidak hanya kesehatan dan kesejahteraan lingkup keluarga yang menjadi tujuannya, namun juga di

lingkup masyarakat. Program ini tidak hanya ingin memperbaiki sosial ekonomi dalam keluarga tetapi juga pelestarian lingkungan hidup dalam suatu masyarakat. Salah satunya dengan meningkatkan kesadara akan pelestarian lingkungan hidup ini.melalui kelompok PKK, yang juga merupakan sektor dalam P2WKSS, ada banyak kegiatan yang dilakukan di Desa Purwodadi untuk melesatrikan lingkungan, antara lain mengadakan Gerakan Jum'at Bersih dan Minggu Bersih dengan mengadakan kerja bakti di tempat-tempat umum; mengadakan gerakan penghijauan dengan melaksanakan Tebar, Tanam, Pelihara Pohon dengan tanaman yang produktif dilahan kosong atau tempat-tempat umum; membudidayakan tabulampot dan tabulakar; serta mengadakan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) pada setiap musim penghujan dengan 3M Plus.

Diawal pelaksanaan program terpadu P2WKSS, kegiatan pelestarian lingkungan hidup ini berjalan dengan cukup baik, namun seiring perjalanan, hingga selesainya lomba pelaksanaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup ini tidak berjalan dengan baik. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Mulyatiningsih selaku Sekretaris Desa Purwodadi yang menyatakan bahwa:

"Dulu ada lo kebun sayuran gitu, tapi sekarang sudah pada mati semua. Itu dulu juga pemberdayaan ada bantuan dari Kabupaten." Sejalan degan pernyataan Ibu Mulayatiningsih tersebut, Ibu Diana selaku Pengurus P2WKSS Desa Purwodadi pun menyatakan hal yang sama, sebagai berikut:

"Cuman yg agak ngga jalan itu pada ini kayaknya kemarin pemanfaatan sayuran ini loh, kan ada yg jalan ada yg tidak gitu, tapi yo masih banyak yg jalan sih, buktinya sekarang banyak yang mulai panen kayak kelengkeng kan itu dari p2w kemarin kan mulainya nanam, sekarang sudah waktunya penen. Cuman kalo sayuran memang musimnya nggak ini kan, tapi masih ada, tetep jalan tapi nggak semua. Kemarin pkk juga sudah ada yg nge*share* juga ada yg sudah panen jamur, ketela, cabai, gitu, masih jalan. Kan kalo dulu hampir semua rumah ada, nah ini kan tinggal beberapa rumah aja, tapi ya masih, nggak skakmat engga, masih jalan."

Berdasarkan pernyataan Ibu Mulyatiningsih dan Ibu Diana tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan pelestarian lingkungan hidup tidak berjalan sebaik saat pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS tahun 2016. Beberapa masyarakat masih ada peduli dengan pelestarian lingkungan hidup tetapi untuk pelestarian sayuran pekarangan rumha sudah berkurang, tidak semua yang melestarikan.

# 6. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara;

Ada beberapa kegiatan di Desa Purwodadi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran bernegara dan berbangsa kepada masyarakat. Salah satunya adalah penyuluhan dan pembinaan keluarga sadar hukum yang salah satunya membahas peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama yang berhubungan dengan keluarga. Dengan adanya kegiatan ini penyuluhan Hukum ini, berdasarkan Buku

Laporan Program Terpadu P2WKSS Tahun 2016, di Desa Purwodadi tidak ditemukan pelanggaran terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga di Desa Purwodadi tidak ada kriminalitas yang terjadi pada tahun 2016. Dan pada tahun 2016 juga tidak ada masyarakat Desa Purwodadi yang tekena narkoba. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum dan aturan yang ada.

Peningkatan kesadara berbangsa dan bernegara ini tidak hanya sebatas pada mematuhi hukum dan peraturan, tapi juga meningkatkan kecintaan terhadap budaya bangsa. Hal ini dilakukan melalui beragai kegiatan, anatar lain melestarikan seni tradisional hadrah, karawitan dan campursari. Seni dan budaya di Indonesia sangatlah beragam, tetapi semakin hari tergeser oleh budaya asing yang kian menyebar oleh karena itu perlu adanya pelestarian seni dan budaya bangsa. Di Purwodadi sendiri, kesenian yang paling mencolok adalah karawitan. Menurut ibu Diana Santi, seni yang juga keterampilan memainkan gamelan ini juga merupakan hasil dari program terpadu P2WKSS. Ibu Diana mengatakan sebagai berikut:

"Terus ibu-ibu karawitan sekarang malah jadi tanggapan kadang-kadang. Nah itukan juga dari P2WKSS awalnya gitu loh, jadi awalnya ngga ngerti caranya memainkan alat gamelan itu setelah P2WKSS itu ada pembinaan ada pelatihan malah sekarang kadang-kadang ada tanggapan neng nggone manten.

Jadi itu salah satu keuntungan dari P2WKSS, keterampilan dinaikkan."

Berdasarkan pernyataan Ibu Diana tersebut dapat diketahui bahwa selain dalam hal hukum, kesadaran masyarakat Berbangsa dan Bernegara dalam hal seni juga meningkat. Hal ini terbukti dari semakin berkembangnya kelompok karawitan ini hingga bisa diundang di kegiatan/hajatan-hajatan masyarakat.

# 7. Memberdayakan kaum lansia;

Upaya memberdayakan kaum Lansia di Desa Purwodadi ini ditandai dengan telah terbentunya kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) di Desa Purwodadi. Kelompok BKL ynag bernama BKL Janoko ini bahkan sudah dibentuk sebelum masuknya program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi, yaitu sejak tahun 2014 dan ditetapkan dengan Keputusan Desa Purwodadi Nomor 02 Tahun 2014. sehingga ketitak program P2WKSS dilaksanakan di Desa Purwodadi, kegiatan ini sudah berjalan dan tinggal melanjutkan dan meningkatkan saja.

Upaya pemberdayaan lansia ini juga dilakukan dengan mengadakan Posyandu Lansia secara teratur setiap satu bulan sekali, senam lansia setiap minggu, dan juga pengajian/yasinan untuk meningkatkan spiritual lansia. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Mulyatiningsih selaku Sekretaris Desa Purwodadi bahwa:

"Lansia tiap bulan, posyandu tiap bulan. Di kantor desa sini."

Dan pernyataan yang sejalan juga diungkapkan oleh Ibu Diana, selaku pengurus P2WKSS Desa Purwodadi yang menyatakan bahwa:

BRAWIJAY

"BKL, itu kan yg lansia, itu sudah masuk di yasinan, masuk di posyandu lansia, meskipun ngga ada program khususnya kan ada posyandu lasia setiap bulan, sama senam lansia, berarti itu kan juga pembinaan daripada lansia berarti kan yo jalan to nek dipikir."

Selain dari pernyataan Ibu Mulyatiningsih dan Ibu Diana tersebut, berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Purwodadi pada tagnggal 10 Januari 2018, ketika ada kegiatan Posyandu Lansia, berdasrkan daftar kehadiran yang ada, diketahui tercatat 92 orang yang hadir dalam kegiatan Posyandu Lansia tersebut. Jumlah ini cukup banyak untuk satu tempat, mengingat posyandu lansia ini tidak hanya di laksanakan di satu tempat saja. Ini menujukkan bahwa kaum lansia memiliki semangat yang cukup tinggi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan mereka.

# 8. Meningkatkan perekonomian lokal.

Perekonomian merupakan salah satu unsur kesejahteraan dalam keluarga dan masyarakat. Menurut buku Laporan Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Tahun 2016, di Desa Purwodadi ada beberapa usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh perempuan, yaitu jasa jahit, aksesoris rumah tangga, samilan/keripik, kue basah, tempe/tahu, warung nasi/kopi, jasa salon&rias, usaha janggelan, Jagal hewan, usaha abon, dan usaha bakso. Untuk meingkatkan usaha ekonomi produktif ini, melalui program terpadu P2WKSS, dilaksanakan pelatihan dan pembinaan kepada kader sektor Pemberdayaan Perempuan dengan membentuk Kelompok Usaha

Bersama "Dadi Makmur" yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang.
Berikut ini merupakan data perempuan dalam Kelompok Usaha
Bersama "Dadi Makmur" Desa Purwodadi:

Tabel 11. Data Perempuan yang Mempunyai Usaha Kelompok
"Dadi Makmur"

| No | Nama             | Jenis Usaha                      |
|----|------------------|----------------------------------|
| 1  | Ibu Surati       | Usaha Pembuatan Abon             |
| 2  | Ibu Suyatmi      | Usaha Pembuatan Janggelan        |
| 3  | Ibu Minem        | Usaha Pembuatan Tempe dan cambah |
| 4  | Ibu Siti Supiati | Usaha Jagal hewan                |
| 5  | Ibu Winarsih     | Usaha Pembuatan Kripik Ketela    |
| 6  | Ibu Susanti      | Usaha Pembuatan Bakso            |
| 7  | Ibu Sukirah      | Usaha Pembuatan Krupuk           |
| 8  | Ibu Sawi         | Usaha PembuatanKue semprong      |
| 9  | Ibu Retno        | Usaha Catering/kue               |
| 10 | Ibu Sukiyem      | Usaha Pembuatan Janggelan        |

Sumber: Buku Laporan Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2016.

Dengan adanya berbagai pelatihan keterampilan dan pembinaan yang dilakukan Dinas PPKBPPA melalui program terpadu P2WKSS, ada manfaat dan peningkatan ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat Desa Purwodadi, salah satunya diungkapkan oleh Ibu Retno, masyarakat Desa Purwodadi yang juga tergabung dalam kelompok Usaha Bersama, yang menyatakan sebagai berikut:

"Yo manfaat sekali no mbak, yo saya nggak nyangka saya usaha seperti ini ya mbak ya. Tapi saat itu saya kan ibu rumah tangga suami saya cuma kerja di bengkel ya mbak itu pengen apa apa kan mesti nunggu suami saya gajian sedangkan yg namanya perempuan pengen selain kebutuhan rumah cukup kan kadangkadang lihat apa pengen misalkan lihat panci panci pengen, setelah saya wirausaha jualan sendiri punya uang sendiri kan itu saya bisa oh pengen itu beli pengen ini beli, ya itu sampe sekarang enaknya gitu. Membantu ekonomi rumah tangga gitu lo. Ndak usah menunggu suami gajian pengen apa

BRAWIJAYA

apa gausah nunggu suami gajian. Sampe suami saya sekarang ngga kerja lagi malah bantu usaha saya ini sekarang."

Berdasarkan penjelasan Ibu Retno tersebut, dapat diketahui bahwa dengan adanya program terpadu P2WKSS ini dapat membantu meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat Desa Purwodadi, khususnya pada ekonomi keluarga, karena dapat menghasilkan dan meningkatkan pendapatan keluarga sehingga kesejahteraan keluarga pun ikut meningkat. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Yayuk yang juga memiliki usaha rumahan (kue basah), meskipun tidak tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama, beliau juga merasakan peningkatan pada usahanya. Ibu Yayuk menyatakan sebagai berikut:

"Lo yo jelas berguna. Intinya kan kita kan menambah lapangan pekerjaan bagi kaum ibu ibu to. Saya tu kalo dapet pesenan banyak yo ngundang orang untuk bantuan gitu lo, berarti kan penting, daripada kita nganggur di rumah kan kesempatan to itu. iya meningkatkan (pendapatan) membantu suami lah, membantu rumah tangga untuk sehari-harinya, saya gitu. Penghasilanya juga memuaskan semakin tambah banyak pelanggan sebanyak produksi semakin banyak juga keuntungan."

Seperti hal nya Ibu Yayuk, Ibu Yamini, masyarakat Desa Purwodadi pun mengatakan hal yang sama. Bahwa dengan adanya program terpadu P2WKSS ini dapat meningkatkan ekonomi keluarga, beliau mengatakan sebagai berikut:

"Keterampilan untuk membantu ekonomi keluarga mbak, bikin kue bisa dijual. Bisa (memberdayakan perempuan) soalnya kan disitu ada kegiatan keterampilan yg untuk menambah *income* keluarga. Otomatis kalau kita sakit kita bisa memakai uang kita sendiri untuk berobat, untuk mencegah. Itu kan alat (bantuan) untuk menunjang... apa itu, bikin kue. Kan

BRAWIJAY

meringankan beban kita seandainya ada yg rusak bisa untuk serep."

Berdasarkan pernyataan Ibu Yayuk dan Ibu Yamini tersebut juga dapat diketahui bahwa program terpadu P2WKSS dapat memberdayakan perempuan termasuk meningkatkan usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh masyarakat Desa Purwodadi, terutama pada peningkatan ekonomi keluarga.

### 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Purwodadi.

Dalam berbagai kegiatan termasuk pemberdayaan perempuan ada banyak faktor yang dapat mendukung keberhasilan suatu program namun ada pula yang kemudian menjadi penghambat program tersebut dalam pelaksanaannya atau perjalannya. Berbagai faktor tersebut bisa dari internal masyarakatnya sendiri maupun eksternal atau diluar masyarakatnya. Berikut ini merupakan beberapa faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS di desa Purwodadi:

#### a. Faktor Pendukung

#### 1. Masyarakat

Salah satu yang menjadi faktor pendukung program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi adalah keterbukaan desanya. Purwodadi merupakan salah satu desa dengan Kepala Desa perempuan yang peduli

dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan perempuan. Masyarakat desa Purwodadi pun senang dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas-Dinas lintas sektor Kabupaten Magetan melalui program P2WKSS ini. Hal ini disampaikan oleh Ibu Endang selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak (PPKBPPPA) Kabupaten Magetan, yang menyatakan bahwa:

"Disana itu terbuka banget, maksutnya dengan adanya ini tidak ada kendala. Kesan pertama disana itu, faktor pendorong dan pendorong dan penghambat, disana *open* banget ya, maksdunya ibu Lurah nya itu senang dengan adanya program P2WKSS itu, jadi tidak ada masalah makanya kita masuk enak. Terus dia itu mendukung karena apa? Lurahnya perempuan, jadi gendernya bisa masuk, kalau penghambatnya itu kadang-kadang pada saat pembinaan gitu-gitu ya keterlambatan datang itu saja, nggak tertib waktu gitu saja. Bagus disana mbak. Dulu pas pembinaan kedua, pembinaan masak itu juga dia ya senang ya, cuma tingkat kedatangannya."

Sedangkan menurut Ibu Suci Minarni selaku Kepala Desa Purwodadi mengemukakan bahwa semangat perempuanlah yang menjadi salah satu pendorong/pendukung terlaksananya kegatankegiatan yang melibatkan perempuan, berikut merupakan penyataan Ibu Suci Minarni:

"Saya kalau kegiatan perempuan tu pendorongnya keaktifannya itu lo jadikan lebih giat. Kegiatan perempuan itu sekali ada kegiatan semangatnya sudah timbul, jadi semangat perempuan itu lebih giatlah intinya untuk mengadakan kegiatan itu."

Pernyataan Ibu Endang dan Ibu Suci tersebut juga sejalan oleh Ibu Mulyatiningsih selaku Sekretaris Desa Purwodadi yang menyatakan bahwa:

"Pendukungnya karena bahasa hatinya ingin maju itu lo mbak, tapi kalau penghambatnya, apa ini hambatnnya, mungkin karena waktu mbak, biasanya kalau nggak ada waktu atau ada kegiatan lain kan... aku ijin, tapi tidak semua seperti itu. Maju mbak disini ini, disini ini sebenarnya maju semua kalau menurutku daripada desa yang lain. kamu ngambil ya disini"

Berdasarkan pernyataan Ibu Endang, Ibu Suci dan Ibu Mulyatiningsih diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendorong dari pelaksanaan P2WKSS di Desa Purwodadi adalah dari masyarakatnya sendiri, semangat perempuan yang terbuka mau menerima perubahan dan memiliki keinginan untuk memajukan desanya. Selain itu juga karena Desa Purwodadi merupakan salah satu Esa dengan Kepala Desa perempuan, dan peduli dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan perempuan sehingga mendukung diadakannya program terpadu P2WKSS tersebut.

Banyak Kegiatan perempuan yang sudah ada sebelum program terpadu
 P2WKSS

Di Desa Purwodadi terdapat banyak kegiatan yang melibatkan perempuan. Salah satunya adalah program terpadu P2WKSS yang mana di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan perempuan yang didukung oleh berbagai Dinas lintas sektor di Kabupaten Magetan. Namun, P2WKSS ini bukanlah satu-satunya program pemberdayaan perempuan yang dilakukan di desa Purwodadi. Banyak kegiatan lain

yang sudah dilaksanakan sebelum adanya P2WKSS di Desa Purwodadi, antara lain Pemberdayaan dan Kesejahteraan Kaluarga (PKK), Koperasi Wanita (KopWan), Kelompok Bina Kaluarga Balita (BKB), Kelompok Binas Kaluarga Remaja (BKR), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Manular (POSBINDU PTM), dan lain sebagainya (sumber: Buku Laporan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2016).

Banyak kegiatan-kegiatan di Program P2WKSS yang masih berjalan hingga sekarang. Hal ini dikarenakan kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Purwodadi memang sudah ada sebelum adanya P2WKSS. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Mulyatiningsih yang merupakan salah satu pengurus P2WKSS Desa Purwodadi. Beliau menyatakan bahwa:

"Ya karena sebelum ada P2WKSS itu ya memang sudah ada. Jadi kita tinggal meneruskan saja. Kan sebelume itu memang sudah ada mbk. La itu kalau bener bener dijalankan no jane yo memang luar biasa lo mbak..."

Dapat disimpulkan bahwa, sebelum adanya program Terpadu P2WKSS dari Pemerintah Kabupaten Magetan, sudah ada kegiatan-kegiatan yang memberdayakan perempuan di Desa Purwodadi. Sehingga ketika Desa Purwodadi ditunjuk sebagai pelaksana program P2WKSS tahun 2016, tinggal melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah ada, dan menambah beberapa kegiatan, tidak memulai dari nol.

#### 3. Dasar Hukum

Dasar hukum merupakan sesuatu yang penting dalam pemerintahan. Kebijakan yang memiliki dasar hukum dengan kebijakan yang tidak memiliki dasar hukum akan berbeda. Dengan memiliki dasar hukum yang jelas, maka suatu kebijakan dapat dikatakan memiliki kekuatan untuk dijalankan setelah ditetapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Begitupun dengan program P2WKSS, yang memiliki dasar hukum yang jelas. Di Kabupaten Magetan, dasar hukum pelaksanaan P2WKSS Desa Purwodadi Kecamatan Barat adalah:

- Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/69/Kept/403.013/2016
   Tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Program Terpadu
   Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera
   (P2WKSS) Kabupaten Magetan Tahun 2016;
- 2) Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/70/Kept/403.013/2016 Tentang Tim Pembina dan Pengendali Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Kabupaten Magetan Tahun 2016;
- 3) Surat Keputusan Camat Barat Nomor: 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Pengendali Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Kecamatan Barat Tahun 2016:
- 4) Surat Keputusan Kepala Desa Purwodadi Kecamatan Barat Nomor:11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Pengendali Kegiatan

Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Desa Purwodadi Tahun 2016.

#### **b.** Faktor Penghambat

#### 1. Masyarakat

Masyarakat Desa Purwodadi yang terbuka akan perubahan menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaan program terpadu P2WKSS. Namun hal itu sekaligus menjadi faktor penghambat juga. Beberapa masyarakat agak kurang antusias terhadap program yang ada, seperti yang dikatakan oleh Ibu Suci Minarni, Kepala Desa Purwodadi, bahwa:

> "Penghambatnya kadang-kadang sebagian kecil masyarakatnya itu, ya banyak yg antusias tapi ada beberapa yang kurang antusias, tapi sedikitlaah ..."

Pernyataan Ibu Suci tersebut juga sejalan dengan pernyataan Ibu Diana Santi yang merupakan Pengurus P2WKSS Desa Purwodadi. beliau menyatakan bahwa:

> "Pendukungnya juga manusianya, kelemahannya juga pada manusianya. Dari Dinas, dari desa sudah menjembatani, apa yang diinginkan misalnya, sudah dibina, la tapi kalau orangnya nyapo ogah-ogahan mau gimana kan tetep gak jalan. Tapi kalau dia ingin keluarga nya ekonominya meningkat ingin usaha apa? Ingin begini, dibina, dikasih modal dia pinjem, akhirnya kalau dia rajin dia mau menggerakkan dirinya untuk usaha, berjalan, bisa mengangsur, kan yajadi terlaksana program nya P2W, tapi kalo dia nggak mau yasudah masalah lagi kan, la disitulah, jadi terletak di SDM nya itu tadi."

Berdasarkan penjelasan Ibu Diana Santi tersebut dapat diketahui bahwa selain menjadi faktor pendorong, masyarakat juga bisa menjadi faktor penghambat suatu kegiatan atau program. Pada dasarnya masyarakatlah yang menentukan diriny sendiri ingin maju atau tidak. Beberapa masyarakat memiliki sikap yang kurang aktif sehingga seperti apapun usaha dari pemerintah untuk memajukan, jika ia tidak memiliki kemauan maka akan sulit juga untuk memajukan.

Berdasarkan pernyataan Ibu Suci dan Ibu Diana tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan suatu kegiatan atau program. Hal ini tergantung sejauhmana antusias mereka terhadap kegiatan yang ada. Masyarakat bisa saja menjadi pendorong karena semangat dan kemauannya, namun juga bisa menjadi penghambat ketika mereka sendiri kurang antusias dan bahkan tidak mau mengusahakan dirinya sedniri untuk maju dan ikut serta.

#### 2. Kurangnya monitoring dan evaluasi kegiatan

Salah satu penghambat pelaksanaan program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi adalah kurangnya monitoring dan evakuasi dari pihak desa terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Hingga awal tahun 2018 ini belum ada kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Namun begitu, kegiatan-kegiatan tersebut tetap dijalankan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Mulyatingsih, Sekretaris Desa Purwodadi:

"belum, belum, tapi kita ya juga berjalan mbak."

Kurangnya monitoring dan evaluasi program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi ini, juga dikatakan oleh Ibu Endang, selaku Kabid PPPA, Dinas PPKBPPPA Kabupaten Magetan. Beliau menyatakan bahwa:

"Sekarang kita kelamahannya memang dimonitoringnya, kita setelah ngasih pelatihannya tu kadang-kadang sudah selesai, itu mungkin bisa menjadi permasalahan."

Penyataan Ibu Mulyatiningsih dengan Ibu Endang tersebut tidak jauh berbeda yang menyatakan bahwa monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan pada Program Terpadu P2WKSS masih lemah, bahkan belum dilaksanakan. Namun pernyataan tersebut agak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Ibu Diana Santi yang merupakan pengurus P2WKSS Desa Purwodadi, beliau menyatakan bahwa:

"Nah itu kalo yg saya ga paham. Maksudnya gini, itu kan hubungannya dengan Dinas, kalo Dinas koperasi masih, karena hubungannya dengan koperasi, dari Dinas kesehatan masih hubungannya dengan posyandu sama ini pola asuh itu, pendidikan TK itu, itu kan Dinas to laporannya tetep ada hubungannya dengan Dinas, nek KB itu kan masih ada petugasnya di kita, tapi bina langsung ke desa saya ndak tau tapi kalo kasarannya untuk pelaporan dan hubungan tetep ada sampe sekarang. Nek industri itu ada pengusulan bikin produk itu ngga tau masih jalan apa enggak. Tapi kalo hubungan dengan KOPWAN (Koperasi Wanita) kita masih ada, kan kalo RAT mesti Dinas tu datang, minimal tetep memberikan pembinaan. Kalo dinkes mesti ada karna setiap bulan ada posyandu. Yg pasti itu yg masih ada. Mestinya masih ada kelanjutan walupun tidak secara langsung."

Berdasarkan penjelasan Ibu Diana Santi tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa Dinas masih memonitoring bahkan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang ada, misalnya Dinas koperasi, Dinas kesehatan, Dinas pendidikan, dan Dinas PPKBPPPA terkait KB. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun ada beberapa

Dinas yang terkait melakukan monitoring dan ikut serta, namun untuk evaluasi belum ada, dan itupun tidak semua Dinas yang melakukan monitoring. Sehingga masih sangat kurang dalam hal monitoring dan evaluasi pada kegiatan-kegiatan dalam Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi.

#### 3. Beberapa Kegiatan vakum

Program Terpadu P2WKSS yang dilaksanakan di Desa Purwodadi merupakan salah satu program yang bagus untuk dilaksanakan dan dilanjutkan secara terus-menerus. Namun, dalam perjalannya beberapa kegiatan yang ada di Program Terpadu P2WKSS yang vakum. Di tahun 2018 semakin sedikit kegiatan yang dianggarkan di APBDes Purwodadi dibanding tahun 2017 dan tahun 2016. Ibu Muryani selaku pengurus P2WKSS sekaligus Kasie Pemerintahan Desa Purwodadi, mengungkapkan kegiatan di Program P2WKSS yang masih ada, dari hasil APDes untuk tahun 2018, sebagai berikut:

"Kesehatan itu Posyandu, terus Pola Asuh anak, terus di Pokja 1 (sektor PKK) itu masih ada PIK-R, penyuluhan, tambahnya ya BKMT itu juga. Tinggal itu mbak, kalau pendidikan ndak ada, ndak memasukkan. Dulu, kalau yang tahun kemarin itu ada mbak, ibu-ibu pemberdayaan itu membuat bros, sekarang ndak ada. Kesehatan sudah meningkat mbak malahan, kalau dulu kesehatan kan itu dari puskesmas, sekarang sudah bisa mengupayakan (peralatan kesehatan).

Berdasarkan pernyataan Ibu Muryani tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kegiatan utama dan dianggarkan pada tahun 2018 lebih pada kebutuhan kesehatan dan kegiatan remaja desa. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan lain memang tidak dianggarkan.

BRAWIJAY

Hal ini dijelaskan oleh Ibu Mulyatiningsih selaku sekretaris Desa Purwodadi yang menyatakan :

"Ya karena kondisi saat ini yg perlu di prioritaskan adalah pemberdayaan fisik, sarana prasarana itu mbak pembangunan. Dan pemberdayaan SDM, pelatihan-pelatihan khususnya pelatihan aparaturnya."

Pernyataan Ibu Mulyatiningsih tersebut sejalan dengan pernyataan Ibu Suci Minarni yang merupakan Kepla Desa Purwodadi. Beliau menjelaskan sebgai berikut:

"Kalau untuk kegiatan, saat ini kan kita fokusnya untuk kegiatan pembangunan. Tempat untuk kegiatan itu kan perlu, kayak gedung itu mbak, perlu untuk bangun gedung. Kalau mau mengumpulkan kan butuh tempat. Selama in kalau seperti P2WKSS itu ya mensupport tapi belum begitu maksimal, ya sekarang fisik dulu, tahun ini lo. Karena jalan-jalan kan ini juga rusak semuanya. Tapi nanti setelah fisiknya selesai untuk kegiatan peningkatan SDM nya yang perlu dibenahi. Tapi pada umumnya ya tetep semua kegiatan itu kita mesti mendanai. Mungkin untuk kesehatan kader-kader mau ada pertemuan ke Dinas terkait ke magetan. Cuma kalau untuk kegiatan yang perlu dana yang besar kita belum, kalau tahun ini lo..."

Berdasarkna pernyataan Ibu Muryani, Ibu Mulyatiningsih dan Ibu Suci, dapat disimpulkan bahwa untuk tahun tahun ini beberapa kegiatan yang masih vakum dikarenakan pada tahun 2018 ini lebih memfokuskan pada pembangunan fisik Desa, baik sarana maupun prasarananya. Sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dana diluar prioritas Desa masih belum bisa dimasukkan dalam APBDesa tahun 2018. Namun berdasarkan (observasi) penelitian di lapangan, juga masih ada kegiatan penyuluhan DBD, penyuluhan ibu hamil.

#### 4. Kendala waktu pembinaan dan kegiatan

Memberdayakan masyarakat bukanlah hal yang mudah, karena banyak hal yang akan menjadi tantangan tersendiri, salah satunya adalah waktu. Banyak dari masyarakat yang meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan-kegaitan yang diadakan untuk mereka, namun tidak sedikit dari mereka yang menjadikan pekerjaan sebagai prioritas utama dan tidak dapat ditinggal. Seperti halnya kegiatan-kegiatan dalam Program Terpadu P2WKSS ini, waktu menjadi salah satu penghambatnya.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Endang Kabid PPPA Dinas PPKBPPA Kabupaten Magetan yang mengungkapkan bahwa selama pembinaan tidak dapat memaksakan masyarakat utuk mengikuti jadwal dari Dinas, karena pada umummnya masyarakat memiliki kegiatan yang berbeda-beda, sehingga dari Dinaslah yang harus menyesuaikan masyarakat. Semua itu dilakukan semata-mata untuk memajukan Desa dan masyarakatnya. Berikut ini merupakan pernyataan Ibu Endang:

"Orang desa itu kan kadang kadang bisanya habis magrib jadi kita nggak boleh egois kan. Pembinaannya itu sesuai dengan kesepakatan, kalau pagi dia bekerja ndak bisa karena dia jualan ya kita ngalah kan untuk memajukan desa itu, terus janjian kelompok itu nanti ketemu di rumah bu A malam hari jam 7, ya kita datang kesana..."

Sama halnya Ibu Endang, Ibu Novi (masyarakat Desa Purwodadi) juga menyatakan bahwa waktu menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan, salah satunya kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita). Beliau menyatakan bahwa:

BRAWIJAYA

"BKB kan kegiatan sendiri tapi disini kan banyak yg kerja jadi ngeluangkan waktunya yg susah jadi bareng posyandu gitu mbak."

Bina Keluarga Balita (BKB) ini merupakan salah satu kegiatan di sektor Kesehtaan yang masih rutin dilaksanakan. Karena yang menjadi target pembinaan disini adalah Ibu-ibu yang memiliki balita, dan banyak yang bekerja, dan agak sulit meluangkan waktunya, sehingga pelaksanaan BKB dijadikan satu dengan kegiatan Posyandu.

Selain pernyataan dari Ibu Endang dan Ibu Novi, Ibu Suci selaku Kepala Desa Purwodadi juga menyatakan bahwa waktu juga menjadi salah satu kendala kegiatan. Ibu Suci yang juga sebagai penggerak Kelompok Usaha Bersama (KUB) "Abon Asli" di Desa Purwodadi menyatakan bahwa kegiatan produksi abon KUB "Abon Asli" sementara vakum atau belum terlaksana lagi karena beliau yang merupakan Kepala Desa Purwodadi sedang sibuk dengan kegiatan-kegiatan Desa. Berikut ini merupakan penjelasan beliau:

"Mau saya tu daripada saya sendiri saya tu ngajak kelompok nanti biar kelompok itu istilahnya ngelola bareng dapat berapa, hasil itu kan milik kelompok. Tapi mau seperti itu belum lama saya banyak kegiatan akhirnya kelompoknya belum jalan. Tapi sudah bentuk kelompok, sudah berapa kali mau lomba di magetan itu yang bikin ya kelompok itu."

Berdasarkan beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh beberapa narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa waktu menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan kegiatan. Hal ini dikarenakan kegiatan setiap orang berbeda-beda sehingga harus mencari solusi lain agar masalah waktu tidak menjadi kendala dan

kegiatan tetap berjalan, meskipun ada kegiatan yang memang belum bisa dilaksanakan kembali.

#### 5. Keterlambatan kedatangan saat pembinaan

Salah satu faktor penghambat yang lain dari pelaksanaan program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi adalah keterlambatan kedatangan masyarakat saat dilakukaknnya pembinaan. Hal ini sebagaimana ynag dikatakan oleh Ibu Endang selaku Kabid PPPA Dinas PPKBPPPA Kabupaten Magetan yang melakukan pembinaan P2WKSS di Desa Purwodadi, bahwa:

"...kalau penghambatnya itu kadang-kadang pada saat pembinaan gitu-gitu ya keterlambatan datang itu saja, nggak tertib waktu gitu saja. Bagus disana mbak. Dulu pas pembinaan kedua, pembinaan masak itu juga dia ya senang ya, cuma tingkat kedatangannya ..."

Kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam kegiatan seringkali memang sedikit menggangu jalannya kegiatan. Keterlambatan kedatangan ini menjadikan mulainya kegiatan sedikit terlambat karena harus menunggu kehadiran masyarakat yang akan diberikan pembinaan.

#### C. Analisis Data

- Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Terpadu Peningkatan
   Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di
   Desa Purwodadi.
  - a. Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Pemberdayaan Perempuan melalui Program Terpadu P2WKSS

Pembangunan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh suatu negara semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, baik secara ekonomi, sosial, politik maupun budayanya. Dalam pembangunan, sudah seharusnya menempatkan masyarakat sebagiai subjek, bukan hanya objek atau sasaran saja. Soetomo (2012:193) mengemukakan bahwa dalam pendekatan pembangunan masyarakat, proses perubahan yang terjadi sejauh mungkin bersandar pada kemampuan, prakarsa dan partisipasi masyarakat termasuk unsur manusia yang ada di dalamnya. Menurut Sulistiyani (2017:97) dalam pemberdayaan masyarakat perlu adanya kontribusi masing-masing aktor yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan melalui Program Terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi, melibatkan Pemerintah Kabupaten Magetan meliputi berbagai dinas lintas sektor yang terkait, dan Pemerintah kecamatan Barat. Sebagai salah satu aktor dalam pemberdayaan masyarakat Pemerintah memiliki peran formulasi dan penetapan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta mediasi dengan

bentuk fasilitasi berupa dana, jaminan, alat, teknologi, network, sistem manajemen informasi, dan edukasi (Sulistiyani, 2017:97). Pemerintah Kabupaten Magetan dengan Keputusan Bupati Magetan menetapkan Desa Purwodadi sebagai lokasi penyelenggaraan Program Terpadu P2WKSS Kabupaten 2016 Magetan tahun dan secara langsung mengimplementasikan kebijakan tersebut. Selain penetapan kebijakan, berdasarkan Buku Laporan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Magetan juga memberikan fasilitas pendanaan dari APBD II sejumlah Rp.104.190.650,00 untuk program ini. Beberapa Dinas juga memberikan alat untuk menunjang pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS. Sementara, edukasi bagi masyarakat dapat dilihat dari berbagai kegiatan penyuluhan/sosialisai dan pelatihan keterampilan yang berikan oleh berbagai Dinas di Kabupaten Magetan kepada masyarakat desa Purwodadi terutama perempuan.

Sulistiyani (2017:98) juga mengemukakan bahwa pemerintah sebaiknya juga menetapkan pola monitoring dan evaluasi yang jelas, dan berkelanjutan. Namun kenyataannya, Program Terpadu P2WKSS hingga saat ini masih kurang dalam hal monitoring dan evaluasi. Program terpadu P2WKSS dan kegatan-kegiatan yang ada, fokus terbesarnya ketika sedang pelaksanaan dan ketika lomba. Setelah itu hampir tidak dilakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini menjadikan program P2WKSS tidak sepenuhnya dilaksanakan pada tahun-tahun setelah selesainya pembinaan

dan perlombaan P2WKSS. Dan karena kurang bahkan hampir tidak adanya monitoring dan evaluasi sehingga kegiatan berjalan begitu-begitu saja tanpa tahu apa kekurangan dari kegiatan tersebut, apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dipertahankan. Sehingga terkadang tidak dapat diketahui apakah kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan, sasaran dan manfaat yang ingin dicapai. Begitupun dengan pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi yang dilaksanakan pada tahun 2016 ini belum ada monitoring dan evaluasi yang jelas dari pemerintah maupun masyarakat. Hal ini berarti bahwa meskipun Pemerintah berperan baik dalam hal kebijakan dan implementasi, namun Pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan perannya yaitu dalam hal monitoring dan evaluasi.

Selain Pemerintah, masyarakat merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam pemberdayaan. Kini masyarakat tidak hanya sebagai objek, melainkan juga sebagai subjek yang berpartisipasi aktif pada proses pemberdayaan. Menurut Sulistiyani (2017: 99) secara umum peran masyarakat diberikan dalam bentuk partisipasi yang baik pada level formulasi, implementasi, monitoring maupun evaluasi. Dalam Program P2WKSS Desa Purwodadi ini, masyarakat utamanya perempuan terlibat sebagai tim pengurus P2WKSS Desa, dan juga sebagai kader kegiatan. Selain itu perempuan-perempuan di Desa Purwodadi juga berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan seperti mengikuti penyuluhan-penyuluhan, hingga pelatihan keterampilan yang diberikan

oleh berbagai Dinas di Kabupaten Magetan. Namun, dalam hal monitoring dan evaluasi, karena pemerintah belum melaksanakannya secara jelas, maka masyarakat belum turut berpartisipasi dalam hal ini. padahal dengan adanya monitoring dan evaluasi dengan pemerintah, bisa menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai ide, masukan, kritik dan sarannya terkait pelaksnaan program P2WKSS dan kegiatan-kegiatan didalamnya.

Memurut Sulistiyani (2017:98) swasta mengambil peran implementasi penentuan langkah/policy action bersama masyarakat. Peran pihak swasta dalam pemberdayaan perlu ditekankan agar terjadi variasi analisis yang berdasarkan pada kondisi khusus di daerah, sehingga bisa lebih mendekati kebutuhan lokal (Sulistiyani, 2017:98). Selain itu, Sulistiyani (2017:98) Peran swasta dalam implementasi kebijakan pemberdayaan juga mencakup kontribusi dana melalui investasi swasta yang bermanfaat untuk mendukung proses pemberdayaan masyarakat.

Menurut Sulistiyani tersebut, dapat diketahui bahwa pihak swasta perlu diikutsertakan dalam pemberdayaan sebagai mitra masyarakat untuk menentukan langkah, selain itu juga untuk analisis kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Dengan begitu akan mudah mentukan variasi/inovasi pemberdayaan yang seperti apa yang bisa diterapkan di daerah tersebut. Selain itu juga, pihak swasta dapat diikutsertakan perannya dalam kontribusi pendanaan untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan

BRAWIJAY

masyarakat, terutama ketika dana Desa maupun dana dari pemerintah tidak mencukupi untuk melanjutkan pemberdayaan tersebut.

Apabila terjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta, setidaknya akan memberikan inovasi yang berbeda dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Selain itu, dengan adanya sinergi antara 3 (tiga) aktor ini dapat menambah sumber pendanaan untuk pelaksanaan pemberdayaan. Namun, pada Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi ini belum ada pihak swasta yang turut serta. Hal ini dikarenakan memang belum adanya kerjasama antara Desa Purwodadi dengan *privat* (swasta). Sehingga peran sinergis dalam pelaksanaan P2WKSS antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum terlaksana di Desa Purwodadi.

### b. Tahap-tahap Pemberdayaan Perempuan melalui Program TerpaduP2WKSS

Menurut Siagian (2014: 5) Administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir. Administrasi pembangunan sangat erat kaitannya dengan administrasi publik, sebab permasalahan yang dihadapi administrasi publik ialah masalah "pembangunan bangsa" yang merupakan pembangunan hidup dan kehidupan suatu bangsa, baik secara

indivdu maupun seluruh masyarakat (Syafri, 2012:113). Sehingga dalam suatu pembangunan perlu adanya pengadministrasian yang baik. Untuk mlaksanakan pembangunan yag berhasil di daerah, perlu ada keikutsertaan masyarakat didalamnya. Salah satunya dalah dengan memberdayakan masyarakat tersebut menuju kehidupan yang lebih baik, dengan begitu pembangunan di daerah dapat terlaksana baik dan kesejahteraan meningkat.

Program Terpadu P2WKSS merupakan salah satu program pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera, dengan perempuan sebagai penggerak utamanya. Berdasarkan Buku Laporan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2016, ada 10 (sepuluh) tahap yang dilalui dalam pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS, yaitu:

#### 1. Kegiatan rapat koordinasi;

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah awal sebelum dilaksanakannya program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi. Rapat koordinasi ini tidak hanya dilakukan Pemerintah Kabupaten Magetan saja, melain kan juga dengan pihak Desa Purwodadi, baik pemerintah desa maupun pengurus P2WKSS Desa Purwodadi. Rapat koordinasi ini merupakan tahap dimana Pemerintah menyiapkan proses pemberdayaan kepada masyarakat dan sebagai salah satu upaya menciptakan prakondisi untuk pelaksanaan program yang baik.

# BRAWIJAY/

#### 2. Kegiatan orientasi P2WKSS;

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, kegiatan orientasi P2WKSS ini bertujuan untuk mencocokkan, sejauh mana keselarasan potensi desa Purwodadi antara yang ada di data dengan yang sebenarnya ada di lapangan. Tahap orientasi bisa dikatakan sebagai tahap penyadaran, sebab pada tahap inilah diketahui potensi-potensi desa Purwodadi yang sebenarnya bisa dikembangkan.

#### 3. Penyusunan program/rencana kerja;

Program terpadu P2WKSS merupakan program yang dilaksanakan secara terpadu lintas sektor yang melibtakan banyak pihak terutama dari pihak pemerintah. P2WKSS merupakan program pemerintah yang dilaksanakan ditingkat Kabupaten/kota pada desa/kelurahan, tingkat provinsi, hingga tingkat nasional. Sehingga pemerintah memiliki peran yang besar dan dominan. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara diketahui bahwa dalam penyusunan program/rencana kerja ini dilakukan oleh masing-masing dinas yang memegang sektor di Program P2WKSS. Penyampaian program ini dilaksanakan oleh dinas terkait melalui pengurus/ketua sektor yang kemudian diteruskan oleh ketua kepada anggotanya. Hal ini berarti bahwa belum melibatkan peran/partisipasi masyarakat pada level formulasi, dimana menurut Sulistiyani (2017: 99) bahwa secara umum peran masyarakat dierikan dalam bentuk partisipasi pada level formulasi, implementasi, monitoring maupun evaluasi. Namun sejauh

ini pada Program P2WKSS, peran masyarakat Desa Purwodadi masih pada sebatas implementasi saja.

#### 4. Pendataan kader;

Pendataan kader juga merupakan tahap awal atau tahap persiapan sebelum dilaksanakannya program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi. Pada pendataan kader ini, yang menjadi kader P2WKSS adalah pengurus atau kader yang disesesuaikan kecocokannya antara di pokja PKK dengan di sektor P2WKSS. Hal ini dikarenakan kader PKK merupakan orang-orang yang sudah terlatih atau setengah terlatih sehingga tidak harus melatih dari awa.

#### 5. Pendataan warga binaan;

Pendataan warga binaan adalah dimana kader ataupun desa mendata masyarakat yang akan diikutsertakan menjadi warga binaan. Pada Program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi ini setiap sektor terdiri dari pengurus/kader dengan 10 (sepuluh) anggota yang nantinya akan dibina. Pada program terpadu P2WKSS, terdapat 12 sektor, dan setiap sektor beranggotakan 10 warga binaan dan beberapa kader. Sehingga pada program terpadu P2WKSS ini ada 120 orang yang terdiri dari perempuan/ibu-ibu yang dibina.

#### 6. Mengadakan penataran/pelatihan kader;

Pelatihan atau penataran kader disini lebih pada pelatihan secara langsung oleh dinas terkait kepada kader. Misalnya, berdasarkan hasil pemenilitian, yang telah dilakukan pada pelatihan/penataran kader ini

salah satunya adalah praktek mengurus jenazah yang dibina oleh Departemen Agama Kabupaten Magetan.

7. Mengadakan kursus keterampilan, penyuluhan maupun penataran bagi warga binaan;

Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan inti pada program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi. Banyak kegiatan kursus keterampilan ataupun penyuluhan yang diberikan kepada warga binaan, salah satunya keterampilan membuat tas dari bungkus kopi, dan keterampilan membuat kue. Menurut Sulistiyani (2017:83) tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Dengan adanya menyuluhan juga pemberian keterampilan ini, memberikan wawasan kepada masyarakat juga kecakapan akan keterampilan, sehingga masyarakat/warga binaan dapat berperan dalam pembangunan, sesuai dengan kemampuannya.

8. Pembinaan kepada kader dan kepada warga binaan;

Pada pembinaan kader dan warga binaan ini hampir sama dengan tahap sebelumnya yang sudah dibahas mengenai pelatihan/penataran kader dan penyuluhan serta kursus keterampilan warga binaan. Pada tahap ini kader dan masyarakat/warga binaan dibina oleh setiap dinas terkait yang sesuai dengan sektornya masing-masing. Misalnya dinas perindustrian, membina sektor perindustrian, dinas kesehatan

membina sektor kesehatan, dan begitupun lainnya. Tahap ini termasuk tahap transformasi kemampuanberupa wawasan dan keterampilan sebagaimana yang dikemukakan Sulistiyani (2017:83). Pada tahap ini juga dilakukannya peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-kecakapan yang membuat masyarakat/warga binaan dan kader lebih inisiatif dan inovatif untuk mengembangkan dirinya menuju kemandirian.

#### 9. Pemberian bantuan kepada warga binaan;

Ini merupakan tahap akhir dari kegatan-kegiatan pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS yang telah dilakukan di Desa Purwodadi. Pada tahap ini masyarakat/warga binaan diberikan bantuan berupa alat untuk memulai atau mengembangkan usaha ekonomi produktif rumahan. Dengan adanya pelatihan keterampilan dan juga pembinaan memberikan manfaat dan bekal untuk memulai usaha ataupun mengembangkannya bagi yang telah memiliki usaha. Salah satu bantuan yang diberikan adalah berupa panci untuk membuat kue. Meskipun ada penerima bantuan yang digantikan dengan orang lain (Ibu Yayuk digantikan Ibu Yamini), tapi dampak positifnya adalah yang belum memiliki usaha, dengan bantuan ini dapat memulai usahanya, seperti halnya Ibu Yamini.

#### 10. Evaluasi;

Tahap terakhir pada program terpadu P2WKSS adalah evaluasi. Evaluasi yang dimaksud disini berbeda dengan pengertian monitoring dan evaluasi pada umumnya. Program terpadu P2WKSS merupakan program yang dilombakan di tingkat Provinsi hingga tingkat Nasional. Pada tahun 2016, Desa Purwodadi mewakili Kabupaten Magetan lomba P2WKSS tersebut. Pada tahap ini pengurus P2WKSS melakukan pemaparan terkait pelaksanaan P2WKSS di Desa Purwodadi. Dari sini hasil pelaksanaan tersebut dievaluasi oleh tim penilai lomba P2WKSS di Tingkat Provinsi. Dari 6 Kabupaten/kota yang lolos ketingkat Provinsi diseleksi lagi untuk diambil satu Kabupaten/Kota yang terbaik dan lanjut dilombakan ditingkat Nasional. Sebelum evaluasi di tingkat Provinsi, dinas lintas sektor terutama dinas PPKBPPPA pun melakukan evaluasi terhadap program P2WKSS yang dilaksanakan di Desa Purwodadi. Namun, belum ada tindak lanjut dari evaluasi tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, tahap-tahap pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi Tahun 2016 sudah dilaksanakan semua. Namun pada tahaptahap tersebut belum seluruhnya dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat pada tahap penyusunan program/rencana kerja yang belum melibatkan partisipasi masyarakat dalam peran formulasi kebijakan, karena dinas yang berkaitan dengan sektor yang mentukan seperti apa kegiatan/program yang diberikan untuk pembinaan P2WKSS di Desa

Purwodadi. Sehingga peran masyarakat masih pada sebatas implementasi

Selain itu, ada tahap yang hampir sama yaitu pada tahap keenam, penataran/pelatihan kader; tahap ketujuh, mengadakan kursus keterampilan, penyuluhan maupun penataran bagi warga binaan; serta tahap kedelapan, pembinaan kepada kader dan kepada warga binaan. Pada tahap-tahap ini, kegiatan yang dilakukan hampir sama yaitu berupa penyuluhan, pelatihan keterampilan maupun pembinaan sehingga sebenarnya bisa dijadikan dalam satu tahap. Penataran dan pembinaan yang dilakukan kepada kader pun, pada kenyataannya bukan penataran khusus melainkan sama dengan pelatihan/praktek yang lain.

Pada tahap terakhir yaitu evaluasi, belum ada monitoring dan evaluasi dari dinas-dinas Kabupaten Magetan yang membina sektor-sektor di program terpadu P2WKSS Desa Purwodadi. Sulistiyani (2017:98) mengemukakan bahwa pemerintah sebaiknya juga menetapkan pola monitoring dan evaluasi yang jelas, dan berkelanjutan. Namun kenyataannya, Program Terpadu P2WKSS hingga saat ini masih kurang dalam hal monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi mempertahankan dimaksudkan untuk keberadaan program keberlangsungan kegiatannya. Monitoring dan evaluasi yang jelas baik dari pemerintah, masyarakat maupun swasta (pihak lain) dapat menjaga kualitas hasil dari suatu program terutama program pemberdayaan seperti P2WKSS ini. Monitoring dan evaluasi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar program tetap berjalan meskipun ada pergantian pemimpin (misal kepala desa, kepala dinas, atau kepala daerah). Selain itu dengan adanya monitoring dan evaluasi juga dapat diketahui apa yang menjadi kekurangan dari pelaksanaan program/kegiatan sebelumnya sehingga bisa diperbaiki pada pelaksanaan selanjutnya. Dan juga agar dapat mengetahui kebaikan atau keberhasilan yang sudah dicapai pada pelaksanaan program/kegiatan sebelumnya sehingga dapat dipertahankan selanjutnya.

Pada program terpadu P2WKS ini ada 10 (sepuluh) tahap yang dilakukan. Sedangkan, menurut Sulistiyani (2017:83) ada tiga tahap yang harus dilalui dalam pemberdayaan masyarakat yaitu tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan dan tahap peningkatan kemampuan intelektual. Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat, pada tahap ini aktor pemberdayaan berusaha untuk menciptakan prakondisi agar dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif (Sulistiyani, 2017:83).

Berdasarkan Buku Laporan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2016 dan penelitian yang telah dilakukan, tahap pertama ini dapat dilihat dari adanya kegiatan rapat koordinasi, kegiatan orientasi P2WKSS, Penyusunan program/rencana kerja, pendataan kader dan juga pendataan warga binaan. Kegiatan-kegiatan ini menjadi tahap awal sebelum dilaksanakannya

Program Terpadu P2WKSS. Dengan adanya rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa Purwodadi dapat diketahui apa saja potensi yang dimiliki di Desa Purwodadi yang kemudian ditindaklanjuti dengan orientasi P2WKSS dimana Pihak Pemerintah Kabupaten meninjau langsung ke Desa Purwodadi terkait potensi Desa. Dari situ dapat menjadi bekal bagi Pemerintah Kabupaten untuk menyiapkan fasilitas apa saja yang akan diberikan untuk melaksanakan Program Terpadu P2WKSS tersebut.

Tahap kedua, menurut Sulistiyani (2017:83) tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pebangunan. Sedangkan tahap ketiga merupakan tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan dengan tujuan membentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Sulistiyani, 2017:83). Dalam pelaksanaan program terpadu P2WKSS, Tahap transformasi kemampuan dan tahap peningkatan kemampuan intelektual menurut Sulistiyani ini berupa pengadaan penataran/pelatihan kader; pengadaan kursus keterampilan, penyuluhan maupun penataran bagi warga binaan; serta pembinaan kepada kader dan kepada warga binaan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS ini telah dilaksanakan semua. Tetapi pelaksanaannya belum maksimal pada penyusunan program

kerja karena belum mengikutsertakan masyarakat dalam formulasi kebijakan. pemberdayaan masyarakat, Padahal, pada formulasi (kebijakan) merupakan salah satu peran masyarakat. Namun begitu, menurut Sulistiyani (2017:99) pelibatan masyarakat dalam formulasi kebijakan ini bisa dilakukan dengan melihat profesionalisme, kompetensi di samping nilai kepentingan masyarakat terhadap program pemberdayaan. Formulasi kebijakan ini menjadi ruang bagi masyarakat yang berkompeten untuk meberikan sran, ide, maupun kritik terhadap program yang akan dilaksanakan oleh masyarakat bersama pihak lain, terutama pemerintah.

Selain itu juga masih kurangnya monitoring dan evaluasi. Padahal, dengan adanya monitoring dan evaluasi yang baik dapat menjaga kulitas pelaksanaan dan hasil program pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS ini. Selain itu dengan adanya monitoring dan evaluasi dapat diketahui apa yang menjadi kekurangan program yang harus diperbaiki dan apa saja kebaikan program yang perlu dipertahankan dalam pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya.

#### c. Hasil Pemberdayaan Perempuan melalui Program Terpadu P2WKSS

Menurut Hanindito dalam Listiyaningsih (2015:28), pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan perempuan dalam memperoleh akses dan kontrol terhadap semua sumber daya dalam seluruh aspek kehidupan. Konsep pemberdayaan dalam konteks kesetaraan gender, pada prinsipnya untuk membangun kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan diperlukan pemberdayaan bagi perempuan. Pada intinya, pembangunan pemberdayaan perempuan memiliki 2 (dua) tujuan menurut Adisasmita (2011:182) yaitu meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan kesetaraanan keadilan gender serta menigkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan mempertahankan nilai persatuan, kesatuan dan historis untuk melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Tujuan pembangunan pemberdayaan perempuan menurut Adisasmita ini sejalan dengan tujuan Program Terpadu P2WKSS yaitu untuk meningkatkan peranan perempuan dimana arahnya adalah mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, ada 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan Umum P2WKSS adalah meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. Sedangkan tujuan khusus P2WKSS yaitu:

#### 1. Meningkatkan status pendidikan perempuan;

Pada program terpadu P2WKSS banyak kegiatan yang dilakukan termasuk penyuluhan dan pelatihan. Namun tidak banyak kegiatan yang dilakukan pada sektor pendidikan, salah satunya adalah

Keaksaraan Fungsional (KF). KF ini dilakukan untuk mengurangi tingkat buta aksara di Desa Purwodadi sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa baca tulis. Sehingga meskipun tidak terlalu berpengaruh pada peningkatan status pendidikan masyarakat, namun setidaknya kegiatan KF ini bisa mengurangi buta aksara dan meningkatkan melek huruf di Desa Purwodadi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan pertama dari program terpadu P2WKSS ini tercapai.

 Meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap dan perilaku positif keluarga dan perempuan khususnya di berbagai bidang untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara kepada pengurus maupun masyarakat desa Purwodadi, dengan adanya program terpadu P2WKSS ini memberikan banyak manfaat terutama dalam hal pengetahuan dan keterampilan antara lain adalah: dengan adanya penyuluhan, sosialisasi, dan pelatihan keterampilan masyarakat lebih mengerti bagaimana pengemasan barang (packing) yang baik; meningkatkan keterampilan dalam bidang Teknologi Informasi; meningkatkan keterampilan seni karawitan; meningkatkan wawasan pengetahuan kesehatan (tumbuh kembang) anak; dan juga menambah keterampilan membuat kue. Selain manfaat pada pengetahuan dan keterampilan, dengan adanya P2WKSS ini juga meningkatkan sikap

positif karena adanya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tujuan P2WKSS dalam hal meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang positif ini dapat tercapai.

3. Meningkatkan kualitas pembinan terhadap anak dan remaja;

Peningkatan kualitas pembinaan terhadap anak dan remaja dapat diketahui dari adanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak dan remaja di Desa Purwodadi. Dengan adanya kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) dan juga Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) serta karang taruna, memberikan ruang bagi anak-anak dan remaja untuk lebih aktif. Peningkatan kualitas pembinaan ini dapat dilihat dari adanya pembinaan budidaya jamur yang baru-baru ini dilakukan oleh karang taruna Desa Purwodadi; adanya pembinaan dan penyuluhan bahaya narkoba hingga terbentuk tim penggiat narkoba dan tidak ada masyarakat desa purowdadi baik dewasa maupun remaja yang terlibat kasus narkoba pada tahun 2016. Ini dapat menjadi bukti bahwa melui program terpadu P2WKSS ini dapat meningkatkan kualitas pembinaan terhadap anak dan remaja.

- 4. Meningkatkan status kesehatan dan kesejahteraan keluarga;
  - a) kesehatan

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2017) ada 12 indikator sebuah keluarga dapat dikatakan sehat, yaitu:

BRAWIJAY

- 1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)
- 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan
- 3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
- 4) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif
- 5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan
- 6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar
- 7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
- 8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
- 9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok
- 10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- 11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih
- 12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

Berdasarkan Buku Laporan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2016, capaian Rumah Tangga Sehat di Desa Purwodadi adalah 54,4 %. Namun, capaian ini hanya memenuhi 7 (tujuh) dari 12 (duabelas) indikator yang ada yaitu keluarga mengikuti KB, persalinan di fasilitas kesehatan, ASI eksklusif, pemantauan pertumbuhan balita, keluarga tidak merokok, air bersih dan jamban sehat. Selain itu, peserta KB di Desa Purwodadi tahun 2016 justru megalami penurunan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk beberapa indikator kesehatan telah dipenuhi, tetapi ada beberapa yang belum tercapai. Oleh karena itu pada program P2WKSS ini belum sepenuhnya dapat mewujudkan tujuan keluarga sehat.

# BRAWIJAY/

#### b) Kesejahteraan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan, dapat diketahui bahwa dengan adanya Program terpadu P2WKSS, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian keluarga. Hal ini dikarekan banyak pelatihan keterampilan yang diberikan kepada masyarakat/warga binaan dan pembinaan pada sektor ekonomi. Secara umum, masyarakat desa Purwodadi dapat dikatakan sudah sejahtera. Hal ini dilihat dari data klasifikasi kesehateraan penduduk Desa Purwodadi bahwa hanya ada 11 KK yang tergolong Keluarga Pra Sejahtera, sementara 243 KK tergolong Keluarga Sejahtera I, 223 KK tergolong Keluarga Sejahtera II, 222 KK tergolong Keluarga Sejahtera III dan 33 KK merupakan Kaluarga Sejahtera III Plus. Dimana Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga tetapi belum sepenuhnya. Keluarga Sejahtera I adalah yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam keluarga, keluarga sejahtera II adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan psikologis, keluarga sejahtera III adalah keluarga yang sudah memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis dan kebutuhan pengembangan keluarga. Keluarga sejahtera III Plus adalah yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis, kebutuhan pengembangan keluarga dan kebutuhan aktualisasi diri.

5. Meningkatkan kesadaran akan pelestarian lingkungan hidup;

Program terpadu P2WKSS merupakan program yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kesadaran akan pelesatarian lingkungan hidup. Pada pelaksanaan P2WKSS di Desa purwodadi tahun 2016, pelestarian lingkungan hidup ini dilakukan dengan menanam pohon-pohon berbuah seperti kelengkeng dan juga menanam sayuran dengan memanfaatkan pekarangan rumah warga. Namun setelah berakhirnya lomba program terpadu P2WKSS justru banyak yang kurang memperhatikan lingkungan hidup di pekarangan rumah. Namun berdasarkan observasi/penelitian di lapangan, desa Purwodadi merupakan salah satu desa dengan lingkungan yang bersih (tidak kumuh). Hal ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungannya.

6. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara;

Dengan adanya program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi ini dapat meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi masyarakat. hal ini dapat dilihat dari Buku Laporan Program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2016, bahwa di Desa Purwodadi tidak ada kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, tidak ada kriminalitas, dan tidak ada warga yang terkena narkoba. Hal ini tidak terlepas dari berbagai penyuluhan yang telah dilakukan di Desa Purwodadi melalui program terpadu P2WKSS. Dengan adanya penyuluhan tersebut dapat meningkatkan kesadaran

masyarakat dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Selian itu, dengan adanya pelatihan memainkan alat music di Desa purwodadi sehingga masyarakat sadar untuk melestarikan seni dan budaya bangsa.

#### 7. Memberdayakan kaum lansia;

Pada program terpadu P2WKSS ada banyak kegiatan yang melibatkan lansia, antara lain BKL dan Posyandu Lansia, selain itu juga ada kegiatan pengajian dan yasinan rutin yang juga mengikutsertakan lansia, serta kegiatan senam lansia yang dilakukan setiap minggu. Berdasarkan observasi/penelitian di lapangan, keikursertaan masyarakat lansia pada posyandu lansia cukup tinggi, untuk sekali kegiatan posyandu di satu tempat hingga 92 peserta yang hadir. Hal ini menunjukkan bahwa program P2WKSS ini dapat memberdayakan kaum lansia dengan kegiatan-kegiatan tersebut.

#### 8. Meningkatkan perekonomian lokal.

Salah satu kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari perekonomiannya. Program terpadu P2WKSS ini merupakan salah satu program yang menekankan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan ekonomi dalam keluarga dan masyarakat. Dengan adanya program terpadu ini dapat dikatakan meningkatkan perekonomian lokal di Desa Purwodadi. Di Desa Purwodadi juga dibentuk kelompok usaha untukmeningkatkan usaha-usaha yang dikelola perempuan, sehingga memudahkan untuk melakukan pembinaan kepada pengusaha rumahan

ini. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa masyarakat desa Purwodadi yang memiliki usaha rumahan, dapat diketahui bahwa dengan adanya program P2WKSS dan pelatihan yang dilakukan dapat memberi kesempatan masyarakat untuk memulai dan juga meningkatkan usaha sehingga mendapatkan penghasilan yang dapat membantu suami. Misalnya Ibu Yamini yang memulai usaha kue basah dan ayam goreng *crispy*, Ibu retno usaha kue basah dan catering, dan Ibu Yayuk usaha kue basah.

Berdasarkan uraian tersebut, dari 8 (delapan) tujuan khusus yang ingin dicapai program terpadu P2WKSS, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian program P2WKSS sesuai tujuan khusus

| _  |                      |                                      |
|----|----------------------|--------------------------------------|
| No | Tujuan               | Keterangan capaian                   |
| 1  | Meningkatkan status  | Tercapai, meskipun dengan pendidikan |
|    | pendidikan           | informal, dilihat dari adanya        |
|    | perempuan            | peningkatan melek huruf melalui KF   |
|    |                      | (Keaksaraan Fungsional)              |
| 2  | Menigkatkan          | Tercapai, dilihat dari peningkatan   |
|    | pengetahuan,         | pengetahuan masyarakat terutama      |
|    | keterampilan serta   | perempuan dalam teknologi &          |
|    | sikap dan perilaku   | informasi (KIM), pengetahuan         |
|    | positif keluarga dan | kesehatan (tumbuh kembang anak),     |
|    | perempuan            | keterampilan membuat kue, dan        |
|    | khususnya di         | lainnya.                             |
|    | berbagai bidang      |                                      |
|    | untuk meningkatkan   |                                      |
|    | kualitas hidup dan   |                                      |
|    | kehidupan keluarga.  |                                      |
| 3  | Meningkatkan         | Tercapai, dilihat dari adanya        |
|    | kualitas pembinaan   | pembinaan BKR, PIK-R dankarang       |
|    | terhadap anak dan    | taruna yang semakin produktif dengan |
|    | remaja               | membudidaya jamur, terbentuk         |
|    |                      | penggiat anti narkoba bersama dengan |
|    |                      | tokoh masyarakat,                    |

| No | Tujuan              | Keterangan capaian                      |
|----|---------------------|---|
| 4  | Meningkatkan status | Tercapai, tapi belum maksimal. Dilihat  |
|    | kesehatan dan       | dari baru 7 (tujuh) dari 12 (duabelas)  |
|    | kesejahteraan       | indikator kesehatan yang tercapai.      |
|    | keluarga            | Sedangkan kesejahteraan masyarakat      |
|    | 8                   | tercapai, dilihat dari data klasifikasi |
|    |                     | kesejahteraan penduduk Desa             |
|    |                     | Purwodadi, hanya ada 11 KK Keluarga     |
|    |                     | Pra Sejahtera, selebihnya Sehjatera I   |
|    |                     | hingga III plus.                        |
| 5  | Meningkatkan        | Tercapai tapi belum maksimal. Dilihat   |
|    | kesadaran akan      | dari kegiatan bersih desa dan warga     |
|    | pelestarian         | yang menjaga kebersihan lingkungan.     |
|    | lingkungan hidup    | Kurang maksimal pada pelestarian        |
|    | CITAD               | tanaman di pekarangan rumah karena      |
|    | 0.0                 | semakin sedikit yang menerapkannya.     |
| 6  | Meningkatkan        | Tercapai, dilihat dari tidak adanya     |
|    | kesadaran berbangsa | pelanggaran hukum sperti KDRT,          |
|    | dan bernegara       | narkoba, kriminalitas. Dan masyarakat   |
|    |                     | sadar untuk melestarikan seni budaya    |
|    |                     | bangsa yaitu karawitan                  |
| 7  | Memberdayakan       | Tercapai, dilihat dari keikutsertaan    |
|    | kaum lansia         | lansia dalam kegiatan Posyandu          |
|    |                     | Lansia, BKL, Pengajian/yasinan,         |
|    |                     | senam lansia.                           |
| 8  | Meningkatkan        | Tercapai, dilihat dari adanya           |
|    | perekonomian lokal  | perempuan yang memulai usaha baru,      |
|    |                     | terbentuknya kelompok usaha,            |
|    |                     | penghasilan masyarakat meningkat.       |

Sumber: diolah penulis berdasarkan analisis

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan P2WKSS pada pelaksanaan di Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2016 telah tercapai. Namun ada beberapa tujuan yang pencapaiannya masih kurang atau belum maksimal.

Menurut Listiyaningsih (2015:28) pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan perempuan dalam memperoleh akses dan kontrol terhadap semua sumber daya dalam seluruh aspek kehidupan. Menurut Katjasungkana dalam Nugroho (2008) ada empat indikator

pemberdayaan perempuan, yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Menurut Katjasungkana dalam Nugroho (2008) akses adalah kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan. Pada program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi, persamaan akses antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari adanya akses peningkatan kualitas pendidikan bagi perempuan, akses kesehatan, akses informasi yang sama antara laki-laki dan perempuan dan akses sumber daya yang ada di lingkungan Desa Purwodadi untuk meningkatkan perekonomian lokal. Sehingga, dengan adanya pemberdayaan perempuan, timbul persamaan akses sumber daya-sumber daya di lingkungan bagi perempuan dan laki-laki sehingga perempuan juga dapat berperan dalam pembangunan.

Dalam pemberdayaan perempuan, partisipasi adalah keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas (Katjasungkana dalam Nugroho, 2008). Partisipasi masyarakat perempuan di Desa Purwodadi dapat dilihat dari keikutsertaan menjadi tim pengendali P2WKSS Desa Purwodadi. Partisipasi perempuan dalam hal mendayagunakan sumber daya dapat dilihat dari usaha rumahan yang dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari usaha perempuan untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga melalui pengelolaan ekonomi lokal dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa Purwodadi. Selain ikut berpartisipasi menggunakan sumber daya yang

BRAWIJAY

ada, perempuan juga ikut serta dalam pelestarian lingkungan hidup yang nantinya akan dikelola/diakses.

Katjasungkana dalam Nugroho (2008) kontrol diartikan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber tersebut. Dengan usaha-usaha rumahan yang dikelola perempuan, secara tidak langsung perempuan juga melakukan kontrol terhadap pemanfaatan sumber daya dengan menentukan seberapa banyak sumber daya yang akan ia gunakan untuk usahanya, bagaimana ia menggunakannya, dan mengapa sumber daya itu yang ia gunakan. Keputusan-keputusan seperti itu juga merupakan suatu kontrol.

Katjasungkana dalam Nugroho (2008) mengartikan manfaat bahwa laki-laki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara sama dan setara. Di Desa Purwodadi manfaat sumber daya dikelola dan dinikmati bersama, tidak hanya untuk perempun saja atau laki-laki saja. Manfaat pembangunan pun begitu, perempuan dan laki-laki sama-sama mendapatkan manfaat baik di sektor pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial, maupun budaya. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan Posyandu lansia yang tidak hanya bagi perempuan tapi juga laki-laki, program KB untuk perempuan dan laki-laki, kegiatan seni karawitan, dan lain-lain.

Berdasarkan analisis dan penjelasan tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa program terpadu P2WKSS dapat mencapai tujuannya secara umum yaitu mewujdukan keluarga sehat dan sejahtera. Selain itu dengan adanya pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS ini dapat memberikan akses, partisipasi, kontrol yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mendayagunaakan sumberdaya dan juga mendapatkan banyak manfaat dari pengelolaan sumber daya dan dengan adanya pembangunan. Dengan pembangnan setidaknya masyarakat baik perempuan dan laki-laki bisa menikmatai pendidikan, kesehatan, dan juga kemajuan teknologi informasi.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Purwodadi.

#### a. Faktor Pendukung

#### 1. Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu aktor dalam pemberdayaan masyarakat. Namun keberadaan masyarakat tidak hanya sebagai objek saja, melainkan juga sebagai subjek yang secara langsung turut menentukan apa-apa yang dilakukan dalam pemberdayaan tersebut. Menurut Sulistiyani (2017:97) sebagai aktor dalam pemberdayaan

masyarakat memiliki peran partisipasi dalam formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, masyarakat desa Purwodadi khususnya perempuan memiliki partisipasi yang baik dalam kegiatan program terpadu P2WKSS. Masyarakat Desa Purwodadi juga telah memiliki kesadaran dan keinginan untuk memajukan Desanya sehingga tidak sulit untuk mengajak masyarakat terutama perempuan untuk turut serta membangunan dan memajukan Desa. Hal ini menjadi salah satu pendukung bagi terlaksananya setiap kegiatan atau program yang dilaksanakan di Desa Purwodadi. Tanpa adanya partisipasi dan peran aktif masyarakat, maka akan sulit suatu program atau kegatan tersebut dapat dilaksanakan.

 Banyak Kegiatan perempuan yang sudah ada sebelum program terpadu P2WKSS

Desa Purwodadi merupakan salah satu Desa yang memiliki banyak kegiatan perempuan. Sebelum adanya program terpadu P2WKSS pun, Desa Purwodadi telah aktif melaksanakan beberapa kegiatan perempuan seperti PKK, Koperasi Wanita, BKB, BKR, BKL, Posyandu, dan lain sebagainya. Selain itu juga karena Kepala Desa Purwodadi adalah perempuan dan sangat mendukung berbagai kegiatan-kegiatan yang melibatkan perempuan di Desanya. Dengan adanya program terpadu P2WKSS ini semakin menghidupkan dan

BRAWIJAY

memperbaiki kegiatan-kegiatan perempuan yang sebelumnya sudah ada tersebut.

#### 3. Dasar Hukum

Dasar hukum merupakan salah satu hal yang dapat mendukung pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Tanpa ada dasar hukum yang kuat akan sulita menjalankan dan mempertahankan pelaksanaan suatu program. Dalam pelaksanaan program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi ini salah satunya didasari oleh keputusan Bupati Kabupaten Magetan yang menetapkan Desa Purwodad sebagai lokasi penyelenggaraan Program Terpadu P2WKSS tahun 2016. Keputusan Bupati tersebut diteruskan dengan dibuatnya Kaputusan Kecamat Barat dan Keputusan Kepala Desa Purwodadi untuk melaksanakan program ini. Selain itu, di Desa Purwodadi sendiri telah ada beberapa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

#### b. Faktor Penghambat

#### 1. Masyarakat

Masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan. Entusias dan semangat masyarakat bisa menjadi salah satu pendukung suatu kegiatan, namun juga dapat menjadi penghambat. Menurut sulistiyani (2017:99) secara umum peran masyarakat diberikan dalam bentuk partisipasi baik pada level formulasi, implementasi, monitoring maupun evaluasi. Beberapa

masyarakat sudah mampu memposisikan dirinya sebagai subjek pemberdayaan, namun beberapa yang lain belum dapat melakukannya bahkan unuk implementasi saja kurang. Disinilah perlu adanya peran pemerintah untuk memberdayakan masyarakat agar mampu berpartisipasi di masyarakat.

#### 2. Kurangnya monitoring dan evaluasi kegiatan

Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi adalah kurangnya monitoring dan evaluasi pada setiap kegiatan, baik dari Desa maupun dari dinas yang terlibat dalam program tersebut. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mempertahankan keberadaan program dan keberlangsungan kegiatannya. Monitoring dan evaluasi yang jelas baik dari pemerintah, masyarakat maupun swasta (pihak lain) dapat menjaga kualitas hasil dari suatu program terutama program pemberdayaan seperti P2WKSS ini.

Monitoring dan evaluasi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar program tetap berjalan meskipun ada pergantian pemimpin (misal kepala desa, kepala dinas, atau kepala daerah). Dengan adanya monitoring dan evaluasi dapat diketahui apa saja kendala yang dihadapi saat melaksanakan kegaitan tersebut, juga dapat diketahui apa saja yang membuat kegiatan berjalan dengan baik, sehingga apabila akan melaksanakan kegiatan selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan serta rekomendasi. Tanpa adanya

monitoring dan evaluasi ini, sulit untuk mengetahui apaka kegiatan yang telah dilaksnakan tersebut sesuai dengan tujuan, sasaran dan manfaat yang diharapkan.

#### 3. Beberapa Kegiatan vakum

Di Desa Purwodadi ada beberapa kegiatan dari program terpadu P2WKSS yang kini vakum atau belum dilaksanakan kembali. Penyebab vakumnya kegiatan ini salah satunya adalah karena saat ini pemerintah desa Purwodadi lebih mengutakaman pembangunan fisik baik sarana maupun prasarananya. Sehingga volume kegiatan bagi masyarakatpun berkurang, terutama untuk kegitaan yang membutuhkan dana rumayan besar. Bersadarkan hasil penelitian di lapangan pada tahun 2016 hingga 2017 masih banyak kegiatan yang dilakukan termasuk berbagai penyuluhan dan pelatihan keterampilan. Namun, pada tahun 2018 ini hanya beberapa kegiatan saja yang dianggarkan pada APBDesa, yaitu pola asuh anak, karang taruna dan penyuluhan PIK-R. Lebih dari itu untuk kegiatan yang sudah terjadwal rutin juga masih dilaksanakan seperti Posyandu balita, Posyandu lansia dan Posbindu PTM, maupun Koperasi Wanita. Dan berdasarkan (observasi) penelitian di lapangan, juga masih ada kegiatan penyuluhan DBD, penyuluhan ibu hamil yang dilakukan.

#### 4. Kendala Waktu Pembinaan dan Kegiatan

Waktu menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki kesibukan

yang berbeda-beda sehingga tidak mudah mengumpulkan masyarakat untuk berbagi kegiatan. Terlebih di Desa Purwodadi mayoritas masyarakatnya adalah sebagai pedagang, sehingga banyak yang bekerja di siang hari, sementara hampir semua kegiatan dilaksanakan pada waktu siang hari, seperti kegiatan Pembinaan dari dinas, Bina Keluarga Balita, dan kelompok Usaha Bersama (KUB). Untuk kegiatan KUB "Abon asli" kendala waktu ada pada Ibu Suci selaku penggerak KUB yang juga merupakan Kepala Desa sehingga waktu menjadi terbatas ketika ada kegiatan-kegiatan Desa.

#### 5. Keterlambatan kedatangan saat pembinaan

Dalam pelaksanaan program terpadu di Desa Purwodadi, keterlambatan kedatangan masyarakat saat pembinaan juga menjadi salah satu faktor penghambat. Kurangnya kedisiplinan masyarakat seringkali menghambat jalnnya kegiatan karena tidak sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS dapat mencapai tujuannya, namun belum maksimal. Berdasarkan fokus yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Aktor-aktor yang terlibat dalam pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS adalah pemerintah Kabupaten Magetan, Pemerintah Kecamatan Barat, Pemerintah Desa Purwodadi dan Masyarakat Desa Purwodadi. Namun belum ada keterlibatan pihak swasta dalam pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi ini.
- 2. Tahap-tahap pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS ada 10 (sepuluh). Tahap-tahap tersebut sudah dilaksanakan semua, namun balum maksimal, karena pada tahap penyusunan program kerja belum mengikutsertakan masyarakat, termasuk dalam formulasi kebijakan. Selain itu ada 3 tahap yang hampir sama yang sebenarnya bisa dijadikan satu yaitu tahap penataran/pelatihan kader, mengadakan kursus keterampilan, penyuluhan maupun penataran bagi warga binaan, pembinaan kepada kader dan kepada warga binaan. Dan tahap evaluasi masih kurang karena belum melaksanakan evaluasi sejara jelas. Tahap pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS sesuai dengan teori Sulistiyani yaitu tahap

BRAWIJAYA

- penyadaran dan pembentukan perilaku, tahap transformasi kemampuan dan tahap peningkatan kemampuan intelektual.
- 3. Hasil pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi dapat mencapai tujuan P2WKSS, yaitu peningkatan status pendidikan perempuan; meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap dan perilaku positif; meningkatkan kualitas pembinaan terhadap anak dan remaja; meningkatkan status kesehatan dan kesejahteraan keluarga; meningkatkan kesadaran pelestarian lingkungan hidup; meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara; memberdayakan kaum lansia; dan meningkatkan perekonomian lokal. Namun dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut belum maksimal pada peningkatan kesehatan dan kesadaran pelestarian lingkungan hidup.
- 4. Faktor pendukung pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi adalah masyarakat, banyaknya kegiatan perempuan yang sudah ada sebelum program terpadu P2WKSS, dan dasar hukum.
- 5. Faktor penghambat pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi adalah masyarakat, kurangnya monitoring dan evaluasi, beberapa kegiatan vakum, kendala waktu saat pembinaan dan kegiatan, serta keterlambatan kedatangan saat pembinaan.

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut, dari hasil penelitian ini ada beberapa saran atau rekomendasi yang dapat peneliti berikan, antara lain sebagai berikut:

- Pelaksanaan program terpadu P2WKSS sebaiknya melibatkan pihak swasta dengan menawarkan kerjasama sebagai salah satu bentuk CSR (Corporate Social Responsibility). Dengan bekerjasama dengan pihak swasta dapat membantu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat baik dalam hal dana, maupun tenaga ahli/terampil untuk edukasi masyarakat.
- 2. Mengikutsertakan masyarakat dalam tahap penyusunan program kerja dan formulasi kebijakan sehingga kegiatan yang akan dilakukan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat karena masyarakat sendiri lah yang tahu apa yang mereka butuhkan. Dan untuk tahap yang hampir sama sebaiknya dijadikan satu untuk efisiensi program.
- 3. Menigkatkan status kesehatan keluarga yang belum dilaksanakan, sesuai dengan indikator kesehatan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Sedangkan untuk mewujudkan tujuan kesadaran pelestarian lingkungan hidup sebaiknya dijalankan kembali dengan menghimbau masyarakat memanfaatkan pekerangan rumah untuk bertanam dan membuat gerakan menanam pohon dan menjaga kebersihan desa.
- 4. Untuk beberapa faktor penghambat dapat diminimalisir dengan:

- a. Masyarakat: untuk meningkatkan antusias masyarakat perlu adanya pendekatan terus menerus dengan masyarakat, memotivasi dan mengajak masyarakat untuk turut serta dala kegiatan desa.
- b. Kurangnya monitoring dan evaluasi: dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi, perlu adanya monitoring dan evaluasi yang jelas untuk mempertahankan keberadaan program dan keberlangsungan kegiatannya. Selain itu juga agar dapat diketahu apa yang menjadai kekurangan pelaksanaan kegiatan ynag perlu diperbaiki dan apa saja kebaikan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang bisa diertahankan untuk pelaksanaan selanjutnya.
- c. Beberapa kegiatan vakum: menghidupkan kembali kegiatan yang vakum agar kegiatan yang pernah ada tidak berhenti begitu saja. Sehingga program dan kegiatan yang sudah ada dapat berkelanjutan.
- d. Kendala waktu saat pembinaan dan kegiatan: kegiatan pembinaan dan kegiatan sebaiknya disesuaikan dengan waktu luang warga binaan atau ketika hari libur.
- e. Keterlambatan kedatangan saat pembinaan: sebaiknya mengingatkan lagi kepada warga binaan agar datang tepat waktu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali, Faried. 2015. *Teori Dan Konsep Administrasi: Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. 2013. Kabupaten Magetan. Diakses pada 02 Maret 2018. Melalui: <a href="http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-magetan-2013.pdf">http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-magetan-2013.pdf</a>
- Bhanavi, Kum-Kum. Women, Culture & Development. Diakses pada 21 Desember 2017. Melalui: <a href="http://www.global.ucsb.edu/undergrad/programs/wcd.">http://www.global.ucsb.edu/undergrad/programs/wcd.</a>
- BKKBN. 2011. Batasan dan Pengertian MDK. Diakses pada 26 Mei 2018. Melalui: http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2017. Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga. Diakses pada 26 Mei 2018. Melalui: <a href="http://www.depkes.go.id/article/view/17070700004/program-indonesia-sehat-dengan-pendekatan-keluarga.html">http://www.depkes.go.id/article/view/17070700004/program-indonesia-sehat-dengan-pendekatan-keluarga.html</a>.
- Desa purwodadi. 2016. Laporan program Terpadu P2WKSS Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2016. Desa Purwodadi.
- Desa Purwodadi. 2016. *Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Dalam Mendukung Progrma Terpadu P2WKSS*. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2017 dari <a href="http://purwodadi.magetan.go.id/2016/08/21/pelaksanaan-10-program-pokok-pkk-dalam-mendukung-program-terpadu-p2w-kss/">http://purwodadi.magetan.go.id/2016/08/21/pelaksanaan-10-program-pokok-pkk-dalam-mendukung-program-terpadu-p2w-kss/</a>.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. 2017. Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Magetan Tahun 2017. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2012. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP). Jakarta: Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016. Jakarta: Lintas Khatulistiwa.
- Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/80/Kept./403.013/2016 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Pengendali Kegiatan Program Terpadu

- Peningkatan perenan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Kabupaten Magetan Tahun 2016.
- Keputusan Camat Barat Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Penylenggaraan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Kecmatan Barat Tahun 2016.
- Keputusan Kepala Desa Purwodadi Kecamatan Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Pengendali Kegiatan Program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Desa pUrwodadi Tahun 2016.
- Listyaningsih. 2014. Administrasi Pembangunan: Pendekatan Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: Graha ilmu.
- \_\_\_\_\_. 2015. Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendidikan Sadar Gender di Kelurahan Wirobrajan Kota Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Miles, Mattew B., Huberman, A. Michael., Saldana, Johnny. 2014. *Qualitative data Analysis: a Methods Sourcebook*. 3<sup>rd</sup> edition. United States Of America: SAGE Publications, Inc.
- Moleong, Lexi J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufidah. 2009. Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan: Pendekatan Islam, Strukturasi, & Konstruksi Sosial. Malang: UIN-Malang Press.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Paramita, Risa, 2016. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Gerakan Membangun Masyarakat Sehat (Gerbangmas Siaga) Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi Pada Posyandu Di Keluarahan Ditrotunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan.

- Peraturan Camat Barat Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Tim Pengendali Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Kecamatan Barat tahun 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera Di Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasinoal (RPJMN) 2015-2019.
- Remiswal. 2013. *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riggs, Fred W. 2000. Administrasi Pembangunan: Batas-Batas, Strategi Pembangunan Kebijakan Dan Pembaharuan Administrasi. Dialihbahasakan oleh Luqman Hakim. Jakarta: Rajawali.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Administrasi Pembangunan: Konsep Dimensi, Dan Strateginya*. Edisi kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetomo. 2012. *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2017. *Kemitraan dan odel-Model Pemberdayaan*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gava Media.
- Syafri, Wirman. 2012. Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta: Erlangga.
- Theresia, Aprilia, et.al. 2015. Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2015. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Trisnawati, Tri Adinda. 2016. Pemberdayaan kelompok wanita tani (KWT) sebagai wujud kegiatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) (Studi kasus di Desa

BRAWIJAYA

*Duwet Kecamatan Wates Kabupaten Kediri*). Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.



#### **LAMPIRAN**

#### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

#### A. Kepala Bidang PPPA Dinas PPKBPPPA Kabupaten Magetan

- 1. Apa yang membedakan program P2WKSS dengan program/kegiatan pemberdayaan perempuan yang lain?
- 2. Apakah perbedaan P2WKSS dengan PKK?
- 3. Sejak Kapan P2WKSS diterapkan di Magetan? dan Desa mana saja sudah menerapkan?
- 4. Kenapa Memilih Purwodadi sebagai Desa sasaran P2WKSS?
- 5. Program P2WKSS merupakan program yang dilombakan, apakah masih relevan dilaksanakan kegiatannya meskipun sudah tidak ada perlombaan? Apakah konsisten dilaksanakan baik ada atau tidak ada perlombaan?
- 6. Apakah yang menjadi indikator yang menyatakan program tersebut berhasil?
- 7. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi?

#### B. Kepala Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan

- 1. Apa yang memotivasi Ibu mengadakan kegiatan-kegiatan perempuan termasuk P2WKSS?
- 2. Apa yang membedakan P2WKSS dengan PKK?
- 3. Apakah kegiatan-kegiatannya berjalan berkesinambungan?
- 4. Siapa saja aktor yang terlibat dalam program terpadu P2WKSS Desa Purwodadi?
- 5. Bagaimana tahap-tahap pemberdayaan perempuan melalui P2WKSS desa Purwodadi?
- 6. Bagaimana hasil pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi?
- 7. Apa saja faktor pendukung dan penghambat program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi?

#### C. Sekretaris Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan

- 1. Apakah kegiatan-kegitaan dari Program P2WKSS di Desa Purwodadi masih berjalan berkesinambungan sampai sekarang?
- 2. Bagaimana kondisi perempuan di Desa Purwodadi sebelum dan sesudah adanya P2WKSS? Apakah keberdayaan perempuan meningkat?
- 3. Bagaimana tahap-tahap pemberdayan perempuan melalui P2WKSS? Bagaimana prosesnya sampai sekarang banyak kegiatan perempuan di Desa Purwodadi?
- 4. Adakah monitoring dan evaluasi dari program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi?
- 5. Siapa saja yang terlibat dalam program P2WKSS? Apakah pemerintah saja atau ada swasta?

BRAWIJAY.

6. Apasaja faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan perempuan melalui P2WKSS?

#### D. Pengurus P2WKSS Desa Purwodadi

- 1. Apakah kegiatan-kegiatan P2WKSS masih berjalan berkesinambungan?
- 2. Apakah ada monitoring dan evaluasi dari setiap kegiatan P2WKSS?
- 3. Apakah keunggulan program P2WKSS?
- 4. Siapa saja pihak yang terlibat program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi?
- 5. Bagaimana tahap-tahap pemberdayaan perempuan melalui P2WKSS desa Purwodadi?
- 6. Bagaimana hasil pemberdayaan perempuan melalui program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi?
- 7. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi?

#### E. Masyarakat Perempuan Desa Purwodadi

- 1. Apakah tahu pernah ada program terpadu P2WKSS di Desa Purwodadi?
- 2. Programnya seperti apa?
- 3. Siapa saja yang terlibat dalam program terpadu P2WKSS?
- 4. Apa saja manfaat yang diperoleh dari program terpadu P2WKSS?
- 5. Apakah program terpadu P2WKSS dapat memberdayakan/meningkatkan peran wanita?
- 6. Apa saja Faktor pendukung dan penghambat program terpadu P2WKSS?

### Lampiran 2. Dokumentasi





Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)



Pelatihan pengurusan jenazah



Kegiatan Yasinan Ibu-Ibu



Bina Keluarga Remaja (BKR) pada karang taruna



Wawancara dengan Ibu Mulyatiningsih, Sekdes Purwodadi



Wawancara dengan ibu Muryani, Pengurus P2WKSS dan Kasie Pemerintahan





Wawancara dengan Ibu Endang Azis, Kabid PPPA Dinas PPKBPPPA Kab. Magetan

Wawancara dengan Ibu Suci Minarni, Kepala Desa Purwodadi





Wawancara dengan Ibu Yayuk, masyarakat Desa Purwodadi

Wawancara dengan Ibu Retno, masyarakat Desa Purwodadi

SALINAN



BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/79/Kept./403.013/2016 TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENYELENGGARAAN PROCRAM TERPADU
PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN
SEJAHTERA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

#### BUPATI MAGETAN.

- Menimbang :a. bahwa peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera merupakan program terpadu yang perlu dilaksanakan setiap tahun:
  - b. bahwa guna kelancaran dan keberhasilan program terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Lokasi Penyelenggaraan Frogram Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Kabupaten Magetan Tahun 2016.
- Mengingat
- :1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

BRAWIJAYA

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387). sebagaimana melah disabah dengan Undaera Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2004 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 57).

SALINAN



#### KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/80/Kept./403.013/2016 TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM PENGENDALI KEGIATAN P.ROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

#### BUPATI MAGETAN.

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, komitmen, fasilitasi dan advokasi dalam pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS), maka perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Pengendali Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Kabupaten Magetan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Mengingat

- Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277),
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Fepublik 'ndonesia Nomor 3475).

**BRAWIJAYA** 

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2004 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 57).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Membentuk Tim Pembina dan Tim Pengendali Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) Kabupaten Magetan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

#### **KEDUA**

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- I. Tim Pembina P2W-KSS mempunyai tugas :
  - a. menyusun Program Kegiatan P2W-KSS di masing-masing dinas lintas sektor;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan dinas lintas sektor dalam rangka pelaksanaan P2W-KSS;
  - melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi program P2W-KSS;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan program P2W-KSS kepada Bupati Magetan.
- II. Tim Pengendali P2W KSS mempunyai tugas :
  - a. melal:sanakan p.ogram kegiatan P2W-KSS di kecamatan dan desa sesuai program masing-masing dinas lintas sektor;
  - memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pelaksanaan kegiatan kepada kader-kader P2W-KSS kecamatan dan desa;
  - melaporkan hasil kegiatan Program P2W-KSS kepada tim pembina masing-masing dinas lintas sektor.
- III. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Desa mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan koordinasi program kegiatan dinas lintas sektor dan organisasi masyarakat;
  - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan program terpadu P2W-KSS di desa.

**KETIGA** 

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini inulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 16 Maret 2016

BUPATI MAGETAN, TTD SUMANTRI

Haman sesuai dengan aslinya KEPATA BAGIAN HUKUM

SUCLESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
(NEP. 196808)3 199503 2 002

3

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/80/Kept./403.013/2016

TANGGAL: 16 Maret 2016

# SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA KEGIATAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2W-KSS) KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS   |
|-----|-------------------|---|
| 1   | 2                 | 3   |
| 1.  | Pelindung         | Bupati Magetan  |
| 2.  | Pembina           | Wakil Bupati Magetan  |
| 3.  | Ketua             | Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan   |
|     | Wakil Ketua I     | Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dar                                     |
|     |                   | Keluarga Berencana Kabupaten Magetan  |
|     | Wakil Ketua II    | Kepala Badan Perencanaan Pembangunar  |
|     |                   | Daerah Kabupaten Magetan  |
|     | Wakil Ketua III   | Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan                                   |
|     | Wakil Ketua IV    | Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah                                      |
|     |                   | Kabupaten Magetan   |
| 4.  | Sekretaris        | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada                                   |
|     |                   | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga                                   |
|     |                   | Berencana Kabupaten Magetan   |
| 5.  | Anggota           | 1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Magetan                                 |
| 1   |                   | 2. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan                                    |
|     |                   | Kabupaten Magetan   |
|     |                   | 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten  |
|     |                   | Magetan   |
|     |                   | 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan                                 |
|     |                   | 5. Kepala Dinas Perindustrian dan   |
|     |                   | Perdagangan Kabupaten Magetan   |
|     |                   | 6. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil                                 |
|     |                   | dan Menengah Kabupaten Magetan  |
|     |                   | 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga                                  |
|     |                   | dan Cipta Karya Kabupaten Magetan   |
|     |                   | 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan                                 |
|     |                   | Sipil Kabupaten Magetan<br>9. Kepala Dinas Sosial, Ten <b>aga Kerja dan</b> |
|     | 1                 | Transmigrasi Kabupaten Magetan  |

| 1 | 2 | 3   |
|---|---|---|
|   |   | <ol> <li>Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan</li> <li>Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan</li> <li>Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan</li> <li>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan</li> <li>Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan</li> <li>Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan</li> <li>Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan</li> <li>Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan</li> <li>Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah</li> </ol> |
|   |   | Kabupaten Magetan  18. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan   |
|   |   | <ol> <li>Kepala Bagian Administrasi Perekonomian<br/>Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</li> </ol>  |
|   |   | Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan     Umum Sekretariat Daerah Kabupaten     Magetan   |
|   |   | 21. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan<br>Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Magetan   |
|   |   | 22. Kepala Subbag, Keuangan pada Badan<br>Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga<br>Berencana Kabupaten Magetan  |

BUPATI MAGETAN, TTD SUMANTRI

ETDA

SUCI LESTARI, S.H.
Pemblia Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

5

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/80/Kept./403.013/2016

TANGGAL: 16 Maret 2016

#### SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGENDALI KEGIATAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2W-KSS) KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015

| NO. | JABATAN DALAM TIM  | JABATAN DALAM DINAS   |
|-----|--------------------|---|
| 1   | 2                  | 3   |
| 1.  | Pelindung          | Bupati Magetan  |
| 2.  | Pembina            | Wakil Bupati Magetan  |
| 3.  | Ketua              | Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan   |
| 4.  | Wakil Ketua I      | Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Magetan                     |
|     | Wakil Ketua II     | Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan<br>Keluarga Berencana Kabupaten Magetan |
|     | Wakil Ketua III    | Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan                                       |
| 5   | Anggota Pengendali |   |
|     | Kegiatan Tingkat   | B   |
| - 1 | Kabupaten          | Kabupaten Magetan   |
| -   |                    | 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan   |
| 1   |                    | pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan   |
| ļ   |                    | Keluarga Berencana Kabupaten Magetan  |
|     |                    | 3. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada  |
|     |                    | Badan Pemberdayaan Perempuan dan  |
| 1   |                    | Keluarga Berencana Kabupaten Magetan  4. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera pada  |
|     |                    | Badan Pemberdayaan Perempuan dan  |
|     |                    | Keluarga Berencana Kabupaten. Magetan   |
|     |                    | 5. Kepala Bidang Advokasi dan Peningkatan                                       |
|     |                    | Peran Serta pada Badan Pemberdayaan   |
|     |                    | Perempuan dan Keluarga Berencana  |
|     |                    | Kabupaten Magetan   |
|     |                    | 6. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Bantuan                                       |
|     |                    | Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan                                       |
|     | ,                  | Transmigrasi Kabupaten Magetan  |

| 1 | 2 | 3   |
|---|---|---|
|   |   | <ol> <li>Kepala Sub Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan</li> <li>Kepala Sub Bidang Penganekaragaman dan Pengembangan Teknologi Pangan pada Badan Kereharian Pangan Kabupaten Magetan</li> <li>Kepala Seksi Pencegahan, Pemberantasan Hama dan Pengendalian Penyakit Hewan (P3H) pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan</li> <li>Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magetan</li> <li>Kepala Sub Bidang Pengarusutamaan Gender pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magetan</li> <li>Kepala Seksi Usaha Pertanian pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan</li> <li>Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Kepahlawanan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan</li> <li>Kepala Seksi Femberdayaan Kelembagaan Sosial Seksi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan</li> <li>Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan</li> <li>Kepala Seksi Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</li> <li>Kepala Seksi Industri Kerajinan dan Sandang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan</li> <li>Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan</li> <li>Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan</li> <li>Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan</li> </ol> |
|   |   | 7   |

| 1  | 2  | 3  |
|----|--|--|
|    |  | <ul> <li>21. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan</li> <li>22. Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan</li> <li>23. Kepala Seksi Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan</li> <li>24. Kepala Seksi Pengelolaan Perpustakaan Umum pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan</li> <li>25. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah</li> </ul> |
|    | I  | Kabupaten Magetan  |
|    |  | 26. Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Media Informasi pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan  27. Kepala Sub Bidang Partisipasi Masyarakat pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan  28. Kepala Sub Bidang Advokasi dan Motivasi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magetan  29. Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Magetan  30. Ketua dan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) I, II, III dan IV PKK Kabupaten Magetan                         |
| 6. | Tim Per.gendali<br>Kegiatan Tingkat<br>Kecamatan | <ol> <li>Camat Barat</li> <li>Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Barat</li> <li>Anggota PKK Kecamatan Barat</li> <li>Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Barat</li> <li>Kepala Unit Pelayanan Teknis Badan Pembina<br/>Keluarga Sejahtera (UPTB PKS) Kecamatan<br/>Barat.</li> </ol>  |

BUPATI MAGETAN TTD SUMANTRI

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETIIA

SUCLUSTARI, S.H.

I. Pembria Tingkat I

NIP 19680808 199503 2 002

1

#### CAMAT BARAT

#### KEPUTUSAN CAMAT BARAT NOMOR : 06 TAHUN 2016 TENTANG

#### TIM PENGENDALI

#### KEGIATAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2W-KSS) KECAMATAN BARAT TAHUN 2016

#### CAMAT BARAT

Menimbang

bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, komitmen, tasilitasi dan advokasi dalam pelaksanaan program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS), maka perlu membentuk tim Pengendali Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2w-Kss) Kecamatan Barat tahun 2016 yang ditetapkan dengan keputusan Camat;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 **Tahun 2008** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, **Tambahan** Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintan Daerah ( Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587):
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negra Republik Indonesia Tanun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
   2004 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10
   Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan
   Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran

- 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor II );
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2014,
   Perihal Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
   Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015;
- 13. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/79/Kept/403.013/2016 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS) Kabupaten Magetan Tahun 2016;
- 14. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/80/Kept./403.013/2016 Tentang Tim Pembina dan Pengendali Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS) Kabupatan Magetan Tahun 2016;
- 15. Surat Keputusan Camat Nomor: 05 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Penyelengaraaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pengendali Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) Kecamatan Barat Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini .

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU niempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan program kegiatan P2W-KSS di Kecamatan dan Desa Purwodadi sesuai program masing-masing dinas lintas sektor;
- Memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pelaksanaan kegiatan kepada kader-kader F2W-KSS di Desa Purwodadi;

Melaporkan hasil kegiatan program P2W-KSS kepada tim pembina masing-masing dinas lintas sektor.

KFTIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2012 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Barat Pada tanggal : 6 April 2016

YOK SUJARWADIS.STP Pembina Tingkat I NIP. 19760814 199511 1 001

NOMOR

06 Tahun 2016

TANGGAL : 06 April 2016

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI KEGIATAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2W-KSS) KECAMATAN BARAT TAHUN 2016

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS                      |
|----|-------------------|--|
| 1  | Ketua             | Camat                                    |
| 2  | Wakil Ketua I     | Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan        |
|    | Wakil Ketua II    | Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa    |
|    | Wakil Ketua III   | UPTB-KBKS                                |
| 3  | Sekretaris        | Staf UPTB-KBKS                           |
| 4  | Anggota           | 1. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
|    |                   | 2. Mantri Tani                           |
|    |                   | 3. Mantri Perkebunan                     |
|    |                   | 4. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Barat     |
|    |                   | 5. Kepala Puskesmas                      |
|    |                   | 6. TP.PKK Pokja II                       |
|    |                   | 7. TP.PKK Pokja I                        |
|    | v                 | 8. Kepala UPTD, PU wilayah IV Barat      |
|    |                   | 9. Mantri Statistik                      |
|    |                   | 10. Kasi Binsos                          |
|    |                   | 11. Staf UPTB-KBKS                       |
|    |                   | 12. Koordinator PPL dan PPL              |
|    |                   | 13. Kasi Trantib                         |
|    |                   | 14. PPL Perkebunan                       |
|    |                   | 15. Kepala KUA Kec.Barat                 |
|    |                   | 16. TP.PKK Pokja III                     |
|    |                   | 17 Kasi Pemerintahan                     |





#### PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN KECAMATAN BARAT DESA PURWODADI

# KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI KECAMATAN BARAT

NOMOR: 11 tahun 2016

**TENTANG** 

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI KEGIATAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2W-KSS) DESA PURWODADI TAHUN 2016

#### KEPALA DESA PURWODADI

Menimbang

Bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) Desa Purwodadi Kecamatan Barat perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Pengendali Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS) Desa Purwodadi Tahun 2016.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 'ndonesia Nomor 4437)

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2004 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
- Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/69/Kept/403.013/2016 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS) Kabupaten Magetan Tahun 2016;
- 10. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/70/Kept/403.013/2016 Tentang Tim Pembina dan Pengendali Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS) Kabupaten Magetan Tahun 2016;

11. Surat Keputusan Carnat Nomor : 05 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Tim Pengendali Kegiatan
Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita
Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)
Kecamatan Barat Tahun 2016;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pengendali Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) Desa Purwedadi Tahun 2016 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini .

**KEDUA** 

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai beriku:

- a. Melakukan koordinasi program kegiatan dengan dinas lintas sektor kecamatan dan organisasi / lembaga masyarakat desa;
- Melaksanakan Kegiatan Program Terpadu
   Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga
   Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS) di desa;
- c. Melaporkan pelaksanaan Kegiatan Program Terpadu P2W-KSS kepada Camat Barat melalui Kepala Desa Purwodadi.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Purwodadi
Pada tanggal : 20 April 2016
EPALA DESA PER WODAD

#### Tembusan:

Yth. 1. Sdr Bupati Magetan

2. Sdr Inspektur Kabupaten Magetan

 Sdr Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Magetan

4. Sdr. Camat Barat

5. Segenap Anggota Tim

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI NOMOR : 11 TANGGAL : 20 April 2016

11 20 April 2016

# SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGENDALI KEGIATAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2W-KSS) DESA PURWODADI KECAMATAN BARAT **TAHUN 2016**

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS                        |
|----|-------------------|--|
| 1  | Pembina           | Kepala Desa Purwodadi                      |
| 2  | Ketua             | Ketua Tim Penggerak PKK Desa Purwodadi     |
| 3  | Sekretaris        | PKBD Desa Purwodadi                        |
| 4  | Bendahara         | Bendahara Tim Penggerak PKK Desa Purwodadi |
| 5  | Anggota           | - Ketua BPD Desa Purwodadi                 |
|    |                   | - Ketua LPM Desa Purwodadi                 |
|    |                   | - Perangkat Desa Purwodadi                 |
|    |                   | - Pokja /Anggota PKK Desa Purwodadi        |

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI NOMOR 11 TANGGAL : 20-04-2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGENDALI KEGIATAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2W-KSS) DESA PURWODADI KECAMATAN BARAT TAHUN 2016

| NO | JABATAN DALAM TIM | NAMA                   | KETERANGAN      |
|----|-------------------|------------------------|-----------------|
| 1  | PEMBINA           | SUCI MINARNI           | KADES PURWODADI |
| 2  | KETUA             | WARSI .M.Pd            | ANGGOTA         |
| 3  | WAKIL KETUA       | TRUSILO KUMORO YEKTI.N | ANGGOTA         |
| 4  | SEKRETARIS        | DIANA SANTI            | ANGGOTA         |
| 5  | BENDAHARA         | SRI HERMANI F.H        | ANGGOTA         |
| 6  | KOMINFO           | SHEVA NUR MANFAATI     | ANGGOTA         |
| 7  | KEMENAG           | LILIK SUNARSIH         | ANGGOTA         |
| 8  | HUKUM             | YODI SUNARYO           | ANGGOTA         |
| 9  | PP                | MURTATIK               | ANGGOTA         |
| 10 | PENDIDIKAN        | ERA TRIANAWATI         | ANGGOTA         |
| 11 | DISPERINDAG       | MEI WULAN .W.M         | ANGGOTA         |
| 12 | PERTANIAN         | SUKARTI                | ANGGOTA         |
| 13 | KESEHATAN         | KRISTIORINI            | ANGGOTA         |
| 14 | SOSIAL            | YAYUK SULASTRI         | ANGGOTA         |
| 15 | KOPERASI          | NIYEM                  | ANGGOTA         |
| 16 | KBKS              | MURYANI                | ANGGOTA         |
| 17 | PKK               | WARSI M.Pd             | ANGGOTA         |





# KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia Telp.: +62-341-553737, 568914, 558226 Fax: +62-341-558227 E-mail: fia@ub.ac.id http://fia.ub.ac.id

Nomor

:18971 /UN10.F03.11.11/PN /2017

Lampiran

: Proposal skripsi

Hal

: Riset/Survey

Kepada

: Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan

Jl. Basuki Rahmat Barat No.1, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan

Jawa Timur 63361

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan

Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa:

Nama

: Shofilatul Miladiah

Alamat

: Desa Botok, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan

NIM

: 145030100111009

Jurusan

: Administrasi Publik

Prodi

: Ilmu Administrasi Publik

Tema

: Pemberdayaan Perempuan Melalui Peningkatan Peranan Wanita Menuju

Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) (studi di Desa Purwodadi Kecamatan

Barat, Kabupaten Magetan)

Lamanya

: 2 (dua) Bulan

Peserta

: 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 22 Desember 2017

n Studi Ilmu Administrasi Publik

Lely Indah Mindarti, Dr., M.Si NIP. 196905242002122002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk:

Perusahaan

10. Mahasiswa 11. Program Studi

12. Arsip TU



# PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rachmat Barat Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314 Telepon ( 0351 ) 8198137 Fax. ( 0351 ) 8198137 E-mail: bakesbangpol.go.id

#### SURAT KETERANGAN IZIN RISET / SURVEY

Nomor: 072 / 251 / 403.205 / 2017

Membaca

Surat dari Universitas Brawijaya Malang, tanggal 22 Desember 2017 nomor : 18971/UN10.F03.11.11/PN/2017 perihal Permohonan Ijin Riset/Survey.

Mengingat

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1972.

2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 17 Juli 1972 Nomor: Gub./187/1972.

 Radiogram Gubernur Jatim, tgl 30 Desember 1999 No.300/1885/303/1999 perihal proses perijinan Survey KKN, PKL dan sejenisnya.

Dengan ini menyatakan <u>TIDAK KEBERATAN</u> dilaksanakan Izin Riset / Survey yang diajukan oleh:

Nama

SHOFILATUL MILADIAH

NIM Fakultas 145030100111009 Ilmu Administrasi Administrasi Publik

Jurusan Program Studi Dosen Pembimbing

Ilmu Administrasi Publik Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si

Judul

" Pemberdayaan Perempuan Melalui Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) (Studi di Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan) "

Lely Indah Mindarti, Dr., M.Si

Nama Penanggung Jawab

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Alamat : J

Jl. MT. Haryono 163 Malang

Lokasi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.

Magetan

Waktu pelaksanaan

Bulan Januari s/d Maret 2018

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian setempat.
- 2. Mentaati ketentuan ketentuan yang berlaku di Daerah Hukum Pemerintah setempat.
- Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan pernyataan, baik dengan lesan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bengsa, negara dari suatu golongan penduduk.
- Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan lain diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
- Setelah berakhirnya survey / research dan lain lain, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research dan lain – lain sebelum meninggalkan tempat survey / research dan lain – lain.



- Selesai pelaksanaan kegiatan survey / research / penelitian dan lain lain diwajibkan memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan atau menyerahkan 1 ( satu ) eksemplar hasil penelitian kepada Bakesbangpol dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan.
- Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak memenuhi kekentuan sebagaimana tersebut diatas.

Magetan, 29 Desember 2017
A.n Pit KEPALA BAKESBANGPOL
MARURATEN MAGETAN

ekretaris

G ENDRI YUPRIYANTO, SE Pembina

NIP. 19610428 198603 1 011

#### Tembusan Yth:

- 1 Sdr Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan
- 2 Sdr Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Magetan
- 3 Sdr Kepala Desa Purwodadi Kec. Barat Kab. Magetan



# PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JL. Teuku Umar No. 55 MAGETAN - 63351 Telp/Fax. 0351.895114 Website: http://bppkb.magetankab.go.id e-Mail: bppkb@magetankab.go.id

# SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET/SURVEY

Nomor: 072 1435 1403.206/2018

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

: Ir. Miftahuddin

Nip

: 19672610199302 1 001

Jabatan

: Plt. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak Kabupaten Magetan

Alamat

: Jalan Teuku Umar No. 55 Magetan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

2. Nama

: SHOFILATUL MILADAH

NIM

145030100111009 : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Dosen Pemb. : Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si

telah melakukan serangkaian kegiatan Survey / riset berdasarkan surat ijin Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Magetan No: 072/251/403.205/2017 di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Kabupaten magetan pada bulan januari s/ Maret 2018 dengan judul " Pemberdayaan perempuan melalui Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), Studi di Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan "

Demikian surat keterangan ini agar digunakan sebagaimana mestinya

Magetan, 21 Maret 2018 An Kepala Dinas PPKB Dan PPPA bupaten Magetan

NIP: 19672610199302 1 001



#### PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN KECAMATAN BARAT

# KANTOR KEPALA DESA PURWODADI

Jl. Sumatera No. 01 Telp. (0351) 869182 Kode Pos 63394

#### SURAT KETERANGAN Nomor: 422 / 18 / 403.412.6 / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Purwodadi menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

1. Nama

: SHOFILATUL MILADIAH

2. Tempat/Tgl. Lahir

: Magetan, 15 - 11 - 1995

3. NIM

: 145030100111009

4. Jenis kelamin

: Perempuan

5. Program Study

: Ilmu Administrasi Publik UB

8. Alamat

9. Keterangan

: Desa Botok RT.3 RW.02

Kec.Karas Kab.Magetan.

selesai

:Bahwa yang bersangkutan telah

melaksanakan Penelitian atau Pelaksanaan Riset

Perempuan Melalui Program Terpadu P2WKSS di

Desa Purwodadi Kec.Barat Kab.Magetan

Demikian Surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwodadi ,26 Maret 2018

SUCI MINARNI

# BRAWIJAYA

# Lampiran 8. Curriculum Vitae

# **CURRUCULUM VITAE**

Nama : Shofilatul Miladiah NIM : 145030100111009

Tempat dan Tangga Lahir : Magetan, 15 November 1995

Fakultas/Jurusan : FIA/ Administrasi Publik
Pendidikan : Ilmu Administrasi Publik

1. SD : SDN Botok I (2002-2008)

SMP : SMPN 2 Magetan (2008-2011)
 SMA : SMAN 1 Sukomoro (2011-2014)

4. Universitas : Universitas Brawijaya (2014-2018)

Pekerjaan : -

Pengalaman Magang : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur (2017)

Pengalaman Organisasi :

1. UKM TEGAZS Universitas Brawijaya (Tim Bidang Penyuluhan, 2016)

2. UKM TEGAZS Universitas Brawijaya (Sekretaris Umum, 2017)

#### Pengalaman Kepanitiaan

| 1. Gebyar Brawijaya Qur'ani II              | (Divisi Konsumsi, 2015) |
|---|-------------------------|
| 2. Pagelaran Seni Simpfoni Senja            | (Co. Konsumsi, 2015)    |
| 3. Gebyar Brawijaya Qur'ani III             | (Divisi MHQ, 2016)      |
| 4. Seminar Nasional FORMAPI                 | (Divisi Konsumsi, 2016) |
| 5. Seminar Nasional HANI                    | (Divisi Konsumsi, 2016) |
| 6. Peringatan Hari AIDS Sedunia             | (Divisi Humas, 2016)    |
| 7. Peringatan Malam Renungan AIDS Nusantara | (Divisi Humas, 2016)    |
| 8. Diklat XIV UKM TEGAZS UB                 | (Divisi Humas, 2016)    |

